



PETANI DAN MASA DEPAN PERTANIAN NTB

Maharani & Suherman

Petani Dan Masa Depan Pertanian NTB

Petani Dan Masa Depan Pertanian NTB

Editor Maharani

Desain Cover Herman Rakha

Layout Herman Rakha

Buku ini tidak untuk kegiatan komersialisasi. Mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi harus dengan seizin dari Lombok Research Center selaku penerbit.

Cetakan 1 Agustus 2019

Ukuran Buku : 14 x 21 cm

Jumlah Halaman : I + 134 Halaman

Diterbitkan Oleh :

Lombok Research Center

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Buku **“Petani Dan Masa Depan Pertanian Di NTB”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selama ini telah memberikan bantuan masukan demi kelancaran penyusunan buku ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi buku ini sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lombok Timur, Agustus 2019

Direktur
Lombok Research Center

Daftar Isi

	Hal
Halaman Judul	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Gambaran Umum Pertanian Di Nusa Tenggara Barat.....	V
Pendahuluan	XIV

BAB 1

Kearifan Lokal Masyarakat Suku Sasak Dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian Di Pulau Lombok	1
Dampak Perubahan Iklim Bagi Produksi	
Komoditi Pertanian Di NTB	6
Mengurangi Dampak Kekeringan Di NTB	10
Generasi Lotim Dalam Balutan Virginia	16

BAB 2

Digital Marketing Didalam Peningkatan Nilai Tambah	
Komoditi Pertanian	20
Kebijakan Pertanian Dalam Politik Lokal NTB	24
Mendorong Kemandirian Petani.....	29
Mengapa Petani Harus Mandiri Pada Benih ?	33
Pembangunan Pertanian : Dimana Harus Memulainya ?	36
SMK Pertanian Dan Regenerasi Petani Di NTB.....	43
Subsidi Terbalik Pada Sektor Pertanian	48
Petani, Bisnis Pertanian, Dan Rantai Pasar	
“Siapa Yang Untung ?”	54

BAB 3

Adaptasi Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin Pada Daerah Rawan Bencana	66
Format Ulang Sistem Ketahanan Pangan Lombok Timur	72
Keberagaman Konsumsi Dalam Ketahanan Pangan NTB	76
Kedaulatan Pangan Harus Menjadi Skala Prioritas Di NTB ...	81
Kesemerawutan Data Pada Sektor Pangan	85

Ketahanan Pangan Sebagai Komoditi Sosial, Ekonomi, Dan Politik.....	91
--	----

BAB 4

Kajian Komposisi Media Tanah Terhadap Pertumbuhan Benih Tembakau Virginia Lombok.....	94
Politik Dagang Cabai	111
Rantai Pasar Bencana Di NTB.....	115
Sektor Pertanian Dalam Pergulatan Politik Di Gumi Selaparang	121
Ayo Menanam Gunitir	125
Mensinkronkan Produksi Tomat Dan Pasar Di Lombok Timur	129
Daftar Pustaka	133

GAMBARAN UMUM PERTANIAN DI NUSA TENGGARA BARAT

LETAK DAN DAERAH

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 08° 10' - 09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46' - 119° 05' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores.
- Sebelah Timur : Selat Sape, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat : Selat Lombok, Provinsi Bali.

Luas wilayah Provinsi NTB adalah sekitar 49.312,19 km² dengan luas daratan 20.153,15 km² dan luas perairan laut 29.159,04 km². Luas daratan Provinsi NTB hanya 1,05 % dari luas daratan Indonesia yang mencapai 192.257.000 km². Provinsi NTB terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,80 km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,45 Km² (76,49%). Di sekitar pulau tersebut terdapat ± 332 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Dari jumlah pulau-pulau kecil tersebut, ± 282 pulau telah memiliki nama. (280 pulau dan 32 pulau yang telah berpenghuni) NTB Dalam Angka 2012. Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB yang berjarak 1051 Km dari Ibu Kota Negara Jakarta. Perjalanan Jakarta ke Mataram dapat ditempuh dengan perjalanan darat dan udara. Perjalanan udara menempuh waktu selama 2 jam, sedangkan perjalanan darat dengan bisa langsung dari Jakarta menempuh waktu selama dua hari dan dua malam dan menyeberang dua lautan yaitu Selat Bali dan Selat Lombok dengan menggunakan Kapal Ferry.

Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan yang sangat strategis secara internasional, nasional maupun regional, karena:

- Berada pada alur pelayaran laut internasional (ALKI 2) yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, dimana alur ini adalah alur alternatif Selat Malaka.

- Berada pada lintas perhubungan Banda Aceh - Atambua yang merupakan jalur sabuk Selatan transportasi darat nasional;
- berada dalam wilayah segi tiga emas tujuan wisata internasional (international tourism triangle zone) yakni Pulau Bali, Pulau Komodo dan Tana Toraja.

KLIMATOLOGI

Menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), temperatur maksimum berkisar antara 30,4 0C – 32,9 0C dan temperatur minimum antara 20,9 0C – 24,8 0C . Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November dan terendah pada bulan Juni dan Juli.

Kelembaban di Provinsi NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 74-81 persen, Curah hujan tertinggi sekitar 13,8-15,2 mm pada musim penghujan Maret-April mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah sebelah Utara, sedangkan curah hujan 158,1-130,3 mm pada bulan September-Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Lombok Selatan, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 15,9 mm pada bulan Agustus mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Lombok Selatan, seluruh luas wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, 50% luas wilayah Kabupaten Dompu dan seluruh luas wilayah Kabupaten Bima. Temperatur maksimal berkisar antara 30,2-32,7 0^c, dan temperatur minimum berkisar antara 21,3-24,7 0^c.

Iklim di NTB terbagi menjadi dua bagian daerah, yaitu bagian Utara pulau Lombok dengan kondisi daerah yang relatif basah (Iklim D basah), sedangkan untuk daerah Selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa relatif kering (iklim D kering sampai iklim E).

Hal ini menyebabkan sebagian besar lahan-lahan pertanian di NTB (80%) merupakan lahan kering. Berdasarkan hasil penelitian dari Suardji (2008) Komoditi pertanian lahan kering yang diarahkan untuk dikembangkan di NTB dapat dikelompokkan (1) Komoditi Tanaman Pangan Musiman, (2) Komoditi Tanaman Buah-Buahan,

(3) Komoditi Tanaman perkebunan dan (4) Komoditi Peternakan. Dengan melihat kondisi iklim yang dimiliki oleh NTB menyebabkan lahan pertanian akan kesulitan memperoleh air. Di daerah tropis, curah hujan merupakan satu-satunya sumber air yang dapat digunakan untuk irigasi. Namun dibagian Selatan Pulau Lombok memiliki budaya yang agak unik yaitu dengan sistem pertanian embung rakyat.

Embung (*telage*) air adalah waduk berukuran kecil di lahan pertanian (*small farm reservoir*) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan dan menggunakannya jika diperlukan tanaman pada musim kemarau. Teknik pemanen air (*water harvesting*) demikian cocok bagi ekosistem tadah hujan dengan intensitas dan distribusi curah hujan tidak pasti (*eratic*) (Syamsiah dan A. M. Fagi, 2004) dalam (Arif Surahman, I. M. Wisnu W dan Sasongko). Embung sudah melekat dengan kehidupan masyarakat tani di Pulau Lombok terutama daerah Selatan yang umumnya relatif kering. Pemanfaatan embung terutama sebagai usaha tani, namun pada musim hujan embung-embung tersebut dimanfaatkan oleh petani sebagai tempat memelihara ikan. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan petani. Keberhasilan usaha tani di daerah ini khususnya untuk daerah-daerah yang terletak di bagian Selatan dapat dikatakan sangat ditentukan oleh kepemilikan embung oleh petani.

Walaupun lahan di NTB masih didominasi oleh lahan kering, namun pertanian di Nusa Tenggara Barat didominasi oleh tanaman pangan, terutama padi. Produksi padi pada tahun 2010 mencapai 1.774.499 ton atau turun sebesar 5,15 persen dari tahun sebelumnya. Hampir semua komoditi palawija mengalami penurunan pada tahun 2010, kecuali Kacang Hijau dan Ubi Jalar. Kacang hijau mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 50.012 ton yang sebelumnya mencapai 33.774 ton.

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terhubung oleh Pelabuhan Kayangan. Selain itu juga terdapat beberapa pelabuhan yang menghubungkan pulau-pulau di NTB atau pelabuhan yang menghubungkan NTB dengan pulau Provinsi lain. Selain pelabuhan

antar pulau di NTB juga dihubungkan oleh transportasi udara meski jumlahnya hanya beberapa saja dengan jumlah penerbangan yang sedikit dan kedepan akan terus ditambah prekuensinya.

KARAKTERISTIK PETANI

Petani di NTB umumnya menanam padi, terutama pada musim basah, lahan sawah yang ada hampir semua ditanami dengan padi. Pada saat demikian tanaman bersifat monokultur. Namun jika tiba saat pergantian musim tanam biasanya petani akan mulai menanam berbagai jenis sayur pada lahan mereka. Lain halnya jika musim kering tiba, pada daerah-daerah tertentu lahan pertanian justru dikosongkan (bero/bera) karena mereka kesulitan untuk memperoleh air untuk tanaman mereka. Namun pada daerah yang masih bisa mengakses air meski dengan cara bergilir, lahan mereka ditanami berbagai tanaman sayur dan kacang-kacangan. Bahkan tak jarang juga petani di NTB menanam buah-buahan semusim seperti buah Melon dan buah Semangka.

Di NTB secara umum mengenal sistem *Sakap* dalam pengelolaan lahan pertanian. Sistem *sakap* maksudnya buruh tani mengerjakan lahan orang lain (pemilik lahan). Mereka tidak menerima upah harian atau bulanan melainkan menerimanya setiap panen. Sistem yang dipergunakan adalah sesuai dengan musim panen. Musim panen tersebut terdiri dari tiga musim yaitu dua matak balit (panen balit) dan satu kali matak/panen taun. Pada saat matak balit hasil panen dan biaya produksi ditanggung bersama antara buruh dan pemilik lahan, namun pada matak taun baik biaya maupun hasil untuk pemilik lahan.

Umumnya petani di NTB sangat tergantung pada lahan pertanian mereka, hampir semua waktu mereka dihabiskan di lahan pertanian, terutama pada bulan-bulan basah. Sehingga sumber pendapatan utama mereka masih mengandalkan hasil sawah. Kerja sampingan yang biasanya mereka tekuni sebagai peternak, jenis ternak yang diusahakan seperti Ayam, Bebek, Kambing, dan Sapi. Organisasi atau kelembagaan petani belum tertata dengan baik dan pada umumnya pembentukan kelompok tani tersebut terbentuk ketika akan mendapatkan bantuan saja.

KEBIJAKAN UMUM SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dalam RPJM Nusa Tenggara Barat 2018-2023 disebutkan bahwa tujuan pembangunan di NTB adalah mewujudkan NTB Gemilang dengan pembangunan diberbagai sektor. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2018-2023 adalah membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 'Gemilang'.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 misi pembangunan, yaitu: 1. Akselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa yang transparan akuntabel dan berintegritas berbasis mitigasi. 2. Akselerasi perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berakarakter melalui pembangunan keluarga dengan prinsip menghargai kemanusiaan, keragaman, dan kesetaraan gender. 3. Akselerasi penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah. 4. Akselerasi peningkatan daya saing SDM sebagai pondasi daya saing daerah. 5. Akselerasi transformasi birokrasi menuju demokrasi yang bersih dan melayani. 6. Optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. 7. Akselerasi pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan dan kawasan strategis. 8. Optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan dan pemantapan stabilitas keamanan.

Di bidang Pertanian secara umum yang meliputi peningkatan dan perbaikan kawasan pertanian yang meliputi pertama, kawasan pertanian basah yang ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan. Kedua, kawasan pertanian lahan kering yang ditujukan untuk mengembangkan komoditi yang memiliki keunggulan komperatif, mengembangkan agroindustri berbasis hasil pertanian lahan kering serta mengembangkan infrastruktur prasarana sumber daya. Ketiga, kawasan perkebunan dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat. Keempat, kawasan peternakan. Usaha mencapai NTB gemilang melalui pengembangan sektor pertanian ini diharapkan akan membawa NTB menjadi lebih baik dengan adanya produk unggulan daerah.

Beberapa peraturan dikeluarkan untuk mendukung program tersebut. Untuk pengembangan Sapi, sebagian peraturan yang ada mengatur sub sistem hulu ini terkait dengan adanya program Bumi sejuta Sapi, sehingga untuk mempercepat tercapainya pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2010 mengenai perbibitan sapi bali. Ini juga ditunjang dengan dikeluarnya surat keputusan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No 188.3/1.802 Tahun 2012 yang mengatur mengenai pengeluaran ternak potong dari NTB. Pengaturan sector hilir ini tujuannya untuk menjaga konsistensi dari provinsi NTB ini menjadi bumi sejuta sapi sehingga mengatur distribusi keluarnya sapi potong dari NTB. Hal ini berdampak negative kepada peternak. Yaitu turunnya harga sapi di tingkat peternak. Dengan dibatasinya pengeluaran sapi dari NTB membuat harga dipermainkan oleh pengusaha dengan alasan tidak bisa mengeluarkan sapi dari NTB sehingga pembelian akan berkurang. Dan secara langsung akan merugikan peternak. Belum lagi sistim pasar di NTB khususnya pulau Lombok masih bersifat tradisional, sehingga rentan peternak dipermainkan oleh pengusaha dalam harga jual. Pasar tradisional khususnya pasar sapi memiliki banyak calo-calo (makelar), makelar yang memiliki hak untuk menjual sapi kepada pembeli. Sehingga dalam menentukan harga makelar memiliki peran kunci, dan biasanya makelar memiliki keuntungan dari penjual dan pembeli.

Sedangkan untuk peningkatan Jagung walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang mau berusaha di bidang jagung, namun peraturan itu masih belum mampu merangsang masyarakat untuk berusaha.

Dari hasil diskusi dengan pelaku usaha dan petani, 100% petani dan pelaku usaha belum tahu dengan peraturan tersebut. Apalagi dengan adanya pasal yang mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal harus sudah berjalan dua tahun. Ini akan menghilangkan kesempatan bagi pelaku-pelaku usaha yang masih pemula.

Begitu juga dengan masih minimnya peraturan yang mengatur sub sistem on-farm menyebabkan kemampuan petani

dalam bidang budidaya lemah, ini sesuai dengan masih rendahnya produktivitas Jagung di NTB. Walaupun potensi lahan dan penggunaan lahan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, masih belum diimbangi dengan peningkatan produksi lahannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Kementerian Pertanian RI bahwa potensi pengembangan Jagung untuk NTB cukup besar.

KOMODITAS POTENSIAL SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nusa Tenggara Barat yang merupakan daerah yang memiliki potensi lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan atau membudidayakan berbagai jenis tanaman. Baik pertanian lahan basah maupun lahan kering. Namun ada beberapa komoditas potensial untuk dikembangkan di NTB yaitu :

Tabel Komoditas Potensial Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas	Luas Lahan (dalam ha)			Volume Produksi (dalam Ton)			Nilai Produksi (dalam Juta Rp)
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011
Tanaman pangan:							
1. Komoditas Jagung	81543	61593	89307	308863	249005	456915	1.370.745.000
2. Komoditas Kc.Hijau	34536	45511	45351	33774	50012	50702	253510000
Hortikultura:							
1. Komoditas cabai	7452	4687	5358	39334	18870	19665	196650000
2. Komoditas Tomat	1212	1335	1671	28781	25639	33859	203154000

Sumber : BPS,NTB dalam Angka 2012

Perkembangan volume produksi mengikuti perkembangan luas areal. Pada tahun 2010 terjadi penurunan luas areal sebesar lebih dari 2000 Ha sehingga pada tahun yang sama volume produksi juga mengalami penurunan sekitar 900 ton. Penurunan ini dikarenakan pada tahun tersebut bulan basah di NTB secara umum lebih banyak sehingga lahan yang biasanya ditanami Jagung beralih menanam padi. Seperti pada umumnya komoditas

pertanian, jika pada saat musim panen tiba harga anjlok. Kondisi ini tentunya akan sangat merugikan petani. Untuk harga kacang Hijau dan Cabai meski pada saat musim panen harga tidak terlalu anjlok, bekisar antara Rp 6-7 ribu per kg untuk kacang hijau dan mencapai Rp14.000 pada saat musim tanam padi. Sedangkan untuk cabe pada saat musim panen harga bisa mencapai Rp 8.000-9.000 dan bisa mencapai Rp 30.000 pada saat musim tanam padi atau musim penghujan. Namun tidak demikian dengan harga tomat, jika musimpanen tiba harga tomat sangat anjlok bisa turun hingga Rp 200 per kg dan mencapai 10.000-12.000 ribu pada saat musim tanam padi atau saat musim penghujan.

Tabel Komoditas Potensial Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas	Luas Lahan (dalam ha)			Volume Produksi (dalam Ton)			Nilai Produksi (dalam Juta Rp)
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011
Tanaman pangan:							
1. Komoditas Jagung	81543	61593	89307	308863	249005	456915	1.370.745.000
2. Komoditas Kc.Hijau	34536	45511	45351	33774	50012	50702	253510000
Hortikultura:							
1. Komoditas cabai	7452	4687	5358	39334	18870	19665	196650000
2. Komoditas Tomat	1212	1335	1671	28781	25639	33859	203154000

Sumber : BPS,NTB dalam Angka 2012

Perkembangan luas areal penanaman kopi tidak diikuti oleh peningkatan volume produksi yang terjadi malah sebaliknya, volume produksi semakin menurun. Hal ini karena tanaman yang baru ditanam belum bisa menghasilkan melainkan baru bisa menghasilkan setelah tanaman berusia lima tahun. Sedangkan hasil yang ada saat ini berasal dari tanaman yang sudah ada sebelumnya yang sudah berusia tua sehingga produksi semakin menurun. Denikian pula yang terjadi pada tanaman kakao dan jambu mete. Sedangkan untuk tanaman tembakau Virginia dari sisi areal tanaman terjadi penurunan namun volume produksi meningkat karena petani sudah menerapkan intensifikasi.

Potensi peternakan di Provinsi NTB sangat potensial, hal ini didukung dengan masih luasnya areal pengembalaan. Selain itu pakan yang sangat beragam juga masih tersedia dengan alami.

Lahan untuk memproduksi pakan masih tersedia cukup luas. Provinsi NTB yang terdiri dari dua Pulau besar mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan pengembangan peternakan. Di Pulau Sumbawa, ternak-ternak dipelihara dengan melakukan pelepasan di lahan. Ini ditunjang dengan masih luasnya lahan pengembalaan. Berbeda dengan Pulau Lombok yang model pemeliharaannya bersifat pengandangan. Ternak-ternak masih dikandangan. Potensi peternakan di Provinsi NTB dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Komoditas Potensial Sub Sektor Tanaman Perkebunan

Komoditas	Luas Lahan (ha)			Volume Produksi (dalam Ton)			Nilai Produksi (dalam Juta Rp)
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011
1. Komoditas Kopi	12251.49	12468.35	12753.80	5324.12	5619.64	5126.10	102522
2. Komoditas Tembakau	29758.95	29527.40	22890.33	51353.32	35890.29	36476.51	14590604
3. Komoditas Jambu Mete	67273.82	67339.05	66056.86	15398.93	11855.24	12964.29	103714320
4. Komoditas Kakao	5832.42	6117.97	6778.56	1502.76	1271.28	1319.50	23751

Sumber : BPS, NTB Dalam angka 2012

Melihat tabel di atas, menunjukkan masih potensialnya pengembangan peternakan di provinsi NTB. Trend jumlah ternak (besar maupun kecil) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apalagi ditunjang dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dalam melakukan percepatan populasi ternak di NTB mengeluarkan kebijakan strategis yaitu bumi sejuta sapi. Masyarakat dibantu dengan diberikan bibit-bibit sapi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 7,1 persen yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,6 persen. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan. Pada tahun 2018 sektor pertanian dan perkebunan menyumbang 24 persen dari total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp 100 Triliun. Data dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB menyebutkan target produksi padi tahun 2018 lalu sebanyak 2,644,616 ton Gabah Kering Giling (GKG), tercapai sebesar 2,549,716 ton. Demikian juga jagung, targetnya 2,084,935 ton, terpenuhi 2,059,222 ton.

Prestasi yang gemilang dalam sektor pangan ini juga semakin lengkap dengan ditunjuknya NTB menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional oleh pemerintah pusat. Predikat sebagai daerah penyangga pangan nasional ternyata belum berpengaruh secara maksimal terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di daerah ini. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional sehingga, dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin di NTB memang terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 816,62 ribu jiwa atau 17,05 persen, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,05 persen (7,27 ribu jiwa). Tahun 2016, persentase penduduk miskin menurun dari 17,10 persen pada tahun 2015 menjadi 16,48 persen pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebanyak 10,66 ribu orang. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018, dimana persentase penduduk miskin turun dari 16,07 persen pada tahun 2017 menjadi 14,75 persen pada tahun 2018. Apabila dirata-ratakan penurunan tingkat kemiskinan di NTB masih di bawah 2 digit. (BPS, 2019).

Untuk itu, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah NTB untuk terus menekan angka kemiskinan di daerah ini adalah memaksimalkan potensi pertanian yang ada. Kondisi geografis NTB yang bervariasi antara dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, pesisir tanah yang kering, maupun berbagai kondisi lahan dengan sistem irigasi yang baik, lahan kering, tadah hujan, pasang surut, menyebabkan tidak semua wilayah di NTB mampu memproduksi semua jenis komoditi pangan yang sama. Petani cenderung memilih jenis pertanian yang cocok dan menguntungkan sesuai dengan kondisi di tempat tinggalnya. Namun, perlu diingat bahwa saat ini pengaruh terhadap dampak perubahan iklim sudah dirasakan oleh para petani dimana musim penghujan mengalami pergeseran dan tidak merata. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan para petani di NTB yang rata-rata tingkat pendidikannya SMP dan SD ke bawah.

Sektor pertanian dan perkebunan di NTB masih menjadi penyedia lapangan kerja yang menopang perekonomian NTB. Data Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyatakan bahwa terdapat 33,48 persen penduduk NTB bekerja pada sektor ini dari jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 5,07 juta jiwa berdasarkan Sakernas pada tahun 2018 (BPS NTB, 2019). Namun, yang perlu menjadi kekhawatiran adalah tenaga kerja yang terserap itu sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMP dan SD ke bawah. Badan Pusat Statistik NTB (2017) menyatakan bahwa penduduk NTB yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2015 (39,01%) dan tahun 2016 (38,90%). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan minat terutama pada generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Tingkat pengangguran yang rendah hanya memecahkan masalah penyerapan tenaga kerja namun, belum mampu memberikan indikasi mengenai kualitas pekerja.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Data Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB baik Negeri maupun Swasta sebanyak 320 SMK. Dari total SMK yang ada tersebut hanya 48 SMK yang termasuk dalam SMK pertanian atau memiliki jurusan pertanian (ICC, 2016). Memaksimalkan peran SMK Jurusan Pertanian sebagai salah satu basis regenerasi pertanian di NTB perlu dilakukan melalui upaya mendekatkan atau menyambungkan lulusan SMK dengan dunia usaha dan industri di NTB. Hal ini dimaksudkan agar para lulusan SMK di NTB memiliki orientasi pada Job Creator, dimana kedepannya para lulusannya akan berkreasi sebagai wirausahawan muda di bidang pertanian.

Provinsi NTB juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia selain Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tiga provinsi di luar Jawa Barat merupakan penghasil 90% tembakau di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB pada 2015 menyatakan luas lahan tembakau baik itu tembakau rakyat dan tembakau Virginia adalah seluas 23.760 hektar dengan produksi mencapai 34.449 ton. Khusus untuk NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah merupakan sentra tanaman tembakau. Pada sektor ini juga perputaran uang yang beredar sangat tinggi hingga triliunan rupiah mulai dari produksi hingga pasca panen. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tembakau ini tidak saja menyasar kepada tenaga kerja dewasa namun, juga pada kenyataannya masih terdapat adanya pelibatan anak-anak sebagai pekerja atau buruh.

Pelibatan anak-anak sebagai pekerja pada sektor ini tidak lain dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi serta sosial budaya yang tumbuh di masyarakat. Terkadang anak-anak “dipaksa atau terpaksa” ikut melakukan pekerjaan yang dari beberapa hasil penelitian dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Human Right Watch (HRW) Indonesia didalam laporan penelitiannya yang berjudul “Panen Dengan Darah Anak, Bahaya Pekerja Anak dalam Pertanian Tembakau di Indonesia” pada tahun 2016 di 4 daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia termasuk didalamnya adalah Kabupaten Lombok Timur menyatakan bahwa pelibatan anak pada kegiatan sektor pertanian

tembakau sangat membahayakan kesehatan pekerja anak. Mereka akan terpapar nikotin, pestisida beracun, panas ekstrem, dan bahaya lain. Pekerjaan ini berdampak langgeng bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian di NTB juga seringkali hanya dijadikan sebagai komoditi politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) saja. Salah satu yang measih menjadi perdebatan beberapa pemerhati lingkungan adalah timbulnya bencana banjir bandang di Pulau Sumbawa. Hal ini ditengarai oleh kebijakan pemerintah daerah yang mendorong produksi Jagung dengan konsep perluasan lahan. Masyarakat jadi masuk merambah hingga kawasan hutan dan melakukan penebangan secara sembarangan tanpa memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Kondisi ini juga diperparah oleh adanya dampak perubahan iklim. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat ataupun serangan hama penyakit pada tanaman juga merupakan salah satu akibat dari adanya perubahan iklim.

Oleh karenanya, pemerintah daerah NTB perlu memaksimalkan berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagai upaya mitigasi dan adaptasi dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Memanfaatkan tanaman lokal serta pemanfaatan lahan pekarangan adalah salah satu upaya yang mesti digalakkan dalam setiap program kebijakan pertanian di daerah ini.

Berdasarkan hal tersebut maka, Lombok Research Center berupaya menyajikan berbagai hasil penelitian dan analisisnya pada sektor pertanian NTB dalam sebuah buku yang berjudul **“Petani Dan Masa Depan Pertanian NTB”** agar sekiranya dapat menjadi bahan renungan bagi semua stakeholder di daerah ini agar dapat dijadikan bahan pembanding ataupun rujukan dalam mengambil kebijakan terutama pada sektor pertanian di NTB.

Akhirnya, penulis juga memohon maaf atas kekurangan yang terdapat pada isi buku ini.

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK DAN ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR PERTANIAN DI PULAU LOMBOK

Akhir-akhir ini kita seringkali mendengar mengenai kejadian bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Semua kejadian-kejadian tersebut erat hubungannya dengan lingkungan dan perubahan iklim. Pemanasan global telah menyebabkan menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini, antara lain: penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub Utara dan Selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja.

Banyak sudah para ahli dan ilmuwan yang telah memberikan masukan dan solusi guna mengatasi persoalan ini sesuai dengan latar belakang keahlian masing-masing. Namun, hingga saat ini berbagai formula yang telah dilakukan belum mampu untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang menjadi titik sentral persoalan pemanasan global ini. Kalaupun ada namun dampaknya belum terlalu signifikan sehingga, saat ini berbagai komponen pemerhati lingkungan mulai beralih kepada penerapan kearifan lokal yang pada dasarnya selalu mengedepankan harmonisasi makhluk hidup dengan alam (lingkungan). Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Beberapa fungsi kearifan

lokal antara lain adalah sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, mengembangkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya manusia, pengembangan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.

Indonesia merupakan negara pertanian dimana pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian (*Mubyarto, 1989*). Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim karena berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil (*Nuridin, 2011*). Iklim erat hubungannya dengan perubahan cuaca dan pemanasan global dapat menurunkan produksi pertanian antara 5-20 persen (*Suberjo, 2009*). Perubahan iklim merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan fenomena cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim terjadi karena adanya perubahan variabel iklim, seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang antara 50 sampai 100 tahun (*Kementerian Lingkungan Hidup, 2004*). Perubahan iklim juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak stabil sebagai contoh curah hujan yang tidak menentu, sering terjadi badai, suhu udara yang ekstrim, serta arah angin yang berubah drastis (*Ratnaningayu, 2013*).

Pada dasarnya sistem pertanian di berbagai wilayah Indonesia telah lama mengaplikasikan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam bidang pertanian. Salah satu contohnya adalah budidaya pertanian dengan menggunakan sistem tumpangsari yaitu suatu sistem yang mengaplikasikan praktik-praktik penanaman beragam biji-bijian sebagai bagian dari peladangan berpindah yang banyak meniru kompleksitas dan keragaman sistem vegetasi wilayah sub-tropis dan tropis. Model pertanian ini dilakukan dengan cara menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda dalam suatu areal atau petak tanah secara bersamaan. Adapun tujuan dari sistem tumpangsari ini adalah untuk melindungi tanah yang terkena sinar matahari secara langsung. Selain itu pula, sistem

ini juga bertujuan mengurangi peningkatan suhu tanah, menjaga erosi pada permukaan tanah, dan efisiensi penggunaan lahan dan mengurangi kerentanan tanah terhadap serangan hama dan serangga perusak.

Selain tumpangsari sebagai suatu praktik aplikatif kearifan lokal pada bidang pertanian ada juga kearifan lokal pada sistem pertanian yang mengutamakan pemanfaatan lahan tanpa merusak kontur tanah yaitu “Nyabuk Gunung”. Sistem ini lebih mengutamakan dan memaksimalkan kontur tanah terutama pada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki landscape berbukit. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem terasering. “Nyabuk Gunung” merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini merupakan suatu bentuk cara konservasi lahan dalam bercocok tanam dengan memanfaatkan garis kontur tanah.

Seperti kita ketahui bahwa perubahan temperatur secara global telah menyebabkan hujan badai ekstrem yang menimbulkan terjadinya banjir besar di beberapa lokasi di belahan bumi. Untuk itu sebagai upaya mengurangi kerusakan lahan pertanian yang diakibatkan oleh banjir, sistem terasering atau Nyabuk Gunung yang memanfaatkan *countur flowing* sangat tepat karena dengan sistem kearifan lokal ini dapat membantu untuk melindungi tanah dari erosi serta sebagai upaya melakukan infiltrasi air ke dalam lapisan tanah. Sistem ini juga dapat membantu didalam pengendalian dan pengendalian limpasan air yang meluap. Selain itu, sistem ini juga sebagai upaya mengurangi dampak erosi angin (*wind erosion*). Umumnya lahan pertanian yang berada pada wilayah perbukitan rentan juga terhadap erosi yang disebabkan oleh angin (*wind erosion*). Erosi ini memang jarang terjadi namun, erosi yang disebabkan tiupan angin ini akan mengambil bagian dalam hilangnya vegetasi dan partikel tanah. Tanda dari erosi angin termasuk deposisi dari partikel pasir sekeliling tanaman dan permukaan area yang terkena.

Aplikasi kearifan lokal memang sangat penting dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi. Namun, kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa sesungguhnya

paradigma pertanian modern saat ini telah bergeser ke arah peningkatan produktivitas. Pengembangan pertanian saat ini mengarah kepada upaya pengembangan teknologi dan sistem pemasaran. Mekanisme dan intensifikasi pertanian di satu sisi memiliki dampak optimalisasi pada proses produksi hingga pasca panen ditengah kondisi lahan pertanian yang semakin menyempit. Penggunaan teknologi juga berpengaruh terhadap menurunnya budaya kekrabatan atau kebersamaan masyarakat, sehingga secara tidak langsung memberikan dampak terhadap biaya pertanian (*cost agriculture*). Biaya pertanian yang dimaksudkan adalah pengeluaran untuk membeli pupuk dan obat-obatan yang semakin mahal serta pengeluaran ekstra untuk ongkos buruh tani yang juga semakin tinggi, serta sikap individualistis yang semakin kentara. Penggunaan obat-obatan ini juga karena keberadaan hama dan penyakit pada tanaman yang semakin beragam sebagai akibat dari perubahan iklim yang terjadi.

Terkait dengan kondisi ini, bagi masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok memiliki suatu sistem kearifan lokal sebagai upaya menjaga kekrabatan atau kebersamaan dan upaya menekan biaya pertanian yang semakin tinggi yaitu tradisi *Besiru*. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk perilaku sosial masyarakat suku Sasak yang terkait dengan masalah solidaritas antara sesama. Tradisi *Besiru* adalah kegiatan gotong royong bekerja di sawah, mulai dari mengelola tanah pertanian, menanam hingga melaksanakan panen secara bergilir tanpa upah. Di daerah Lombok lain, tradisi ini disebut juga dengan istilah betulung, betenak, atau betejak (*Asri,2015*).

Nilai-nilai kearifan lokal dalam komunitas Sasak yang tinggi dan sangat cocok diterapkan dalam kehidupan dewasa ini dan di masa depan, terdapat dalam ungkapan bahasa yang dipegang teguh dalam pergaulan, yang berwujud peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak. Dalam komunitas Sasak diistilahkan dengan *sesenggak*. Terkait dengan hal tersebut, sebagai salah satu contoh kelestarian tradisi besiru di pulau lombok adalah Dusun Sukamulia yang masih melaksanakan tradisi besiru/betenak/betulung. Hingga saat ini masyarakat

Dusun Sukamulia Desa Pohgading Timur Kabupaten Lombok Timur tetap melestarikan tradisi besiru dan tradisi-tradisi lainnya. Terkait dengan tradisi *Besiru*, masyarakat Dusun Sukamulia tetap melaksanakannya sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama (Asri, 2015).

Kehidupan manusia zaman dahulu memang sangat erat hubungannya dengan alam dan lingkungan karena sesungguhnya hidup dan kehidupan manusia di muka bumi memiliki keterkaitan dengan alam dan lingkungan. Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BAGI PRODUKSI KOMODITI PERTANIAN DI NTB

Perubahan iklim dalam dua dekade ini merupakan salah satu isu yang sangat menarik untuk terus dikaji dan dibahas formula antisipasinya karena perubahan iklim mempengaruhi semua aspek sendi kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah pada sektor pertanian. Sebagai salah satu unsur dalam faktor lingkungan, perubahan iklim telah membuat kerusakan dan perubahan terhadap dunia pertanian. Perubahan iklim yang ditandai oleh perubahan pola dan distribusi curah hujan, peningkatan suhu udara, dan peningkatan muka air laut berdampak langsung terhadap kerentanan pertanian di wilayah tertentu (*Badan Litbang Pertanian, 2012*) Perubahan iklim telah membuat sebaran hujan tidak merata bahkan curah hujan harian ekstrim dapat mencapai 234 mm/hari (*Farmanta, 2012*).

Perubahan iklim akan menyebabkan terjadinya pergeseran musim yang ditandai dengan semakin singkatnya musim hujan namun dengan curah hujan yang lebih besar yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap perubahan pola tanam. Perubahan iklim juga berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan populasi organisme pengganggu serta penyakit pada tanaman. Adanya perubahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Menurut data BPS NTB yang termuat pada data *NTB Dalam Angka 2017* jumlah produksi padi di NTB adalah 1.904.110 ton, mengalami penurunan bila dibandingkan dari data *NTB Dalam Angka 2014* sebesar 2.193.698 ton.

Menurunnya produktivitas pertanian yang disebabkan oleh perubahan iklim sangat dirasakan oleh para petani tidak terkecuali untuk pertanian hortikultura. Produksi Cabai di Kabupaten Lombok

Timur pada tahun 2013 mencapai 5.240 ton menurun menjadi 4.614 pada tahun 2016 (NTB Dalam Angka 2014 & 2017). Salah seorang petani di Desa Kota Raja Lombok Timur menceritakan bagaimana tanaman Cabai mengalami penurunan produktivitas dan kualitas.

“Banyak sekali tanaman Cabai saya yang mengalami pertumbuhan tidak normal karena pupuknya dimakan cacing serta juga untuk tahun ini tanaman Cabai kami mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh penyakit busuk buah” ujar Lalu Merry. Terkait hal ini menurut Maharani selaku Direktur Lombok Research Center menyatakan bahwa tingginya intensitas penanaman di daerah ini sehingga penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk dasar sangat tinggi. suhu yang hangat akibat adanya proses dekomposisi kotoran ayam menyebabkan cacing berkembang biak dengan sangat cepat ditambah lagi dengan kandungan protein yang ada dalam kotoran ayam yang masih tinggi, jadi ibarat makanan siap saji bagi cacing-cacing tersebut, lanjut Dr. Maharani memberikan penjelasan.

Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya fenomena La-Nina dimana pada kondisi ini terjadi penambahan (peningkatan) curah hujan baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau begitu pula pada kondisi sebaliknya atau disebut El-Nino. Pertanian pangan merupakan komoditas yang sangat rentan terhadap kondisi ini. Produksi Jagung di Kabupaten Lombok Timur yang cenderung stagnan dengan fakta luasan panen yang lebih besar menjadi contoh bahwa perubahan iklim telah berdampak terhadap produktivitas pertanian. Menurut data yang bersumber dari BPS NTB termuat dalam NTB Dalam Angka 2017 menyatakan bahwa produksi Jagung di Kabupaten Lombok Timur adalah 82.440 ton meningkat dari angka tahun sebelumnya 82.173 ton (NTB Dalam Angka 2014). Peningkatan ini tidaklah signifikan bila kita lihat dari data luas areal panen yaitu 15.658 Ha (NTB Dalam Angka 2017) yang lebih luas dibandingkan dengan 13.830 Ha (NTB Dalam Angka 2014).

Dampak yang terjadi pada sektor pertanian akibat dari perubahan iklim harus segera diantisipasi oleh para pemangku

kebijakan terutama pada tingkat lokal atau daerah. Telah banyak kajian dan penelitian yang dihasilkan dari berbagai sumber terkait dengan upaya adaptasi perubahan iklim pada sektor pertanian terutama terhadap upaya mempertahankan tingkat produktivitas pertanian. Terkait dengan hal itu maka, pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah harus mulai untuk mengubah persepsi petani terhadap fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini agar terbangun pola persepsi yang seragam. Keterbatasan informasi yang diperoleh para petani telah menyebabkan petani memiliki persepsi yang berbeda terhadap perubahan iklim. Informasi mengenai perubahan iklim mungkin didapatkan petani hanya melalui media televisi, radio, dan sesama petani saja. Alternatifnya adalah melalui updating pengetahuan para penyuluh pertanian di lapangan. Penguatan kapasitas para penyuluh sangat perlu dilakukan karena berbicara pertanian bukan saja terkait dengan pupuk dan obat-obatan saja melainkan semua aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus mulai menyusun langkah-langkah antisipatif terkait dengan pergeseran musim yang terjadi. Musim kemarau yang berkepanjangan akan meningkatkan resiko gagal panen, kerusakan hasil panen, dan penurunan produktivitas panen. Strategi adaptasi harus segera dilaksanakan oleh Pemkab Lotim apabila ingin menyelamatkan produktivitas hasil pertaniannya terkait dengan pengaruh perubahan iklim. Proses adaptasi dapat dilakukan dengan cara pemerintah kabupaten Lombok Timur memberikan berbagai informasi dan pelatihan kepada para petani yang mencakup usaha-usaha petani untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan sosial yang terjadi secara temporal akibat dari pengaruh perubahan iklim. Pengembangan pola adaptasi seperti mengubah pola tanam dapat menjadi salah satu alternatif. Hal ini karena sistem pola tanam yang dijalankan oleh para petani merupakan sistem pola sederhana yang merupakan warisan turun-temurun dari petani-petani sebelumnya.

Strategi adaptasi yang dilakukan dibagi menjadi dua.

Pertama adalah yang bersifat struktural dan kedua bersifat non-struktural. Strategi yang bersifat struktural adalah kegiatan meningkatkan ketahanan sistem produksi pangan dari dampak perubahan iklim melalui upaya perbaikan kondisi fisik, seperti pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, pembangunan dam, waduk, dan embung. Strategi yang bersifat non-struktural adalah melalui pengembangan teknologi budidaya yang lebih toleran terhadap cekaman iklim, penguatan kelembagaan dan peraturan, pemberdayaan petani dalam memanfaatkan informasi iklim untuk mengatasi dan mengantisipasi kejadian iklim ekstrim yang semakin meningkat frekuensinya.

MENGURANGI DAMPAK KEKERINGAN DI NTB

Memasuki musim kemarau tahun 2019 ini. Kita diberikan data yang cukup mengagetkan. Data terbaru yang dirilis oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Aksanul Khalik di laman Lombok Post Kamis, 11 juli 2019 penduduk yang terdampak kekeringan mencapai 674.017 jiwa dengan 185.708 kepala keluarga (KK). Angka itu akan terus bertambah. Dikarenakan kita baru mengawali musim kemarau pada tahun ini. Berdasarkan rilis dari BMKG puncak dari musim kemarau pada tahun ini yaitu bulan September. Artinya akan masih bertambah lagi masyarakat yang akan terkena dampak sampai dua bulan kedepan.

Jumlah desa yang terdampak saat ini yaitu 298 Desa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu sudah mulai mengirim bantuan air bersih. Bahkan ada beberapa daerah yang baru melakukan identifikasi dampak kekeringan. Sehingga dalam hati penulis mengatakan, kapan akan aksi, jika identifikasi saja baru dimulai. Menunggu masyarakat menjerit?. Jika melihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Langkah taktis yang dilakukan oleh BPBD adalah dengan melakukan



pendistribusian air bersih. Program ini merupakan program rutin dan terus berulang. Bahkan tidak hanya itu, beberapa OPD lainnya juga melakukan program yang sama seperti dinas social dan PDAM.

Anggaran yang digelontorkan dalam program pendistribusian air bersih ini akan terus bertambah tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat dan daerah yang terdampak pasti akan bertambah. Tahunn ini saja, menurut Kalak BPBD



jumlah dana tanggap darurat yang dikeluarkan rata rata Rp3,5 milyar per kabupaten. Dan dana ini kemungkinan akan bertambah. Pertanyaannya, apakah kita akan terus selalu mengulang program dan membiarkan uang daerah menguap dibawa panasnya sinar matahari musim kemarau ini?. Banyak yang mulai berteriak. Bahkan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB H. Nurdin Ranggabarani melalui Lombok Post 10 Juli 2019 mengkritisi pola penanganan kekeringan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dikarenakan sampai saat ini masih menggunakan pola lama “Ada kekeringan lalu dropping air, ya

masak mau begitu terus”.

Kalau dilihat dari up date data yang dimiliki oleh BPBD seharusnya akan diikuti oleh model penanganan dampak kekeringan yang *up date* pula. Jika kita kalkulasikan jumlah anggaran tiap tahun untuk mengatasi dampak kekeringan ini cukup fantastis. Dana distribusi air bersih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten lumayan besar. Dana inipun dikeluarkan bisa dari dua ataupun lebih OPD. Seperti BPBD, Dinas Sosial, PDAM bahkan dibeberapa daerah seperti Kabupaten

Lombok Timur pada tahun 2018 yang lalu semua Dinas diberikan jatah untuk melakukan pendistribusian air bersih ini.

Program yang agak berkelanjutan baik dari jumlah dananya maupun dari teknisnya yang sudah dilakukan, Walaupun masih banyak kendala teknis dan non teknis yaitu pembuatan sumur bor. Pembuatan sumur bor ini dilakukan pun lebih dari dua OPD bahkan ada yang langsung dari kementerian. Seperti Dinas Pertanian, Dinas ESDM, Kemenetrian Desa dan dari Kementerian PU yang disalurkan melalui Dinas PU di Provinsi, Kabupaten maupun melalui BWS.

Yang lebih fantastis lagi baik dari segi kebijakan/program maupun dari segi pendanaan yaitu pembuatan bendungan. Masyarakat terlalu banyak berharap dari program bendungan ini. Bahkan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini, semua elemen masyarakat mendorong dipercepatnya pembangunan bendungan baru yaitu bendungan mujur.

Masyarakat Lombok Tengah sangat memberikan ekspektasi yang tinggi dengan terbangunnya bendungan Mujur ini. Semua dampak kekeringan yang ada di bagian Selatan Lombok Tengah akan teratasi dengan terbangunnya bendungan ini. Tetapi kita tidak pernah sadar dan mau belajar dari pengalaman yang ada. Sebagai gambaran dari penulis, satu-satunya Kabupaten di dunia ini yang memiliki dua bendungan besar dan nanti jika bendungan Mujur terbangun akan menjadi 3 bendungan besar hanya Kabupaten Lombok Tengah. Apakah kita pernah berhitung kalkulasinya?

Sebagai contoh. Pada tahun 2011 yang lalu, masyarakat bagian Selatan Kabupaten Lombok Timur sangat bersuka cita akan terlaksananya pembangunan Bendungan Pandan Duri. Kita tidak pernah berhitung, bahwa bendungan Pandan Duri dengan luas hampir 500 Ha dan hanya mampu menampung sekitar 10 juta meter kubik air. Artinya bendungan Pandan Duri hanya mampu mengairi sekitar 5000 hektar lahan sawah. Jika kita berhitung, setengah dari Desa Pemongkong saja tidak bisa diairi oleh bendungan Pandan Duri ini.

Ini terbukti dengan jumlah desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Timur pada awal musim kemarau ini yaitu sekitar 18 desa di lima kecamatan, dan ini berpotensi bertambah

menjadi dua kali lipatnya.

Bendungan Pandan Duri menenggelamkan sekitar 500 hektar sawah yang nota bene sawah kelas satu. Dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk membangun bendungan ini sekitar Rp500 Milyar. Jika kita jumlahkan dengan harga lahan, maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp1 Triliun. Untuk mengembalikan anggaran tersebut dari hasil pertanian yang dapat diairi oleh bendungan ini maka kita akan bertani selama kurang lebih 50 tahun. Model pembangunan bendungan merupakan model sistem irigasi yang dibawa oleh pemerintah colonial Belanda. Bendungan memang cocok jika diterapkan di Eropa apalagi di negara Belanda dikarenakan model geografis dan lainnya.

Masyarakat Lombok memiliki keunikan dan pengetahuan yang luar biasa dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan hal ini mulai kita lupakan. Kita malah terpana dengan model yang dibawa oleh kolonial ke daerah kita. Padahal orang-orang Belanda banyak belajar kepada masyarakat Lombok dalam hal mengatasi dampak kekeringan ini. Mudah-mudahan tulisan ini akan memberikan kita kesadaran bahwa nenek moyang kita orang Lombok adalah orang-orang yang cerdas dan tangguh dalam mengatasi dampak kekeringan. Sadarkah kita pengetahuan ini sudah mulai kita tinggalkan?.

Masyarakat Suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, khususnya Lombok bagian Selatan yang memang terkena dampak langsung dari kekeringan ini memiliki pengetahuan lokal yang kita namakan "**Embung**". Embung merupakan buah dari pengetahuan lokal yang langsung dipraktikkan dan memiliki fungsi yang beragam. Selain sebagai penampung air, embung juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan peternakan dengan pertanian. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali embung-embung yang mulai hilang. Menurut data yang dimiliki oleh Lombok Research Center. Sejak tahun 2010 sampai sekarang ini. Jumlah embung di pulau Lombok berkurang lebih dari 50%-nya. Tahun 2010 yang lalu jumlah embung yang ada sebanyak 27.482 menjadi 12.906 embung.

Embung di Lombok memiliki kelembagaan berbasis keluarga karena awal pembuatannya berasal dari satu keluarga di

masa lalu. Karena telah diturunkan ke anak cucu, maka sekarang dikelola bersama secara gotong royong oleh keluarga besar. Hal ini berbeda kelembagaannya bila membangun embung untuk dipakai bersama pada lokasi yang disepakati bersama.

Saat memasuki musim kemarau ini, embung-embung membantu petani menyediakan air untuk padi sawah, palawija, tembakau dan tanaman lain. Air tersebut berasal dari hujan dan air permukaan dari lahan yang lebih tinggi. Kearifan lokal petani menanam pinggir embung dengan bambu untuk memperkuat pinggir dan menekan evaporasi. Namun, akhir-akhir ini embung hanya dijadikan sebagai proyek yang tidak pernah melakukan kajian model, lokasi, bentuk dan kemanfaatannya. Pemerintah daerah sebatas proyeknya terlaksana tanpa melihat keberlanjutannya.

Jika dilihat dari sisi keilmuan, embung merupakan cara untuk memanen air hujan kemudian disimpan dan digunakan jika diperlukan. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Embung atau tandon air adalah waduk berukuran mikro di lahan pertanian (*small farm reservoir*) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan diwaktu musim hujan dan menggunakannya jika diperlukan oleh tanaman pada waktu musim kemarau. Teknik pemanenan air (*water harvesting*) demikian cocok bagi ekosistem tadah hujan dengan intensitas dan distribusi curah hujan tidak pasti (*eratic*). Teknik panen air dan aliran permukaan ini, selain dapat meningkatkan indeks panen juga dapat mengurangi resiko banjir pada musim hujan. Yang menjadi pekerjaan kita ke depan adalah bagaimana caranya agar air hujan yang telah ditampung dan disimpan ini mampu bertahan dari hilang dalam bentuk evaporasi maupun perembesan. Sehingga disaat dibutuhkan oleh masyarakat air yang ada cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Syukur-syukur mampu digunakan untuk kegiatan pertanian.

Saat ini kita sudah diwarisi embung oleh nenek moyang kita. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memodifikasinya agar mampu bertahan. Dikarenakan waktu musim kemarau yang

makin panjang dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Sehingga pelestarian embung ini tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban proyek saja. Begitupun juga dengan model program yang lain dalam mengatasi dampak kekeringan ini. Jangan hanya dijadikan sebuah proyek yang berkelanjutan.



Anak merupakan generasi penerus yang akan menjadi masa depan bangsa sehingga, sebagai orang tua kita berkewajiban untuk mempersiapkan dan mengarahkan mereka sejak dini agar mereka dapat tumbuh dan berkembang, sehat, dan sejahtera yang akan menjadi sumberdaya yang kuat untuk melanjutkan cita-cita generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak. Dalam konstitusi kita (UUD 1945) juga dijelaskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Berbicara tentang diskriminasi hal ini sangat rentan terjadi pada anak-anak, terbukti dengan masih banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak terutama yang terkait dalam hal sebagai pekerja anak. Secara umum pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang

membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (Suyanto, 2003:3). Didalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang berada di dalam kandungan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah penghasil embakau terbesar di Indonesia selain Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tiga Provinsi di luar Jawa Barat merupakan penghasil 90% tembakau di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB pada 2015 menyatakan luas lahan tembakau baik itu tembakau rakyat dan tembakau Virginia adalah seluas 23.760 hektar dengan produksi mencapai 34.449 ton. Khusus untuk NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah merupakan sentra tanaman tembakau. Pada sektor ini juga perputaran uang yang beredar sangat tinggi hingga triliunan rupiah mulai dari produksi hingga pasca panen. Tidak heran memang apabila pemerintah menggenjot produksi sektor ini karena melihat keuntungan dari PAD yang diperoleh serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tembakau ini tidak saja menyasar kepada tenaga kerja dewasa namun, juga pada kenyataannya masih terdapat adanya pelibatan anak-anak sebagai pekerja atau buruh. Pelibatan anak-anak sebagai pekerja pada sektor ini tidak lain dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi serta sosial budaya yang tumbuh di masyarakat. Terkadang anak-anak “dipaksa atau terpaksa” ikut melakukan pekerjaan yang dari beberapa hasil penelitian dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Human Right Watch (HRW) Indonesia dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Panen Dengan Darah Anak, Bahaya Pekerja Anak dalam Pertanian Tembakau di Indonesia” pada tahun 2016 di 4 daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia termasuk didalamnya adalah Kabupaten Lombok Timur menyatakan bahwa pelibatan anak pada kegiatan sektor pertanian tembakau sangat membahayakan kesehatan pekerja anak. Mereka akan terpapar nikotin, pestisida beracun, panas eskترم, dan bahaya lain. Pekerjaan ini berdampak langgeng

bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Selain dari sisi kesehatan yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak-anak, kasus pelibatan pekerja anak juga sangat merugikan karena sesungguhnya upah yang mereka terima sangat tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan. Jam kerja yang melebihi jam kerja anak-anak seperti yang disyaratkan UU ketenagakerjaan yaitu 3 jam dan tidak mengganggu jam sekolah juga sering dilanggar. Anak-anak yang bekerja ini terkadang harus membolos sekolah hanya untuk bekerja. Dalam pernyataannya yang disadur dari media online (<http://www.suarantb.com/news/2017/05/12/238199/Tertinggi.di.NTB,Pekerja.Anak.di.Lotim>),

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur menyatakan bahwa terjadi kenaikan jumlah pekerja anak dari 483 orang menjadi 520 orang. Dari data itu yang sudah jelas *byname by address*. Namun, pada kenyataan di lapangan angka tersebut sebenarnya lebih dari itu karena menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur menyatakan bahwa total jumlah pekerja anak tercatat sebanyak 1.077 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari dua jenis pendataan yaitu pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial dengan jumlah 537 orang dan di luar program PKH atau pendataan kabupaten di luar sasaran PKH sebanyak 540 orang.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sudah harus diterapkan didalam setiap lini kehidupan karena sesungguhnya dengan melindungi hak-hak mereka secara tidak langsung kita juga melindungi masa depan mereka. Pemerintah sudah harus menegakkan peraturan yang diamanatkan Undang-undang. Selama ini kasus pekerja anak terutama dalam sektor pertanian tembakau seolah-olah terjadi pembiaran. Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah harus segera dievaluasi karena kebijakan yang selama ini lebih diartikan sebagai tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan kepada keputusan untuk melakukan sesuatu. Padahal kebijakan (*policy*) pada hakikatnya terdiri dari tindakan yang saling berkait

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan bukan sekedar merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Menyadari kebijakan harus bersangkut paut dengan apa yang nyata dibutuhkan dalam masyarakatnya, bukan sekedar keinginan individu maupun kelompok tertentu.

Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Karena dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial.

Harapan Kami (Karya Sari Ajani)

Menjelang Malam, Harusnya waktu kami terlelap, Harusnya waktu kami belajar

Angin malam, Begitu menusuk tulang kami, Begitu dingin di kulit kami

Tangisan seorang anak, Meminta kasih sayang, Ingin dipedulikan Rintihan di kala malam, Berharap dapat belajar, Berat beban kami

Harus dilalui tiap hari, Walau lelah tubuh ini, Kami harus terus berlari

Tak jarang, Kami ingin menangis

Tak jarang, Kami ingin bermain

Sekolah..., Kami ingin sekolah, Belajar..., Tak ada waktu memikirkannya

DIGITAL MARKETING DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITI PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan bagi penggerak perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini dapat dilihat dari potensi sumberdaya lahan yang dimiliki oleh NTB untuk sektor pertanian masih cukup besar. Menurut data dari BAPPEDA NTB, Provinsi NTB memiliki keunggulan komparatif berupa lahan pertanian yang cukup luas (1.673.476 hektar), yaitu lebih dari 84 % luas daratan NTB (2.010.249 hektar). Tingkat kepemilikan lahan yang cukup besar di lahan kering (1,75-2,0 hektar per keluarga) dibandingkan dengan lahan basah (0,25 hektar per keluarga), diversitas komoditas tanaman dan ternak yang melimpah merupakan modal yang cukup besar untuk mengentaskan kemiskinan melalui upaya peningkatan produksi hasil pertanian.

Keunggulan komparatif lainnya yang dimiliki wilayah lahan pertanian di NTB adalah kemampuan petani dalam mengintegrasikan tanaman pohon dan ternak, yang telah menjadi *indigenous knowledge* secara turun temurun. Hal ini belum banyak disadari oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga potensinya belum dapat dikembangkan secara maksimal. Jika keunggulan ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, tidak mustahil akan dapat dijadikan alat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas lahan dan lingkungan di wilayah lahan kering (Tejowulan, 2002).

Namun berdasarkan data yang ada bahwa regenerasi di sector pertanian masih lambat. Hal ini dilihat dari semakin berkurangnya minat pemuda-pemuda terjun langsung ke bidang pertanian. Pertanian masih dianggap sebagai sektor yang tidak menjanjikan baik dari peningkatan ekonomi maupun dari status sosial. Ditambah dengan semakin fluktuatifnya harga komoditi pertanian di tingkat konsumen. Sebagai contoh tiga bulan yang lalu harga komoditi Cabai dipasaran sangat menggiurkan, petani merasa sangat diuntungkan karena harganya sangat bagus berkisar antara 30-50 ribu per kg. namun, apa yang terjadi saat ini. Harga komoditi Cabai di pasaran dan ditingkat konsumen sangat rendah yakni 6 sampai 7 ribu rupiah per kg. hal ini tentu sangat jauh dari biaya yang dikeluarkan petani untuk produksinya. Selain harga

yang sangat fluktuatif. Kelemahan komoditi pertanian juga pada ketahanan komoditinya yang cepat sekali rusak. Komoditi pertanian akan membutuhkan teknologi yang mahal untuk mengatasi ketahanannya. Untuk skala petani kecil di Indonesia akan sangat kesulitan mempunyai teknologi penyimpanan. Sehingga jika tidak cepat dijual maka komoditi hasil pertanian akan rusak dan tidak akan memiliki nilai lagi.

Melihat permasalahan itu, sehingga banyak pemuda-pemuda generasi bangsa yang enggan menjadi petani. Ditambah lagi dengan kebijakan yang setengah hati oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah terobosan pemasaran langsung dan dapat diakses oleh banyak konsumen sehingga, persaingan harga akan dapat dinikmati oleh petani. Salah satu strategi pemasaran yang sedang banyak digandrungi saat ini yaitu digital marketing atau online. Menurut Chen-Ling, & Lie, dalam jurnal *Journal of American Academy of Business* (2006, p296), *digital marketing* adalah proses memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan dengan menggunakan media *website*. Promosi, Iklan, transaksi dan pembayaran dapat dilakukan melalui halaman *web*. Pengguna *internet marketing* dapat dengan mudah mengakses informasi dimana saja dengan komputer yang terhubung ke *internet*.

Menciptakan perubahan perilaku yang mendasar dalam bisnis dan konsumen serupa dengan yang terkait dengan pengenalan mobile dan telepon yang mengurangi kebutuhan untuk pendekatan *channel e-marketing* menggunakan *internet* sebagai *platform* yang memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, mengurangi biaya transaksi, dan memungkinkan pelanggan untuk berpindah kapan dan dimana saja tanpa mengkhawatirkan tempat dan waktu.

Secara nasional, marketing secara online ini sudah banyak sekali. Dikalangan konsumen sudah banyak dikenal seperti oxi, bukalapak, tokopedia dan lain sebagainya. Di tataran lokal, pemerintah daerah juga sudah mulai memperkenalkan penjualan atau marketing online ini untuk tataran kelompok pengrajin dan UKM yang ada di Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perindustrian. Harapannya ke depan semua kelompok pengrajin dan UKM di NTB

mampu memasarkan produknya melalui media online ini. Melihat perkembangan teknologi dibidang penjualan online, Lombok Research Center (LRC) juga membuat portal UKM Mart melalui websitenya. Hal ini diharapkan agar mampu memicu ketertarikan para kelompok pemuda, kelompok pengerajin, dan kelompok tani yang ada untuk mampu memasarkan produknya melalui portal-portal yang sudah ada.

Dari 10 kelompok muda tani binaan LRC, baru 3 kelompok yang sudah menggunakan digital marketing untuk memasarkan prodak pertaniannya. Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi serta jaringan internet di Pulau Lombok menjadi alasan utama sehingga, hanya 3 kelompok yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran produk mereka. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi kendala pemasaran di era industri 4.0 yang berbasis pada teknologi informasi.

KEBIJAKAN PERTANIAN DALAM POLITIK LOKAL NTB

Pada bulan Oktober ini masa bakti M. Zainul Majdi atau lebih akrab dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) dan Muhammad Amin selaku Gubernur/Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 tepat tinggal setahun lagi. Masa bakti pemerintahan TGB-Amin akan berakhir dan tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa yang akan menjadi tantangan bagi para suksesor mereka ke depannya. Tidak dapat dipungkiri memang sudah banyak capaian program pembangunan yang menunjukkan hasil positif. Keberhasilan pembangunan NTB dapat terlihat dalam tiga tahun belakangan ini dimana tingkat pertumbuhan ekonomi NTB merupakan yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2015 angka pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 9,2 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 5,8 persen namun, masih tetap di atas angka pertumbuhan ekonomi Nasional (*BPS NTB, 2016*). Keberhasilan kepemimpinan TGB mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan ditetapkannya NTB sebagai salah satu daerah yang masuk dalam percepatan proyek strategis nasional terutama terkait sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 24 persen. Besarnya sumbangsih dari sektor pertanian inilah yang menjadikan Provinsi

NTB sebagai daerah penopang swasembada pangan nasional.

Terkait dengan masa kepemimpinan TGB yang akan segera berakhir, menarik apabila kita mengetahui sejauh mana visi misi para bakal calon Gubernur NTB 2018-2023 terutama yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi menarik mengingat 54 persen dari total jumlah penduduk NTB (4.896.162 jiwa) menggantungkan hidup dari sektor pertanian ditambah lagi dengan kondisi angka kemiskinan di NTB yang menurut data BPS pada bulan September 2016 menyatakan bahwa penduduk miskin NTB sebesar 16,02 persen atau 786,58 orang dimana penduduk NTB yang sangat rentan akan kemiskinan adalah yang bermatapencaharian sebagai petani karena sektor pertanian di NTB merupakan usaha yang tidak ada kepastiannya, hal ini karena sistem pertanian NTB lebih banyak bertumpu pada pertanian dengan mengandalkan cuaca dan alam.

Visi misi yang disodorkan kepada masyarakat NTB oleh para bakal calon Gubernur NTB yang akan datang tentunya tidaklah gampang untuk dijabarkan dalam bentuk kebijakan absolut karena pada dasarnya formulasi kebijakan didasarkan pada berbagai pertimbangan baik politik, sosial-ekonomi, institusi, lingkungan, sumber daya, tingkat kelayakan, di samping faktor-faktor teknis. Dari berbagai pertimbangan tersebut yang akan menghambat pembangunan pertanian di NTB tentunya berasal dari pertimbangan politik. Membuat kebijakan pertanian kerap kali sulit melepaskan diri dari berbagai kontroversi.

Kentalnya warna politik dalam berbagai kebijakan tampaknya menyulitkan perbaikan sektor potensial perekonomian daerah ini.

Calon Gubernur NTB yang akan datang harus tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan pertanian di daerah ini walaupun dalam beberapa tahun belakangan ini sektor pertanian mampu memberikan kontribusi terbesar dalam angka pertumbuhan ekonomi NTB sehingga menyebabkan Gubernur NTB yang akan datang menganggap sektor pertanian mampu bergulir dengan sendirinya. Apabila hal ini terjadi maka, penyusutan areal pertanian di NTB akan terus terjadi. Hal ini sudah terbukti dengan terus menurunnya luas areal pertanian di NTB dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagai salah satu contoh adalah pengurangan luas areal panen padi sawah dan padi ladang di NTB dimana data BPS menyebutkan pada tahun 2015 luas areal panen 433.712 hektar turun menjadi 371.604 hektar pada tahun 2016 (*NTB Dalam Angka, 2017*). Secara statistik dapat dilihat bahwa lahan pertanian mengalami penyusutan daritahun ke tahun akibat alih fungsi lahan produktif untuk pembangunan lokasi industri dan pemukiman.

Pemimpin NTB yang akan datang harus membawa “*mazhab*” pembangunan pertanian yang menempatkan petani sebagai subjek atau pelaku utama dimana pembangunan pertanian yang dilaksanakan menekankan kepada peran petani didalam mengelola sumber daya lokal yang dimilikinya. Peningkatan produksi yang selama ini menjadi kebijakan TGB-AMIN sah-sah saja namun terkadang melupakan sektor pertanian dalam konteks lokal. Membuka akses kepada petani gurem dan tunakisma adalah prioritas utama untuk mencegah kesenjangan dan polarisasi di pedesaan. Semangat yang dibangun adalah komunalisme beranggotakan rumah tangga petani, bukan mereka yang bergabung dalam kelompok-kelompok pertanian yang “terkesan” siluman -proyek ada, kelompok ada.

Kebijakan pemimpin NTB yang akan datang haruslah yang mendukung terciptanya demokrasi di tingkat lokal yaitu dengan memberikan ruang sepenuhnya kepada petani memilih komoditas pertanian yang akan diproduksi berarti mendorong terciptanya

diversifikasi produk pertanian. Tidak hanya itu, kearifan lokal sebagai institusi lokal yang pernah ada dan dimiliki oleh petani akan kembali hidup sebagai “arena baru” bagi para petani. Inilah wujud konkret pemimpin NTB yang akan datang yang memberikan ruang kontribusi pertanian dalam mendorong tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal.

Mengacu pada salah satu butir Nawacita 2015-2019 Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani yang bertumpu pada kemampuan dan kekuatan untuk mengatur pangan secara mandiri. Untuk itu pemimpin NTB yang akan datang harus memperhatikan potensi sumberdaya pertanian dan karakteristik setiap daerah di NTB, basis strategi dasar membangun pertanian haruslah fokus pada komoditas pangan strategis atau unggulan dan fokus pada wilayah/kawasan yang memiliki keunggulan komparatif. Sehingga strategi, kebijakan, skala prioritas, dan tahapan membangun pertanian NTB tentunya tidak sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Kedaulatan pangan di NTB melalui pembangunan pertanian dimungkinkan akan terwujud apabila petani diberikan ruang untuk mendefinisikan posisinya dan menentukan komoditas produksinya agar tidak seperti saat ini yang fokus pengembangan pertanian hanya pada peningkatan produksi Padi dan Jagung saja.

Gubernur NTB yang akan datang melalui perangkat daerah serta kebijakan yang dibuat harus mencerminkan sebagai fasilitator yang memberikan ruang akses pada teknologi, modal, dan informasi kepada petani. Bahkan dapat merumuskan secara bersama-sama definisi pasar yang menciptakan keadilan bagi petani kita. Seorang Gubernur NTB yang akan datang harus mampu menjawab kekhawatiran Mabhul Haq (1983) tentang tujuh dosa perencanaan pembangunan terutama pada sektor pertanian yaitu permainan angka, pengendalian yang berlebihan, investasi yang menggiurkan, pendekatan yang dianggap benar, perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah, sumber daya manusia yang terabaikan, serta pertumbuhan tanpa keadilan.

Pada akhirnya para bakal calon Gubernur NTB yang akan datang diharapkan memberikan perhatian yang ekstra terhadap

pembangunan sektor pertanian NTB. Untuk mewujudkan visi misi mereka terutama yang terkait dengan pertanian, mengutip pernyataan Sofyan Sjaf (2017) mereka dapat melakukannya dengan berbagai macam cara seperti; cara pertama, konsolidasi kaum tani melalui organisasi tani yang memiliki basis akar rumput, bukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang dibentuk karena proyek. Kedua, memastikan ketersediaan alat-alat produksi yang dibutuhkan kaum tani, seperti teknologi, lahan, modal, dan inovasi. Ketiga, memperkuat kapasitas serta kelembagaan (hulu-hilir) kaum tani dan organisasi tani. Keempat, membangun konsorsium sebagai media rembuk kaum tani-pemerintah-para pihak untuk mengawal agenda kebutuhan kaum tani dan organisasi petani mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Kelima, merevisi regulasi yang menghambat tumbuh dan berkembangnya aktivitas kaum tani dan organisasi tani di Nusa Tenggara Barat.

MENDORONG KEMANDIRIAN PETANI

Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah penopang swasembada pangan nasional. Penetapan ini karena NTB merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi yaitu 9,2 persen pada tahun 2015 namun pada 2016 turun 5,8 persen tapi masih tetap di atas pertumbuhan rata-rata nasional yaitu 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi di NTB sebagian besarnya disumbangkan dari sektor pertanian yang mencapai 24,14 persen (Badan Pusat Statistik, 2016). Besarnya sumbangsih dari sektor pertanian inilah yang menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah penopang swasembada pangan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata pertumbuhan nasional membuat NTB juga ke dalam proyek strategis nasional yang di dalamnya mencakup percepatan pada sektor pertanian. Hal ini didasarkan atas pertumbuhan ekonomi yang terjadi dimana salah satunya didukung oleh sektor pertanian. Namun, menjadi pertanyaan apakah sumbangsih sektor pertanian yang tergolong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB berkorelasi terhadap kesejahteraan para petani dan ketahanan pangan penduduknya?. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB dalam rilisnya pada tahun 2016 menyatakan penduduk NTB yang paling rentan dengan kemiskinan adalah yang hidup dari sektor pertanian. Bahkan penduduk yang matapencaharian dari bertani, adalah masuk dalam kelompok rentan jatuh miskin kembali. Hal ini menjadi tantangan, mengingat 54% dari total penduduk NTB menggantungkan hidup

dari sektor pertanian. Data BPS pada bulan September 2015 juga menyatakan bahwa penduduk miskin absolut (sangat miskin) NTB sebesar 6,01 persen atau 291.031 orang. Menurut Kepala BPS NTB, Mahyudin bahwa penduduk NTB yang sangat rentan akan kemiskinan adalah yang bermatapencaharian sebagai petani karena sektor pertanian di NTB merupakan usaha yang tidak ada kepastiannya, hal ini karena sistem pertanian NTB lebih banyak bertumpu pada pertanian dengan mengandalkan cuaca dan alam.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Untuk sektor pertanian dalam arti luas, ketahanan pangan berarti tersedianya kebutuhan dasar baik itu dalam hal bibit, pupuk, dan obat-obatan. Kemudian petani memiliki akses yang mudah untuk memperoleh semua kebutuhannya tersebut serta petani mampu memanfaatkannya untuk diaplikasikan dalam kegiatan bercocok tanam.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sebagian besarnya berbasis pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai modal untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan dalam arti yang luas. Namun, hingga saat ini pembangunan ekonomi yang mendasar atau berbasis pertanian belum tergarap dengan tuntas, optimal, terpadu dan menyeluruh.

Mengacu pada Nawacita 2015-2019 agenda ke-7 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik, di antaranya menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Mensejahterakan Petani yang bertumpu pada kemampuan dan kekuatan untuk mengatur pangan secara mandiri. Untuk itu, dengan memperhatikan potensi sumberdaya pertanian dan karakteristik setiap daerah di NTB, basis strategi dasar membangun pertanian

haruslah fokus pada komoditas pangan strategis atau unggulan dan fokus pada wilayah/kawasan yang memiliki keunggulan komparatif. Sehingga, strategi, kebijakan, skala prioritas dan tahapan membangun pertanian NTB tentunya tidak sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

Masalah klasik yang selalu menimpa petani ketika musim tanam tiba adalah terkait dengan ketersediaan bibit atau benih. Setiap petani pasti membutuhkan benih untuk memulai penanaman hingga proses pemanenan. Akan tetapi terkadang ketersediaan benih di Indonesia pada umumnya dan NTB khususnya masih sering kekurangan atau mutus. Banyak petani yang mengeluhkan masalah kelangkaan bibit dan berharap pemerintah dapat segera menangani dan memenuhi ketersediaan. Akibat kelangkaan bibit biasanya akan menyebabkan harga dari bibit tersebut melonjak tinggi. Hal tersebut pastinya akan menyengsarakan petani, terlebih lagi apabila petani yang minim modal. Untuk itu, sudah waktunya Pemprov NTB yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada melakukan terobosan ataupun inovasi yang mampu menggerakkan potensi lokal yang dimiliki untuk mewujudkan kedaulatan pangan secara mandiri. Salah satu contohnya adalah mendorong para petani memiliki kemandirian bibit.

Permasalahan lainnya yang juga merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya kedaulatan pangan terkait dengan sektor pertanian dalam arti luas adalah mengenai ketersediaan pupuk yang juga merupakan persoalan klasik yang selalu dialami oleh para petani. Pupuk adalah faktor pendukung jalannya proses pertanian. Masalah pupuk ini sama halnya dengan masalah benih dan lebih mengarah kepada kelangkaan dan harga yang terlalu tinggi dan serta beredarnya pupuk-pupuk ilegal yang pastinya sangat mahal. Tidak mungkin seorang petani hanya mengandalkan pupuk kandang, pastinya juga perlu didukung dengan pupuk kimia seperti urea, KCL, Phonska dan sebagainya. Tapi bagaimana jika pupuk-pupuk tersebut langka? Pastinya akan berdampak buruk terhadap petani.

Selain itu pula, pupuk bersubsidi yang beredar juga dijual

diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan terkadang juga dijual kepada pembeli yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Persoalan ini juga ditambah dengan beredarnya pupuk palsu dikalangan petani yang ujungnya akan berdampak terhadap produksi yang dihasilkan. Mulai tahun 2017 ini pemerintah berencana mencabut subsidi pupuk dan kebijakan ini akan menjadi persoalan bahkan menimbulkan gejolak di masyarakat karena dengan dicabutnya subsidi pupuk maka, tidak ada jaminan harga oleh karena hukum pasar yang pasti berlaku.

Selain dari persoalan pupuk, penciptaan ketahanan pangan dalam sektor pertanian juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan pertanian yang setiap tahunnya mengalami penurunan dalam luasannya. Akibatnya adalah impor bahan pangan masih terjadi karena ketersediaan bahan pangan yang ada tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan bahan pangan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Dalam hal ini pemerintah perlu mengambil tindakan dengan cara memproteksi kawasan atau daerah yang semala ini terkenal sebagai kawasan pertanian. Wujud nyata yang dapat dilakukan adalah melalui pembatasan izin pembangunan yang tidak memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian. Selama ini alih fungsi lahan pertanian di beberapa daerah di NTB masih terjadi sehingga, menyebabkan semakin berkurangnya luas areal pertanian yang berganti dengan perumahan, pertokoan, dan beberapa peruntukan lainnya yang tidak memiliki keterkaitan dengan pertanian.

Mewujudkan ketahanan pangan terutama dalam sektor pertanian dalam arti luas memang harus dilakukan bersama-sama karena, untuk melakukannya dibutuhkan peranserta semua pihak baik itu dari pemerintah, petani, dan semua stakeholder terkait. Penetapan NTB sebagai daerah penopang swasembada pangan nasional harus menjadi stimulus yang positif untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan seperti yang terkandung dalam agenda ke-7 Nawacita 2015-2019 dan RPJP Nusa Tenggara Barat 2005-2025.

MENGAPA PETANI HARUS MANDIRI PADA BENIH?

Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, ada sekitar 15 tempat usaha pembibitan. Baik pembibitan sayur mayur, buah-buahan maupun jenis tanaman kayu lainnya. Saat ini bisnis perbenihan atau pembibitan sangat menjanjikan. Bahkan beberapa BUMN melalui dana CSRnya menggandeng kelompok tani untuk membuat tempat usaha pembibitan.

Selain menguntungkan, bisnis pembibitan atau pembenihan ini juga memberikan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat atau buruh tani. Saat ini ada beberapa perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pengadaan benih. Petani atau pengusaha bibit akan membeli benih kepada took yang kemudian disemai di tempat usahanya. Setelah layak untuk tanam baru diangkut oleh petani untuk ditanam. Dilihat secara kasat mata, usaha ini menguntungkan dan menggairahkan bagi petani. Namun secara tidak langsung petani kita diajarkan untuk selalu ketergantungan kepada perusahaan-perusahaan besar penyedia benih dan ketergantungan kepada pengusaha pembibitan.

Tidak hanya itu, munculnya jenis benih baru akan mengubur keberadaan benih-benih lokal yang kita miliki. Sebut saja di bidang hortikultura. Saat ini petani kita sudah tidak mengenal lagi jenis benih lokal yang kita punya. Namun, jika diminta menyebutkan nama-nama benih baru yang beredar di tempat usaha pembibitan petani kita akan hapal betul.

Supaya petani tidak terlalu tergantung kepada benih impor dan hibrida dalam mencapai swasembada pangan. Maka kejayaan benih lokal yang sudah mulai terkubur harus kita kembalikan lagi. Diperbanyak dan dipopulerkan kembali kepada petani kita. Benih untuk tanaman pangan baik Beras, Jagung, Kedelai, Kentang dan

Kacang Tanah yang di impor, memang kemungkinan memiliki kelebihan-kelebihan, namun sulit di tangkar oleh petani di dalam negeri. Sedangkan benih lokal kita sebenarnya sudah populer dikalangan petani, tinggal memory akan yang sudah mulai terkubur itu perlu disegarkan kembali. Inilah tugas kita bersama.

Sulitnya penangkaran tanaman pangan yang ditumbuhkan dari benih yang diimpor, akan membuat negara kita akan sangat tergantung secara terus menerus pada kebutuhan benih dari luar. Dibutuhkannya 514.000 ton benih tanaman pangan untuk mendukung swasembada pangan, belum lagi tanaman hortikultura lainnya. Ini merupakan merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menggalakkan sektor industri perbenihan. Dengan cara memunculkan kembali benih local kita. Selama ini, hampir semua fokus tertuju pada hasil akhir tanaman pangan yang selalu memiliki persoalan pada penyediaan pangan dalam negeri maupun impor akibat perbedaan data maupun perilaku kinerja operator logistik pangan yang dinilai kurang memuaskan.

Industri untuk pemenuhan benih oleh pemerintah mesti menjadi prioritas seiring dengan prioritas target swasembada pangan. Akan menjadi sia-sia jika swasembada pangan dapat dicapai namun benih untuk menghasilkan pangan masih didatangkan dari luar. Benih yang dapat diproduksi oleh petani di tingkat dusun, desa maupun kabupaten. Kemandirian akan benih bagi petani harus segera kita galakkan. Thailand dan Vietnam saja dimana beras kita masih tergantung pada mereka, mendatangkan benih Jagung hibrida sebesar 1.360 ton di tahun 2011 hingga Agustus, hanya dari Jawa Timur.

Peningkatan kualitas dan pemenuhan seluruh kebutuhan benih dari dalam negeri sesungguhnya tinggal kemauan. Peluang dan kemampuan itu ada, namun kemauan belum terlihat. Bukti yang sangat nyata, politik anggaran di bidang riset pertanian, sangat minim dan dikerjakan asal-asalan. Di tingkat lokal, pemerintah daerah tidak pernah serius untuk mau mengembalikan kejayaan benih lokal kita. Ini terlihat dari anggaran pengadaan benih selalu didominasi oleh perusahaan-perusahaan pengimpor benih. Memang kebutuhan akan benih yang baik dan produksi yang bagus

merupakan tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, tidak dapat dihindari dari penggunaan benih unggul yang merupakan mata rantai pertama dalam proses budidaya tanaman. Peningkatan produksi pertanian pun banyak ditunjang oleh peran benih bermutu. Meski program perbenihan nasional telah berjalan sekitar 30 tahun, tetapi ketersediaan benih bersertifikat belum mencukupi kebutuhan potensialnya. Benih menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman. Menurut FAO, peningkatan campuran varietas lain dan kemerosotan produksi sekitar 2,6 % tiap generasi pertanaman merupakan akibat dari penggunaan benih yang kurang terkontrol mutunya.

Penggunaan benih bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena bebas dari serangan hama dan penyakit, tanaman akan dapat tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan dan berbagai faktor tumbuh lainnya. (Wirawan, 2002). Pentingnya penggunaan benih bermutu merupakan salah satu unsur panca usaha pertanian yang utama dalam upaya peningkatan produksi karena tanpa penggunaan benih unggul yang bermutu, maka penerapan sarana produksi lainnya akan kurang bermanfaat bahkan menimbulkan kerugian petani (Deptan,1999).

Namun, saat ini dengan banyaknya faktor lapangan seperti perubahan iklim dan yang lainnya membuat produksi dengan benih-benih unggul hasil perkawinan silang perlu di telaah lagi. Inovasi benih padi menjadi salah satu cara untuk menerapkan program ketahanan nasional. Dengan kata lain, Indonesia secara perlahan diharapkan bisa terlepas dari ketergantungan akan impor benih padi ke depannya. Prinsip desa mandiri benih pada prinsipnya adalah membangun kemandirian penyediaan benih pada sebuah desa dengan melibatkan masyarakat. Di desa ada sumber benih, lalu masyarakat kemudian terlibat dalam penyediaan bibit. Kemudian bibit itu bisa memanfaatkan sendiri oleh masyarakat atau sebagian dipasarkan melalui lembaga ekonomi yang ada di masyarakat tersebut.

PEMBANGUNAN PERTANIAN : DIMANA HARUS MEMULAINYA?

Modernisasi pertanian adalah jawaban atas tuntutan dan dorongan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Tanpa terobosan-terobosan dalam tata cara bertani, sektor pertanian berpotensi ditinggalkan oleh generasi muda. Modernisasi pertanian mutlak dilakukan untuk menjadikan Indonesia negara super power dunia berbasis pertanian. Terobosan pemerintah ini tentunya tidak mudah karena untuk menuju ke arah modernisasi pertanian harus memerlukan beberapa tahapan dimana salah satunya adalah bagaimana caranya memperkuat pertanian dasar yang menjadi basis dari pertanian modern itu.

Kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045 tentunya harus didukung oleh semua pihak terkait termasuk pemerintah daerah yang selama ini menjadi basis pertanian dasar di Indonesia. Sebagai salah satu daerah penopang swasembada pangan di Indonesia, tentunya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus mengambil peran untuk ikut mensukseskan program pemerintah pusat itu.

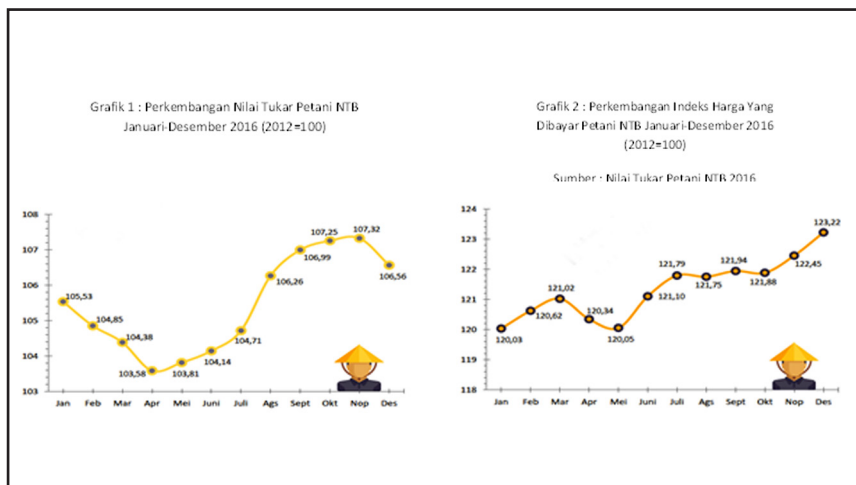
Pertanyaannya saat ini apakah sektor pertanian NTB sudah siap mengingat masih banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah terutama yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian di NTB.

Sektor Pertanian NTB memang saat ini masih menjadi salah satu prioritas pembangunan yang terbukti dengan masih dominannya sumbangan sektor ini pada pertumbuhan ekonomi daerah yaitu sebesar 21 persen dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencapai 21, 83 persen pada sektor ini (NTB Dalam Angka, 2017). Data ini ditunjang oleh peningkatan produksi pada beberapa komoditi pangan yang menjadi primadona Pemprov NTB untuk terus digenjot produktivitasnya. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Pertanian RI untuk produksi Jagung di NTB pada tahun 2017 sebesar 2.127.324 ton, terjadi peningkatan 66,42 persen terhadap produksi tahun 2016 1.278.271 ton. Sedangkan untuk Padi pada tahun 2017 produksinya mencapai 2.323.699 ton atau sebesar 10,91 persen dari tahun 2016 yang mencapai 2.095.117 ton. Untuk Ubi Jalar tahun 2017 produksinya mencapai 12.857 ton terjadi peningkatan 27,97 persen dari 2016 yang mencapai 10.047 ton. Namun, untuk komoditas Kedelai dan Kacang Hijau terjadi penurunan produksi dimana untuk Kedelai penurunannya sangat besar mencapai 48,76 persen dari 2016 sebesar 109.480 ton kualitas biji kering turun pada tahun 2017 menjadi 56.097 ton biji kering. Untuk Kacang Hijau juga demikian bahkan mencapai lebih dari 50 persen angka penurunan produksinya atau lebih tepatnya 65,73 persen yaitu tahun 2016 41.602 ton menjadi 14.257 ton pada tahun 2017.

Peningkatan produksi pada Padi dan Jagung sangat wajar karena memang Pemerintah Provinsi NTB sangat fokus untuk meningkatkan produksi dua komoditas pangan tersebut. Terbukti dengan berbagai program insentif dan pencetakan lahan baru. Namun, pertanyaannya kenapa hanya kedua komoditi tersebut saja yang menjadi fokus pengembangannya. Selain itu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemprov NTB guna mendukung program pemerintah pusat menjadi lumbung pangan dunia 2045 melalui modernisasi pertanian adalah pada kondisi kemiskinan yang ada di

daerah ini. Data Badan Pusat Statistik NTB pada 2017 pada periode Maret garis kemiskinan di pedesaan sebesar 337.333 (Rp/Kapita/ Bln).

Sebagian besar penduduk NTB masih bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, merupakan kewajiban pemerintah untuk membuat petani menjadi lebih sejahtera dari kondisi yang sekarang ini. Pemerintah daerah NTB harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memiliki pengaruh terhadap peningkatan daya beli petani. Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 berada pada kisaran antara 103,58-107,32 dengan rata-rata sebesar 105,45 (Grafik 1).



Pola pergerakan indeks harga yang dibayar petani berbanding terbalik dengan arah NTP gabungan seluruh sub sektor. Selama tahun 2016, pola indeks harga yang dibayar menunjukkan kecenderungan meningkat dari bulan ke bulan. Hal ini mengindikasikan penerimaan petani dari hasil produksi belum mampu mengimbangi tingkat kenaikan harga barang dan jasa di pasaran, baik pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi. Indeks harga yang cukup tinggi terjadi di November dan Desember masing-masing sebesar 122,45 dan 123,22. Pada November dan Desember 2016, indeks

harga yang dibayar petani meningkat masing-masing sebesar 0,47 persen dan 0,63 persen (Grafik 2). Rata-rata kenaikan indeks harga selama periode 2016 mencapai 0,28 persen per bulan.

Selain itu pula penyusutan lahan pertanian yang terjadi setiap tahun akibat pembangunan infrastruktur dan perumahan dipastikan memberikan dampak sosial yang cukup besar. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, setiap tahun luas area pertanian yang hilang mencapai 150.000 hingga 200.000 hektar. Inilah sebenarnya yang juga menjadi tantangan Pemerintah Provinsi NTB didalam kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi skala prioritasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi NTB yang di atas rata-rata nasional menjadikan daerah ini menjadi tujuan para investor untuk menanamkan dan mengembangkan usahanya. Disinilah letak tantangannya bahwa menurut Perda NTB No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pada Pasal 35 menyebutkan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan alih fungsi lahan seperti (a) untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan; (b) untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan. Pada kenyataannya setiap alih fungsi lahan yang terjadi di NTB tidak pernah mengikuti aturan tersebut sehingga, setiap tahun terjadi penyempitan lahan pertanian yang ujung-ujungnya juga akan semakin menekan nasib para petani di daerah ini.

Pertanian itu ibaratnya heritage yang harus dirawat dan dijaga secara tepat dan benar agar jangan nasib para petani dibiarkan seperti sekarang ini. Program subsidi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah masih fokus pada sektor hulu saja melalui subsidi pada input pertanian. Namun, pemerintah seakan abai terhadap sektor hulu (pasar). Untuk itu, pemerintah NTB harus sudah mulai berinovasi dengan memutar pola subsidi yang selama ini berjalan. Selama ini harga yang berlaku adalah harga yang

mengikuti mekanisme pasar sehingga, para petani sering dirugikan. Pembangunan pertanian harus sudah mulai mengaplikasikan pembangunan pertanian berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tanpa kesejahteraan petani maka aspek sosial dan ekonomi akan sulit dicapai. Jika petani miskin, bagaimana bisa melanjutkan ke tahap modern yang skalanya lebih besar dan membutuhkan peralatan dan teknologi lebih canggih.

Pupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Kontribusi pupuk terhadap biaya usaha tani sekitar 10%, namun pupuk ditetapkan sebagai komoditas strategis dan diawasi peredarannya. Instrumen pemerintah dalam kebijakan pupuk adalah pemberian subsidi harga pupuk. Kebijakan subsidi pupuk menghadapi berbagai kendala, sehingga timbul wacana untuk melakukan perubahan. Subsidi pupuk yang selama ini ini dimaksudkan untuk membantu para petani ternyata belum mampu untuk mengangkat kesejahteraan petani. Artinya apa, subsidi pada sektor input ini pada kenyataannya di lapangan sering tidak tepat sasaran. Pupuk yang menjadi bahan subsidi sering terjadi kelangkaan yang diakibatkan oleh permainan para “oknum” disaat para petani membutuhkan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga pupuk di tingkat pengecer. Ujung-ujungnya petani juga yang selalu dirugikan. Ketika musim panen juga demikian bahwa tidak adanya perlindungan harga yang diberikan pemerintah karena Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ada selalu mengikuti mekanisme pasar ditambah lagi dengan adanya ekspansi properti yang secara perlahan menggerus lahan pertanian produktif. Jadi, para petani tradisional justru dimatikan dengan berbagai kebijakan yang ironisnya dilakukan pemerintah sendiri.

Selain itu pula, yang harus menjadi perhatian Pemprov NTB adalah bagaimana caranya untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada. Kelembagaan kelompok tani dan Gapoktan difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Pemerintah sudah banyak memberikan bantuan, di antaranya bimbingan dan

penyuluhan, bantuan permodalan baik dalam bentuk pendanaan maupun Alsintan, serta subsidi pupuk dan benih. Banyaknya lembaga yang sudah terbentuk ini belum memberikan manfaat yang optimal bagi petani. Petani masih menghadapi masalah yang sama dan selalu berulang, di antaranya adalah biaya usaha tani yang semakin tinggi, pengerjaan sawah tidak tepat waktu, petani tidak mampu memiliki alat dan mesin pertanian (Alsintan) dalam kuantitas dan kualitas yang cukup, harga pupuk di atas harga eceran tertinggi dan kadang langka, hama tanaman, harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah saat musim panen, dan sarana irigasi yang rusak. Kelembagaan petani yang sudah ada selama ini masih mempunyai beberapa kekurangan, sehingga belum dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan petani.

Selain penguatan kelembagaan petani, pemerintah NTB melalui Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB (BPSBTPHP) untuk mendorong para petani di daerah ini agar mampu mengembangkan benih yang bersertifikat. Adanya benih yang diproduksi sendiri oleh para petani akan menjadi nilai tambah daripada para petani hanya menjual hasil gabah keringnya kepada para pengepul. Adanya kemandirian petani pada benih akan mempermudah para petani untuk memperoleh bibit yang sehat dan dengan harga yang terjangkau karena diproduksi oleh mereka sendiri. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB (BPSBTPHP) dapat memberikan pelatihan, pembinaan dan pengawasan kepada petani mulai dari penanaman sampai menghasilkan benih. Hasil penagkarannya akan diuji oleh BPSBTPHP dan jika lolos maka benih siap digunakan untuk berproduksi.

Setelah semua tantangan itu dapat diatasi barulah kemudian, Pemprov NTB melalui beberapa BUMD yang dibawah koordinasinya untuk mengambil peran agar tercipta kestabilan dan kepastian harga produk pertanian yang dihasilkan daerah ini. Mekanisme pasar yang saat ini ada cenderung tidak ernah memberikan keuntungan lebih bagi para petani sehingga, tidak heran apabila kesejahteraan mereka masih menjadi “obyek” jualan

dalam setiap kontestasi demokrasi di daerah ini. BUMD yang dimiliki Provinsi NTB harus “dipaksa” untuk merubah haluan orientasi profit yang dijalankan saat ini ke arah satu visi mensejahterakan para petani di NTB. Apabila semua itu sudah berjalan barulah pertanian NTB menatap ke arah pertanian yang modern karena apabila basis pertanian dasar belum kuat pondasinya maka jangan harap modernisasi pertanian dapat berjalan di daerah BUMI GORA ini.

SMK PERTANIAN DAN REGENARASI PETANI DI NTB

Bulan Desember ditetapkan sebagai Bulan Menanam Nasional (BMN) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008. Untuk itu, melalui momentum peringatan BMN tahun ini sangat perlu untuk kita membangkitkan semangat kaum muda untuk mau bertani dan bangga menjadi petani.

Isu regenerasi pertanian sangat perlu untuk ditelisik terlebih Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini menjadi tonggak bagi semua pihak di tengah-tengah perkembangan zaman sekarang ini dimana orang muda sudah mulai tidak tertarik dengan dunia pertanian dan lebih memilih untuk bermigrasi meninggalkan kampung halaman/pedesaan untuk menuju kota hanya demi mencari lapangan pekerjaan pada sektor non pertanian. Sektor pertanian pedesaan saat ini sudah mulai ditinggalkan dan hanya menyisakan orang-orang tua dan para pensiunan. Artinya adalah regenerasi petani menjadi ancaman bagi keberlangsungan sektor pertanian.

Sangat dikhawatirkan jika para orang tua dan pensiunan tadi, karena pengaruh usia, mereka harus pensiun juga dari bertani. Maka Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, akan menjadi pasar utama komoditi pangan dari negara luar. Mau tidak mau, impor komoditi pangan akan makin meningkat tajam. Tentu ini suatu ironi yang memalukan bagi Indonesia, sebagai salah satu negara agraris terpenting di dunia.

Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 menyatakan bahwa petani di Indonesia 61 persen adalah petani yang berumur 50 tahun ke atas. Hanya 13 persen yang berumur 20-39 tahun. Selain itu, International Fund for Agricultural Development (IFAD) melaporkan jika rata-rata usia petani Indonesia 50 tahun. Karenanya, Indonesia terancam kekurangan sumber daya (SDM) pertanian ke depan (IFAD, 2018). Institut Pertanian Bogor (IPB)

dalam suatu penelitian dan surveinya menyatakan bahwa generasi muda yang menggeluti dunia pertanian hanya 39 persen.

Melihat kondisi di atas, sebagai daerah agraris Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu mengantisipasi persoalan tersebut terlebih lagi bahwa daerah ini merupakan daerah penopang swasembada pangan nasional. Diperlukan upaya antisipatif sebagai solusi jangka panjang bahwa regenerasi pertanian sangat penting untuk keberlanjutan program ketahanan pangan serta ketersediaan lapangan kerja di NTB.



Bekerja pada sektor pertanian saat ini dianggap masih belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan sehingga paradigma itu menjadi justifikasi lambannya regenerasi pada pertanian. Data statistik NTB Dalam Angka Tahun 2017 menyebutkan sektor pertanian di NTB menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu 35.81 persen dari total seluruh tenaga kerja di NTB. Namun, yang perlu menjadi kekhawatiran adalah tenaga kerja yang terserap itu sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMP dan SD ke bawah. Badan Pusat Statistik NTB (2017) menyatakan bahwa penduduk NTB yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2015

(39,01%) dan tahun 2016 (38,90%). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan minat terutama pada generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Tingkat pengangguran yang rendah hanya memecahkan masalah penyerapan tenaga kerja namun, belum mampu memberikan indikasi mengenai kualitas pekerja.

Penciptaan petani modern maupun milenial dapat dilakukan melalui pendekatan sektor pendidikan formal. Penyadaran generasi muda akan pentingnya sektor pertanian perlu diterapkan sejak dini atau setidaknya sekolah dasar sehingga mempermudah inovasi teknologi di bidang pertanian serta pemahaman dasar tentang konsep pertanian itu sendiri. Pemprov NTB dapat melakukannya dengan memaksimalkan sumber daya yang telah ada seperti memanfaatkan keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Pertanian yang telah ada sebagai basis peningkatan pengembangan minat generasi muda terhadap pertanian.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Data Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB baik Negeri maupun Swasta sebanyak 320 SMK. Dari total SMK yang ada tersebut hanya 48 SMK yang termasuk dalam SMK pertanian atau memiliki jurusan pertanian (ICC, 2016).

Memaksimalkan peran SMK Jurusan Pertanian sebagai salah satu basis regenerasi pertanian di NTB perlu dilakukan melalui upaya mendekatkan atau menyambungkan lulusan SMK dengan dunia usaha dan industri di NTB. Hal ini dimaksudkan agar para lulusan SMK di NTB memiliki orientasi pada Job Creator, dimana kedepannya para lulusannya akan berkreasi sebagai wirausahawan muda di bidang pertanian.

Pembentukan mengenai karakter pertanian modern perlu dibentuk pada siswa SMK Pertanian sehingga mampu menarik minat generasi muda pada sektor pertanian. Secara umumnya SMK Pertanian yang ada di NTB lebih banyak tersebar

di daerah-daerah pedesaan sehingga akses terhadap informasi dan perkembangan teknologi masih menjadi kendala. Untuk itu, dengan kewenangannya Pemprov NTB perlu melakukan upaya upgrading tenaga pendidik pada seluruh SMK Pertanian yang ada sebagai salah satu solusi mendekatkan akses informasi dan perkembangan teknologi pertanian yang sudah berkembang.

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Indonesia. Dalam salah satu poin Inpres tersebut yaitu mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Selain itu masih dalam Inpres No. 9 Tahun 2016 tersebut juga memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK, mengembangkan SMK Unggulan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan SMK sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.

Selama ini pembelajaran pada SMK jurusan pertanian khususnya di NTB belum mampu memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan masyarakat terutama pada bidang keterampilan hidup sosial lokal hidup siswa. Materi pada kurikulum SMK jurusan pertanian sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pertanian yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Konsekwensinya, setelah lulus sekolah siswa tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.

Perkembangan SMK Pertanian yang terjadi saat ini akan berdampak terhadap regenerasi pertanian di NTB sehingga, pengembangan SMK Pertanian di NTB perlu juga untuk memperhatikan potensi, keterampilan, dan kearifan lokal yang ada pada masing-masing wilayah tempat SMK tersebut berada. Pengembangan SMK Pertanian yang berbasis pada potensi lokal perlu dikembangkan oleh Pemprov NTB mengingat setiap daerah di NTB memiliki karakter yang berbeda dalam bidang pertanian.

Cara ini juga perlu dilakukan sebagai upaya mendekatkan pengembangan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Anggaran 20% untuk sektor pendidikan perlu didistribusi kembali agar porsi untuk sektor pertanian melalui anggaran pendidikan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dimaksudkan agar setiap SMK Pertanian terutama bagi SMK swasta memiliki lahan pertanian sebagai tempat praktikum sehingga para siswa mampu memanfaatkan penggunaan lahan tersebut dalam jangka waktu panjang.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan untuk diambil tindakan dan solusi dalam mewujudkan harapan menjadikan SMK Pertanian sebagai lembaga vokasi yang berdaya saing ketenagakerjaan dan solusi regenerasi pertanian di NTB. Program Revitalisasi SMK diharapkan sebagai problem solving (pemecah masalah) dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan di SMK yang profesional dan peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK, penyelarasan kurikulum SMK sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik dan tenaga kependidikan SMK, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru produktif serta pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu, penataan kelembagaan SMK dan menguatkan sinergi antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri serta lembaga pemerintahan.

Pada akhirnya lulusan SMK pertanian di NTB harus didorong sebagai lulusan yang profesional. Pembentukan karakter yang dimulai pada jenjang SMK kedepannya mereka akan menjadi petani muda yang bertransformasi sebagai wirausahawan muda di perdesaan yang menjaga idealism dalam kehidupan para pemuda tani di NTB.

SUBSIDI TERBALIK PADA SEKTOR PERTANIAN

Merumuskan kebijakan pertanian memang tidak mudah. Posisi di persimpangan banyak kepentingan, baik ekonomi maupun politik, membuat kebijakan pertanian kerap kali sulit melepaskan diri dari berbagai kontroversi. Kentalnya warna politik dalam berbagai kebijakan tampaknya menyulitkan perbaikan sektor potensial perekonomian Indonesia ini.

Di Indonesia, secara umum, model kebijakan subsidi di bidang pertanian menganut pola subsidi input. Praktiknya, subsidi diberikan tidak langsung kepada petani. Subsidi disalurkan kepada petani melalui produsen komoditas barang/jasa yang disubsidi. Sampai saat ini pupuk merupakan komoditas strategis karena berkaitan dengan peningkatan produksi dan pendapatan petani serta kontribusinya dalam membangun ketahanan pangan nasional. Bersama-sama dengan faktor produksi lain, pupuk memiliki peranan penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Meskipun kontribusi pupuk terhadap biaya usaha tani hanya sekitar 10%, namun pupuk merupakan komoditas strategis dan termasuk ke dalam kelompok barang yang diawasi peredarannya.

Di masa orde baru, subsidi diterapkan guna mendukung upaya swasembada pangan. Berjalannya waktu, peran subsidi dalam membangun sektor pertanian semakin dianggap krusial. Subsidi yang diberikan pun semakin beragam. Di era reformasi, subsidi tidak lagi terbatas pada pupuk, dan benih, namun juga diberikan terhadap bunga kredit program dan premi asuransi pertanian. walaupun memiliki tujuan yang sangat mulia namun, kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi input masih mengundang banyak perdebatan antara lainnya terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, khususnya tanaman pangan. Kebijakan subsidi pupuk dinilai tidak efektif dalam hal biaya, pencapaian petani target, kurang tepat waktu dan harga, bahkan cenderung mendorong penggunaan pupuk yang

berlebihan. Argumen tersebut antara lain disebutkan oleh Herman et al. (2005), Syafa'at et al. (2006), Sjari (2007), PSEKP (2009), dan World Bank (2009a).

Untuk tahun 2018 ini pemerintah mengalokasikan dana untuk pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana mengatakan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi tersebut di antaranya terdiri dari pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, alokasi untuk pupuk Urea mencapai angka 4,1 juta ton, SP 36 sebesar 850 ribu ton, ZA 1,05 juta ton, NPK 2,55 juta ton, dan pupuk organik sebesar satu juta ton.

Adanya subsidi pada sektor pertanian ini apakah sudah menjawab persoalan tingkat kesejahteraan petani di Indonesia? Dari 33 provinsi sebanyak 21 provinsi mengalami penurunan NTP (Nilai Tukar Petani) dan 12 provinsi mengalami kenaikan NTP. Penurunan NTP terbesar pada Maret 2018 terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 1,50 persen, sebaliknya kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 1,81 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada Maret 2018, NTP secara nasional turun 0,39 persen dibandingkan NTP Februari 2018, yaitu dari 102,33 menjadi 101,94. Penurunan NTP pada Maret 2018 disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.

Kondisi ini merupakan dilema bagi para petani kita, dimana disatu sisi petani diminta menurunkan harga ketika seharusnya mereka bisa menikmati keuntungan, namun dibiarkan sendirian ketika mereka butuh bantuan akibat anjloknya harga. Kebijakan pemerintah didalam mestabilkan harga juga seringkali tidak optimal. Laju inflasi pada sektor pangan strategis disaat yang bersamaan tata niaga pangan tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Selama ini tataniaga pangan hampir semuanya mengikuti mekanisme pasar yang masih dipenuhi kartel. Sehingga,

bila terjadi kenaikan harga pangan pemerintah tidak punya kekuasaan untuk mengontrol harga karena tidak memiliki stok. Untuk itu, pemerintah seharusnya juga mampu memaksimalkan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu juga, absennya sanksi bagi pedagang yang menjual melebihi batas acuan harga pangan. Tanpa sanksi kebijakan ini tidak berfungsi apa-apa.

Kebijakan pemerintah pada subsidi input ini hanya berorientasi terhadap peningkatan produktivitas serta sebagai bentuk peran pemerintah didalam mewujudkan ketahanan pangan saja. Sebagai salah satu contoh adalah penerapa Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditi pangan dirasakan tidak relevan dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok lainnya di pasaran. Selain itu HET yang ditetapkan oleh pemerintah juga terkadang marginnya terlalu jauh dengan harga pada tingkat eceran. Disadari harga acuan di tingkat konsumen sebesar Rp.9.500 ternyata tidak efektif. Data yang dipublikasikan baik oleh BPS maupun sistem informasi yang tersedia di smartphone menunjukkan harga beras di pasar eceran jauh lebih tinggi dari harga acuan, mencapai lebih dari Rp.11 ribu sampai dengan 12 ribu rupiah. Terlebih pemerintah sudah menentukan harga acuan untuk sejumlah komoditas, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Permendag itu ditujukan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga dari beberapa komoditas bahan pokok strategis.

Kebijakan subsidi pertanian ini juga sangat rentan terhadap upaya-upaya perilaku korupsi dan kegiatan koruptif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beberapa temuan yang terkait dengan hal ini. Pada fase perencanaan (1) mekanisme Perencanaan Alokasi Pupuk dan Benih Bersubsidi Tidak Mendukung Implementasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien; (2) Dualisme Program: Benih Bersubsidi dan Bantuan Langsung Benih Unggul. Pada fase pelaksanaan (1) Mekanisme Penetapan HPP Komoditas Pupuk Bersubsidi Rentan membuka celah transaksional dan belum

mendorong efisiensi pada produsen; (2) meningkatnya beban keuangan negara sebagai akibat tertundanya pembayaran subsidi pemerintah kepada produsen pupuk di lingkungan PT PIHC, dan (3) belum Optimalnya Realisasi Program KUR di Bidang Pertanian dan Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP).

Kebijakan subsidi pertanian dalam kredit program juga tidak selamanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani kita. Subsidi pada bantuan modal ini juga memiliki tujuan yang sama dengan pupuk bersubsidi yaitu meningkatkan produktivitas petani. dalam Laporan Kajian Subsidi Pertanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2017 menyatakan, realisasi program KUR yang tersalur di bidang pertanian relatif rendah. Dari total lima sektor yang dibiayai KUR, penyaluran KUR di sektor pertanian berada di bawah angka 20%. Kondisi serupa juga muncul dalam Program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP). Dari target luas kepesertaan sebanyak 1 juta hektar di 2015, sampai bulan Desember, realisasi luas sawah yang terhimpun dalam Program AUTP baru mencapai angka $\pm 23\%$.

Selain itu dalam praktik, belum optimalnya capaian program-program subsidi dipengaruhi pula oleh disain kebijakan yang ditetapkan. Dalam Program Benih Bersubsidi, efektivitas implementasi terdegradasi oleh pelaksanaan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Hal ini setidaknya tergambarkan dari realisasi penyaluran benih bersubsidi di PT Pertani. Sampai dengan 31 Mei 2016, Daftar Usulan Penerima Benih Bersubsidi yang diajukan kelompok tani/petani baru mencapai ± 5 juta kg atau 9,8% dari total pagu benih bersubsidi yang diterima PT Pertani. Rendahnya penyerapan benih bersubsidi salah satunya disebabkan karena petani lebih memilih menggunakan benih gratis yang terwujud melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul. Kemudian pada fase pengawasan yang hingga saat ini belum berjalan optimal.

Untuk itu, ada baiknya pemerintah merubah pola subsidi yang dijalankan saat ini ke arah kebijakan memberikan subsidi pasca panen. Daripada subsidi pupuk lebih baik harga pasca panennya yang diperbaiki. Untuk mengatasi persoalan harga beras yang

selalu muncul setiap tahunnya, pemerintah segera memperbaiki menyeluruh tata niaga komoditi pertanian melalui pembenahan regulasi dan sektor hulunya. Yang terpenting adalah regulasinya. Baik regulasi di tahap peredaran maupun pengawasannya. Selama ini belum maksimal. Perbaikan regulasi itu termasuk juga harus jelasnya aturan main dari mulai budidaya, pascapanen, hingga tata niaga atau proses penjualan.

Subsidi input dari pemerintah bagi petani tetap diperlukan untuk menekan inefisiensi harga, diharapkan agar petani mampu menurunkan biaya produksinya sehingga petani akan mendapat selisih harga yang baik (*profit seeking behavior*). Namun, kehadiran pemerintah dalam perbaikan sistem pasar produk pertanian sangat diperlukan seperti meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga, mendorong terciptanya struktur pasar yang kompetitif, mengurangi praktik pasar monopoli ataupun monopsonistik, memperbaiki sistem transportasi untuk menurunkan biaya distribusi, dan pasar yang tersebar dan mendekati sentra produksi.

Dengan pola ini, maka tidak akan terjadi gejolak harga karena pemerintah bisa menjaga harga gabahnya pada tingkat yang terjangkau oleh petani. Dana pemerintah juga bisa dirasakan langsung oleh petani, karena yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Kebijakan ini tentunya dilandasi oleh persoalan pupuk yang sering menimbulkan permasalahan di lapangan terutama terkait dengan pola distribusi yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk, barangnya tidak ada. Itu pun jika pupuk ada, biasanya datang terlambat. Ini yang sering terjadi dan dikeluhkan di mana-mana. Harus ada evaluasi untuk perbaikan distribusi.

Bagi petani, panen tidak selalu berarti rezeki. Panen mungkin selalu ditandai oleh hasil produksi yang lebih banyak. Namun itu tidak berarti bahwa panen selalu memberikan keuntungan bagi petani. Apa gunanya hasil panen berlimpah jika harga jualnya berada jauh di bawah biaya produksinya?

Petani memang berharap cukup banyak kepada komitmen pemerintah pada saat harga komoditasnya anjlok. Terlebih

pemerintah sudah menentukan harga acuan untuk sejumlah komoditas, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Permendag itu ditujukan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga dari beberapa komoditas bahan pokok strategis.

Bahkan, dengan Permendag itu, Perum Bulog, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat ditugaskan untuk membeli dari petani dan menjual kepada konsumen dengan harga sesuai harga acuan, terutama sekali jika harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian dan harga di tingkat konsumen berada di atas harga penjualan

PETANI, BISNIS PERTANIAN, DAN RANTAI PASAR “ SIAPA YANG UNTUNG ? ”

Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan pertama tahun 2019 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar 31,218 triliun rupiah. Dan penyumbang terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 7,31 triliun atau 23,41 persen.

Data ini sangat menarik jika dibandingkan dengan sumbangan sektor lain. Pada tahun tahun sebelumnya, sumbangan PDRB NTB terbesar dari sektor pertambangan. Namun, sejak dijualnya saham NTB di sektor tambang, dan dibubarkannya perusahaan daerah yang selama ini menjadi perwakilan NTB dalam keterlibatannya di pertambangan terbesar kedua di Indonesia yaitu di Batu Hijau. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), berdasarkan kepemilikan dan luas lahan yang digarap. Jumlah petani yang memiliki lahan dibawah 0,5 hektar sebesar 83%. Dan petani penggarap sebesar 61%.

Jika dilihat dari jumlah rumah tangga yang terlibat di sektor pertanian ini, menunjukkan angka yang sangat besar yaitu hampir setengahnya merupakan petani yaitu sebanyak 47,31% atau 666.375 rumah tangga. Yang harus menjadi perhatian kita bersama yaitu 61,76% penduduk miskin di NTB adalah petani. Ini yang harus kita pecahkan bersama. Yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah, diman saja uang yang sebesar 7,31 triliun rupiah itu berputar?.

Berbicara komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan. Ada beberapa komoditi unggulan yang dimiliki oleh NTB. Bahkan 10 tahun pemerintahan sebelum gubernur yang baru kita fokus pada beberapa komoditi unggulan ini.

Kita coba membedah satu komoditi unggulan kita yaitu Jagung. Yang menurut Kepala Dinas Perindustrian NTB Andi pramaria di laman Lombok Post edisi sabtu, 22 juni 2019 yang lalu mengatakan potensi produksi Jagung NTB yaitu 2,3 juta ton dan

konsumsi Jagung hanya 500 ribu ton. Penulis masih meragukan data tersebut, kalau berbicara potensi kita bisa lebih. Namun jika program yang digelontorkan hanya untuk meningkatkan produksi dari perluasan areal tanam, itu yang penulis katakan programnya masih belum maksimal dan masih belum memiliki terobosan yang jitu.

Potensi luas lahan untuk pengembangan palawija di NTB mencapai 404 ribu hektar. Terdiri dari musim hujan di lahan kering mencapai 178 ribu hektar, musim kemarau I di lahan sawah 135.279 hektar dan musim kemarau II di lahan sawah seluas 90.786 hektar. Khusus untuk palawija Jagung, potensi lahan untuk pengembangannya di NTB mencapai 269 ribu hektar dengan tingkat pemanfaatan baru berkisar 55,5 ribu hektar. Artinya potensi lahan untuk pengembangan Jagung di NTB baru mencapai 32,69 Kw per hektar. Maka semestinya produksi Jagung NTB dapat mencapai 2,3 juta ton lebih, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan impor Jagung nasional yang rata-rata 1,2 juta ton Jagung per tahun.

Produksi Jagung di NTB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 produksi Jagung NTB mencapai 196.263 ton. Angka tersebut terus meningkat pada tahun berikutnya yaitu 308.863 ton pada tahun 2009, 371.826 ton pada tahun 2010 dan 456.915 ton pada tahun 2011. Setelah lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018 ini, produksi Jagung kita berkembang pesat mencapai 1,1 juta ton.

Namun, kita akan coba fokus pada rantai bisnis komoditi ini. Kita akan mulai dari hulu. Setiap tahun pemerintah daerah menggelontorkan program dalam bentuk bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan. Jika kita turun ke toko-toko pertanian yang menjual bibit.

Nilai strategis pengembangan Jagung selain produksi yang mencapai 456.915 ton yang mencapai nilai Rp.1.347.899.250.000 ternyata juga mampu melibatkan petani sebanyak 415.506 orang dan pengentasan kemiskinan sebanyak 75.025 orang dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp.15.092.200. Selain itu juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan NTB dengan

tingkat kebutuhan mencapai 14.851. pengembangan Jagung ini juga mampu menciptakan wirausaha sebanyak 3200 unit usaha. Dari bahan Jagung dapat dibuat bahan olahan seperti keripik, Jagung Brondong, Marning dan Emping.

Potensi pengembangan Jagung untuk NTB cukup besar. Namun produktivitasnya masih sangat rendah 2,003 ton/ha dengan luas panen 31.459 ha (BPS, 2002). Produksi Jagung masih di bawah produksi rata-rata nasional 2,81 ton/ha (Deptan, 2002). Hasil penelitian Balai Penelitian Serealia Maros menghasilkan beberapa varietas Jagung bersari bebas ataupun hibrida yang mempunyai potensi produksi sangat tinggi 6-8 ton/ha.

Hasil pengkajian dan penelitian dengan petani kooperator untuk beberapa varietas unggul yang dikembangkan Balitsereal Maros mampu menghasilkan 7 ton/ha Jagung kering giling di Sambelia Lombok Timur. Ditingkat petani dapat mencapai hasil 5-6 ton/ha. Hasil pengkajian dan penelitian Jagung hibrida di Labangka, Kecamatan Labangka, Sumbawa dengan teknologi tanpa olah tanah dengan Jagung hibrida C7 selama 2 tahun 2000/2001 dapat menghasilkan 6-7 ton/ha sedang ditingkat petani sekitar 5,5 ton/ha (Suwardji 2002).

Secara umum tanah-tanah di lahan kering NTB mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan Jagung. Tanah-tanah alfisol, entisol, inceptisol dan vertisol merupakan tanah-tanah yang berpotensi besar untuk pengembangan Jagung. Namun demikian beberapa kendala seperti kondisi curah hujan yang tidak menentu, kekurangan beberapa unsur hara seperti N dan P serta beberapa unsur mikro perlu mendapat perhatian. Di samping itu permasalahan lain seperti hama dan penyakit, gulma dan tidak kalah pentingnya. Permasalahan pemasaran menjadi permasalahan yang sangat fundamental dalam pengembangan Jagung di lahan kering.

Beberapa teknologi pengelolaan lahan kering berbasis Jagung yang berkembang diantaranya: (1) penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan stabil, (2) benih berdaya tumbuh tinggi > 90 %, (3) teknologi tanpa olah tanah dengan herbisida ramah lingkungan, (4) populasi tanaman optimum, (5)

rationalisasi penggunaan pupuk berdasarkan analisis tanah dan jaringan tanaman, (6) penggunaan pupuk organik saat tanam, (7) pengendalian gulma secara tepat, (8) pengendalian hama dan penyakit berdasarkan konsep PHT, (9) pengelolaan air yang tepat, (10) penanganan paska panen, (11) penanaman tumpang gilir dengan kacang hijau dan kacang tunggak (Mashur, 2004).

Kebijakan Terkait

Tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju dan sejahtera. RPJP Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunan dari tahap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam RPJPD ini dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik dibidang pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya budaya dan kelembagaannya sehingga masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Barat dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta memiliki daya saing yang kuat.

Pembangunan sub sektor pertanian dan peternakan pada dasarnya merupakan implementasi dan bagian penting dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam misi pembangunan lima tahun (RPJM 2010-2013), pemerintah NTB berkomitmen menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bentuk kongkret dari penjabaran misi tersebut adalah menjadikan sapi dan Jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, sebagai implementasi dari RPJP dan RPJM. Di sektor pertanian dirancang program dengan skala prioritas untuk Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan komoditas unggulan. yaitu dengan

memfokuskan pada pengembangan komoditas unggulan yang dikenal dengan PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut).

Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan komoditas ini diantaranya; pertama, dengan pemberian bibit pada kelompok tani, kedua, meningkatkan fungsi dan peran Penyuluh. Ketiga, bekerjasama dengan sumber dana perkeriditan dengan bunga rendah untuk membantu petani. Hingga tahun 2012 dana yang bersumber dari APBN yang masuk ke pengembangan komoditas ini sebesar Rp 77,826,750,000. Dana dari APBD Provinsi sebesar Rp 14,790,000,000 sedangkan perbankan sebesar Rp.50,000,000,000.

Di sektor Jagung, Pemerintah Daerah melakukan teobosan yaitu Pertama, dengan pengembangan areal tanam baik dilahan basah maupun di lahan kering. Untuk lahan kering diutamakan padalahan yang memiliki sumber air seperti sumur pompa air dalam embung sehingga bisa ditanami dua kali dalam setahun. Kedua, peningkatan produktivitas. Potensi NTB untuk Jagung komposit antara 50-70 kw per hektar dan Jagung hibrida mencapai 100-150 kw per hektar. Sehubungan dengan itu, maka dilakukan upaya pergantian varietas dari varietas potensi produksirendah (varietas lokal) ke varietas potensi sedang ke varietas potensi tinggi (varietas hibrida) yang diikuti dengan perbaikan teknis budidaya menjadi lebih baik. Ketiga, Pengamanan produksi. Terdapat tiga kegiatan berkaitan dengan upaya pengemasan produksi yaitu (a) pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), (b) perlindungan tanaman dari dampak fenomena iklim (kekeringan,kebanjiran) dan (c) penanganan pasca panen. Keempat,kelembagaan dan Pembiayaan. Penataan dan penguatan kelembagaan tani merupakan keharusan untuk meningkatkan produksi.

Keberhasilan peningkatan produksi banyak mempengaruhi kemampuan kelompok tani dalam rekayasa teknologi, rekayasa ekonomi dan rekayasa sosial. Kelompok tani yang mantap lebih responsif terhadap teknologi, mampu menjalankan kemitraan dengan baik dan dipercaya perbankan. Selain upaya tersebut pemerintah daerah juga membangun sarana pendukung yaitu

dengan membangun gudang SRG dengan kapasitas 3000 ton. Anggaran di sektor pengembangan Jagung juga terus bertambah setiap tahunnya, tahun 2010 dana yang diperuntukkan untuk program Jagung yaitu Rp 281.976.000 mengalami peningkatan dengan pesat pada tahun 2012 menjadi Rp. 6.000.000.000.

Untuk sektor pertanian, peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur No 6 tahun 2011 Tentang Dukungan Dana Perkuatan Modal Kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sangat membantu pengusaha di bidang permodalan, yang menjadi kendala adalah pengusaha-pengusaha baru tidak dapat mengakses bantuan modal ini. Dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal, pengusaha harus sudah berjalan selama 2 tahun/memiliki pengalaman selama dua tahun.

Infrastruktur, Biaya Transportasi, Biaya Transaksi, dan Permodalan

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan sebuah investasi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu keputusan pelaku usaha karena sangat menentukan biaya distribusi input dan output produksinya. Karenanya, ketersediaan infrastruktur dapat menjadi faktor pendorong produktivitas suatu daerah. Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama dalam melakukan investasi yaitu jalan, ketersediaan air bersih dan listrik.

Dari hasil studi yang dilakukan KPPOD pada tahun 2011 mengenai kondisi infrastruktur di NTB, umumnya lebih banyak pelaku usaha yang menyatakan bahwa kualitas infrastruktur di Nusa Tenggara lebih buruk daripada empat tahun yang lalu. Kecuali air minum dan telepon di NTB, lebih banyak pelaku usaha di provinsi ini yang menilai bahwa kualitas infrastruktur lainnya buruk/sangat buruk. Hasil studi kualitatif TKED di Kota Mataram mengonfirmasi hal ini. Pelaku usaha di sana menganggap bahwa pertumbuhan jalan yang rendah, kondisi jalan yang buruk, dan waktu perbaikan jalan yang lama sebagai penghambat distribusi barang di sana. Selain itu, listrik yang sering padam juga diidentifikasi sebagai masalah. Namun, pada tahun 2018 ini, infrastruktur sudah mulai

membaik. Baik jalan dan listriknya. Yang masih menjadi kendala adalah air bersih.

Permasalahan infrastruktur juga dikeluhkan oleh petani Jagung yang ada di Kecamatan Lembar. Dengan jeleknya kualitas jalan dan irigasi membuat biaya pasca panen bertambah, kami harus mengeluarkan biaya untuk mengangkut hasil panen kami.

Transportasi sampai saat ini tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha di NTB. Infrastruktur yang sudah ada sudah mulai mengalami perbaikan. Yang menjadi kendala bagi para pengusaha adalah letak geografis NTB yang terdiri dari dua pulau besar yakni Sumbawa dan Pulau Lombok. Dan sebagian besar barang-barang hasil produksi baik Jagung maupun sapi di jual ke provinsi Bali maupun Jawa Timur. Ini mengakibatkan penyebrangan yang dilakukan dua atau tiga kali penyebrangan. Hal ini berdampak kepada biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Permodalan menjadi kendala yang serius bagi petani/peternak maupun pelaku usaha. Hasil diskusi dengan petani Jagung di Kecamatan Masbagik Lombok Timur mengatakan bahwa setiap awal musim tanam, kendala utama yang dialami adalah permodalan untuk membeli bibit, mengolah lahan, dan untuk membeli saprodi yang lainnya, dan biasanya kami meminjam kepada pengusaha yang ada di daerah kami. Kami tidak pernah ke perbankan karena persyaratan yang ada di perbankan sangat rumit. Dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank NTB Syariah membenarkan hal tersebut, usaha dibidang pertanian sulit mendapatkan bantuan permodalan dikarenakan usaha dibidang tersebut rentan terhadap resiko kegagalan.

Sejak tahun 2011, listrik sudah tidak menjadi kendala lagi di NTB, pemadaman bergilir yang selama ini dilakukan oleh PLN sudah tidak terjadi lagi. Apalagi dengan sudah beroperasinya mesin baru PLN yang ada di Jeranjang Lombok Barat.

Untuk air bersih, akhir tahun 2012 ini terjadi permasalahan berkurangnya debit dan seringnya penyetopan/macetnya pasokan air yang dilakukan oleh PDAM menang Mataram, bahkan permasalahan ini menimbulkan Pemerintah Daerah Lombok Barat berencana menarik sahamnya dari PDAM Menang Mataram.

Berdasarkan hasil studi kepuasan public mengenai kinerja PDAM Menang Mataram yang dilakukan oleh JMS Lombok Barat bahwa 60% pelanggan merasa kurang puas dengan kinerja dari PDAM Menang Mataram. Di Lombok Utara Tahun 2012 merupakan Tahun yang bersejarah, dikarenakan tahun 2012 mulai terbentuknya PDAM di Kabupaten Lombok Utara. Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 sempat terjadi gejolak di PDAM tersebut, dikarenakan dengan adanya rencana sepihak dari PDAM untuk menaikkan tarif dasar, hal ini sempat menimbulkan penolakan dari pelanggan. Secara umum berkurangnya debit air menjadi kendala bagi petani/peternak maupun pelaku usaha.

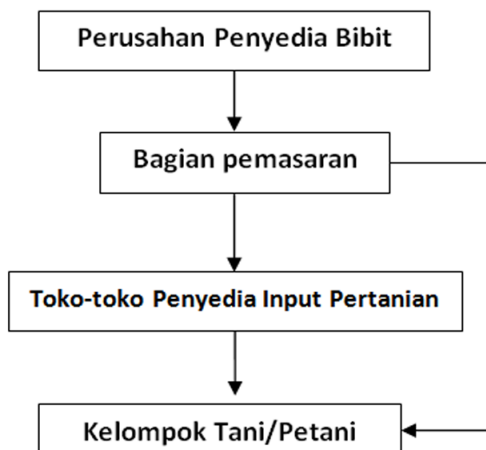
Struktur Pasar

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan daya saing suatu komoditi, dalam hal ini komoditas Jagung, baik yang melayani pasar-pasar tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional perlu dikaji dari dua sisi yaitu dari sisi input dan output. Dari input terdapat beberapa perusahaan yang masuk ke NTB. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki bagian pemasaran yang membawa bibit tersebut ke toko-toko pertanian atau langsung ke petani. Harga yang diterima oleh petani dengan membeli di bagian pemasaran perusahaan atau di toko pertanian sama. Sejauh ini, petani Jagung tidak mengalami kesulitan memperoleh bibit Jagung sulit, selain bisa diperoleh di toko pertanian petani juga mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah melalui masing-masing ketua kelompok. Setiap anggota kelompok memperoleh 5 Kg bibit Jagung. Namun tidak demikian dengan pupuk yang agak sulit untuk mereka peroleh. Sejauh ini belum ada subsidi maupun bantuan pupuk untuk petani Jagung. Kebutuhan pupuk mereka penuhi sendiri sesuai dengan kemampuan mereka.

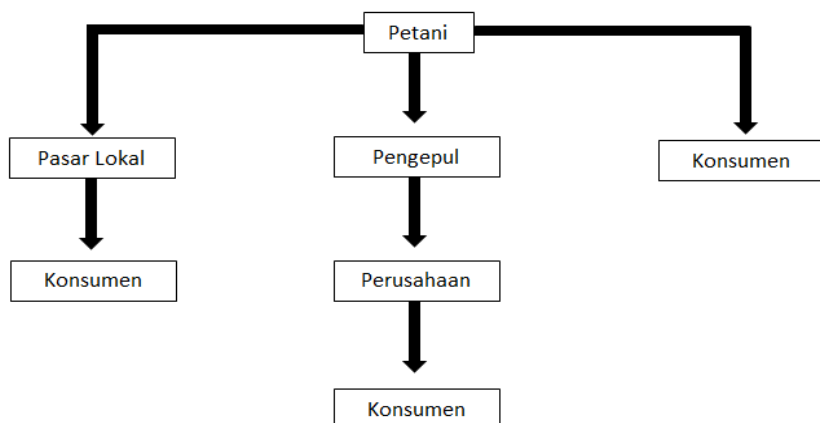
Pada saat musim panen tiba, biasanya para pedagang datang langsung ke lahan atau ke rumah petani untuk membeli hasil panen. Mereka yang datang biasanya pedagang pengepul yang kemudian menjual biji Jagung tersebut ke perusahaan atau ke eksportir. Namun untuk pasar lokal biasanya dari petani langsung

ke konsumen namun adapula pedagang pengepul yang datang mencari biji Jagung untuk dipasarkan langsung. Penjual pedagang pasar local ini hanya memiliki skup pasar yang kecil dan modal yang kecil pula. Berikut ini bagal alir input produksi Jagung dan output biji Jagung.

Bagan Alir Input (Bibit) Produksi Jagung



Bagan Alir Output Produksi Jagung



Beberapa perusahaan yang memasok bibit di NTB adalah PT PERTANI, PT Tanindo dan PT Singenta. Perusahaan –perusahaan tersebut memproduksi bibit Jagung yang sudah dikenal oleh petani diantaranya merk BISI milik PT Tanindo dan merk NK1 atau NK2 milik PT Singenta. PT Pertani selain menyediakan bibit juga membeli Jagung dari petani. Baik pedagang maupun pembeli bebas keluar atau masuk pasar dan jumlahnya cukup banyak.

Jika dilihat dari jumlah penjual atau produsen yang bergerak dalam input produksi Jagung maka jenis pasarnya termasuk dalam oligopoly dimana terdapat beberapa produsen atau penjual bibit seperti yang telah disebutkan diatas. Demikian pula dengan pasar output, jika dilihat dari jumlah pembeli maka termasuk dalam pasar oligopoly. Karrena terdapat beberapa pembeli (skala besar) yang berujung pada eksportir di Pulau Bali.

Jenis pasar tersebut berpengaruh pada harga komoditas, pada pasar input harga ditentukan oleh produsen bibit Jagung sedangkan pada pasar output harga ditentukan oleh kondisi pasar. Dimana pada saat produksi melimpah pada saat panen raya harga akan turun, namun pada saat produksi sedikit harga akan naik, sebagaimana produk pertanian lainnya. Produsen (petani) tidak memiliki kekuatan untuk membentuk harga di pasar melainkan sebagai pengambil harga yang berlaku (*price-taker*).

Meski demikian, bukan berarti setiap rantai yang ada tidak memiliki masalah. Untuk pasar input permasalahan yang dihadapi pada pasar input adalah pupuk yang semakin sulit untuk diperoleh, karena hingga saat ini belum ada subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk komoditas Jagung. Sedangkan pada pasar output masalah yang dihadapi adalah lemahnya posisi tawar petani terutama menghadapi harga Jagung yang sering mengalami fluktuasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengadakan program kemitraan dengan perusahaan. System kemitraan yang dijalani berbentuk pinjaman modal atau pemberian bibit dan pada saat panen perusahaan yang akan membeli Jagung tersebut. Keuntungan dari system kemitraan ini petani terlindungi dari permainan harga yang dilakukan oleh pedagang pengepul. Selain itu, untuk mengatasi anjloknya harga

tersebut pemerintah sudah berusaha membuat program untuk mengatasi anjloknya harga dengan membuat program resi gudang (gudang untuk menyimpan produk-produk pertanian) yang berfungsi untuk menjaga stabilitas harga. Seharusnya bisa diatasi, tetapi kenyataan di lapangan berbicara hal sebaliknya. Begitu juga yang terjadi pada panen raya tahun 2012 lalu. Harga Jagung jatuh sampai Rp 1000 per kg.

Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi oleh petani adalah pertama, kurang stabilnya harga Jagung sehingga kondisi ini sering merugikan petani. pemasaran produksi adalah belum dapat menjual langsung kepada pedagang besar (eksportir), PUSKUD, atau pedagang lainnya di kota provinsi. Petani umumnya menjual hasil Jagung hanya ke pedagang pengumpul atau ke pasar (pedagang penyalur kota atau pengecer di pasar umum). Dengan demikian, harga yang diterima petani relatif rendah dan fluktuatif. Keadaan ini kurang menguntungkan bagi petani, sebab tidak adanya jaminan harga yang layak Berdasarkan data perkembangan harga Jagung, pada bulan September-November merupakan puncak harga jual tertinggi. Pada bulan September-Desember, kebutuhan (konsumsi) lebih besar dibanding produksi, yang menyebabkan harga Jagung naik. Periode tersebut merupakan puncak paceklik, sehingga harga Jagung tinggi. Dalam periode Januari-April, produksi lebih tinggi dari kebutuhan sehingga terjadi kelebihan produksi, yang menyebabkan harga Jagung cenderung rendah (Nadjamuddin dan Noor 1997).

Kedua, masih kurangnya pemahaman petani mengenai pengelolaan pasca panen yang berpengaruh pada mutu biji Jagung yang dimiliki masih relatif rendah sehingga kalah bersaing dipasar. Proses pengeringan Jagung memegang peranan penting untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan permintaan konsumen/pasar. Makin rendah kadar air makin tinggi persentase butir utuh. Petani di beberapa wilayah telah melakukan proses pengeringan sekaligus penyimpanan di atas para-para di dapur. Upaya ini tampaknya cukup berhasil untuk mengurangi terserangnya Jagung

oleh hama/penyakit selama penyimpanan. Namun usaha ini hanya dapat dilakukan dalam skala kecil.

Ketiga, kondisi geografis NTB yang berbentuk kepulauan yang berpengaruh pada transportasi dan infrastruktur. Untuk mencapai pedagang besar yang ada di Ibu Kota Provinsi harus menyeberang lautan demikian pula untuk sampai pada eksportir yang berada di pulau Bali. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya pengangkutan yang pada akhirnya dibebankan pada harga ditingkat petani atau penurunan harga beli di petani karena pedagang akan menanggung biaya pengangkutan. masalah ini tidak hanya dihadapi oleh petani tapi juga pengusaha.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah pertama faktor permodalan. Dimana modal menjadi salah satu kunci strategis untuk mendinamisasi jaringan kelembagaan agribisnis Jagung di Indonesia. Kedua, produksi yang tidak kontinyu sehingga kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar.

ADAPTASI KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MISKIN PADA DAERAH RAWAN BENCANA





Berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan tentunya tidak bisa terlepas dari pengarahannya berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kondisi dan perubahan yang terjadi di muka bumi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan lingkungan itu sendiri. Pada umumnya kondisi ketidakseimbangan lingkungan lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang bertentangan dengan konsep kelestarian alam dan lingkungan. Perambahan hutan yang dilakukan secara keliru, membuang sampah sembarangan, kegiatan industrialisasi dalam berbagai sektor dan, konsep tata ruang wilayah yang tidak sesuai merupakan berbagai contoh dari sumbuhan manusia terhadap kondisi ketidakseimbangan lingkungan yang terjadi.

Akibat dari kondisi ketidakseimbangan lingkungan tersebut maka, secara langsung berkontribusi kepada perubahan iklim global yang ditandai berupa naiknya suhu permukaan bumi, naiknya muka air laut, menipisnya lapisan ozon, fenomena *El Nino* dan *La Nina* serta cuaca ekstrem yang disertai dengan perubahan musim dan intensitas hujan. Semua dampak yang terjadi tersebut lambat laun akan bermuara kepada suatu peristiwa yang dapat merugikan kehidupan manusia baik kerugian materi bahkan hingga merenggut korban jiwa yang mana peristiwa itu sering kita sebut bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana dapat disebabkan karena faktor alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor), non alam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan manusia/sosial (konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, dan teror).

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari delapan daerah di NTB yang telah ditetapkan menjadi daerah yang beresiko tinggi bencana secara nasional karena dari 15 kriteria bencana yang ada, 11 diantaranya dapat terjadi di daerah ini. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, ada 9 Kecamatan (Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Pringgasela, Wanasaba, Jerowaru, Keruak, dan Sakra Barat) dari 20 Kecamatan yang ada termasuk daerah rawan bencana di daerah ini.

Kondisi sebagai daerah rawan bencana ini belum lagi ditambah lagi dengan fakta yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur adalah 18,46 persen (BPS NTB, 2017). Kondisi Lombok Timur yang seperti ini akan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah daerah apabila dikaitkan dengan upaya-upaya atau program yang dijalankan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana.

Berbicara mengenai ketahanan pangan dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama, yaitu kecukupan (ketersediaan) pangan, stabilitas ekonomi pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan. Dengan demikian ketahanan pangan bukan hanya mengenai masalah produksi, tetapi juga merupakan masalah keterjangkauan dan distribusi. Akan semakin menarik apabila hal ini dikaitkan dengan ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Lombok Timur yang secara kasat mata dapat terlihat. Sehingga, konsep pendekatan ketahanan pangan tidak bisa digenarilisir untuk semua wilayah Lombok Timur.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi keberlanjutan hidup manusia, yang jika tidak tersedia dapat menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan, dan karenanya hak atas pangan yang layak adalah hak asasi manusia. Kebutuhan yang mendasar ini juga menjadi perhatian atau merupakan isu global terkait dengan faktor perubahan iklim yang terjadi. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pemenuhan pangan ini sangat penting sehingga ditempatkan

pada tujuan urutan kedua. Hak atas pangan juga dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasal 28H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak serupa juga disebutkan di dalam Undang-Undang Pangan No. 18/2012, dan karena Indonesia juga merupakan peserta ICESCR, maka hal tersebut disebutkan pula pada UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekosob.

Saat ini sektor pangan yang dikembangkan oleh pemerintah Lombok Timur masih berkonsentrasi pada pengembangan beberapa komoditi pangan saja. Dari 3.000 spesies tumbuhan yang dibudidayakan untuk pangan, hanya berfokus pada 16 tanaman pangan utama, terutama biji-bijian beras, jagung dan gandum. Begitu pula pada komoditas aneka kacang, hanya fokus pada kedelai dan kacang tanah. Ada beberapa alternatif yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur didalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat sekaligus sebagai konsep pertanian berkelanjutan yaitu dengan pengembangan pertanian berbasis ekoregion. Sistem ini menggunakan pendekatan sesuai kondisi dan kebutuhan region, bukan pendekatan komoditas. Karena memenuhi aspirasi lokal, partisipasi dan kreativitas mudah tumbuh dan berkembang, dan secara bertahap bakal terjadi spesialisasi.

Pengembangan beberapa komoditas pertanian berdasarkan potensi wilayah guna mewujudkan kondisi ketahanan pangan masyarakat sudah harus diterapkan di Lombok Timur. Hal ini mengingat kondisi topografi Lotim yang berbeda antara wilayah Utara dan Selatan. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mendukung terciptanya ketahanan pangan masyarakat sekaligus mewujudkan ketersediaan dan kemandirian pangan.

Sebagai komunitas lokal di Pulau Lombok, Suku Sasak umumnya telah memiliki suatu kebudayaan lokal yang terkait dengan upaya-upaya adaptasi terhadap gangguan lingkungan dan kelestarian lingkungan berupa adanya bangunan Lumbung yang berada disetiap rumah penduduk. Prinsip dari Lumbung bagi masyarakat Lombok adalah sebagai tempat menyimpan sebagian dari bahan pangan untuk persediaan ketika masa paceklik dan

situasi ekstrim seperti bencana alam serta sebagai tempat menyimpan hasil panen. Sudah harus dipikirkan bagaimana stok pangan tersedia di daerah atau sekitar wilayah yang rawan bencana alam. Jadi, tidak seperti fakta sekarang ini dimana masyarakat hebis menjual hasil panen yang kemudian dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pangan.

Namun, seiring pergeseran zaman fungsi Lumbung lebih beralih kepada fungsi obyek wisata saja (traditional destination). Selain itu pula, masyarakat juga ikut terjebak oleh kebijakan pemerintah terhadap ketahanan pangan yang selalu identik dengan beras saja. Bentuk gerakan beras-isasi tersebut ialah, pertama, dari sisi produksi, subsidi dan proteksi terhadap produksi beras telah kita lakukan sejak awal Orba sampai sekarang. Pembangunan irigasi, mekanisasi, bantuan benih pupuk, dan dukungan intensifikasi lainnya didominasi untuk meningkatkan produksi beras.

Untuk itu, Lumbung dalam artian simpanan bahan makanan harus dibangun dalam sistem sosial masyarakat mulai dari keluarga, komunitas, desa sampai dengan kabupaten. Setiap keluarga harus memiliki ketersediaan lebih bahan pangan, tidak hanya yang habis dimakan sehari hari dan bukan hanya beras saja. Prinsip ini mesti dijalankan untuk membangun ketahanan sosial ketika menghadapi bencana alam. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu menghidupkan kembali falsafah Lumbung di dalam setiap kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama terkait dengan ketahanan pangan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

Selain menjamin ketersediaan pangan, menghidupkan kembali falsafah Lumbung ini juga mampu meningkatkan akses pangan masyarakat. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan. Mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memperpendek rantai pasar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan desa pada umumnya. Kehadiran BUMDes yang ada di desa-desa rawan

bencana dapat lebih diarahkan sebagai wadah dan pembinaan bagi pengembangan produk hasil panen masyarakat. Untuk, itu pula Pemkab Lotim dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dapat lebih mengembangkan program-program yang bertujuan untuk peningkatan nilai pada produk hasil pertanian masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan bencana. Pengembangan industri-industri rumahan dan UKM melalui pengolahan hasil pertanian dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga, masyarakat miskin memiliki modal dasar dalam upaya ketahanan pangan di tengah-tengah kondisi daerah tempat tinggal mereka yang masuk dalam daerah rawan bencana.

FORMAT ULANG SISTEM KETAHANAN PANGAN LOMBOK TIMUR

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan bagi daerah ini karenanya tidak heran apabila sektor pertanian masih menjadi motor penggerak didalam laju pertumbuhan ekonomi serta menjadi sumber PAD nomor wahid apabila dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur (Lotim), pertumbuhan ekonomi Lotim mencapai 5,9 persen. Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya, 2014 sebesar 4,93 persen. Sektor pertanian, tetap merajai dengan sumbangan 28,9 persen. Hanya saja, dalam empat tahun terakhir sumbangan sektor pertanian sebagai sektor paling dominan ini terus mengalami penurunan. Menurut Kepala BPS Lotim, M. Saphoan yang dikutip dari berita online (Suara NTB, Jumat, 24 Februari 2017), sumbangan sektor pertanian yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini mengalami penurunan terus. Data tahun 2011, sumbangan sektor primer ini 30,79 persen. Terakhir menjadi 28,9 persen.

Salah satu penyebab turunnya sumbangan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi serta indeks ketahanan pangan Lotim adalah karena semakin



berkurangnya lahan yang selama ini menjadi penopang sektor pertanian di daerah ini yang lebih disebabkan oleh adanya kegiatan alih fungsi lahan. Banyak lahan-lahan pertanian yang telah berubah fungsi menjadi pertokoan modern. Disatu sisi pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang dengan ditandainya oleh menjamurnya usaha-usaha ritail namun, pada sisi lainnya konversi lahan pertanian sangat tidak menguntungkan karena dapat menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan produksi pangan dan pendapatan per kapita keluarga tani. Konversi lahan pertanian juga mempercepat proses marginalisasi usaha tani sehingga menggerogoti daya saing produk pertanian domestik.

Proses alih fungsi lahan memang tidak bisa dihindari karena proses jual beli yang dilakukan oleh petani tidak dapat dibatasi oleh pemerintah dan itu juga merupakan hak petani. Namun Pemkab Lotim dapat melakukan usaha-usaha pengendalian atau memperlambat proses alih fungsi lahan melalui berbagai cara seperti : (1) *Regulation*. Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (zoning) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan; (2) *Acquisition and Management*. Melalui pendekatan ini Pemkab Lotim perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan



pertanian; dan (3) *Incentive and Charges*. Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsilah pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, produk pertanian di Kabupaten Lombok Timur juga sangat bergantung kepada musim dan iklim sehingga, Pemkab Lotim juga harus mewaspadai adanya pemanasan global (global warming) yang terjadi saat ini. Pemanasan global telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang menjadi tujuan dari pembangunan. Dampak dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan menyebabkan kekeringan di wilayah pertanian yang pada akhirnya akan mengakibatkan tanaman pertanian menjadi rusak. Wilayah selatan Lotim harus mendapat perhatian lebih sangat sering mengalami kekeringan, hal ini disebabkan karena wilayah selatan memiliki topografi dataran rendah dengan dominasi tanaman perdu dan hutan terbatas sehingga ketersediaan airnya sangat rendah. Kerusakan pada tanaman pertanian atau gagal panen ini akan menyebabkan kerawanan pangan pada daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Selain kekeringan yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim, Pemkab Lotim juga perlu mengantisipasi kegagalan panen di wilayah pertanian yang disebabkan oleh banjir yang merendam tanaman pertanian. Bencana banjir ini juga akan meningkatkan kerawanan pangan. Selanjutnya, dampak perubahan iklim juga akan menyebabkan meningkatnya populasi hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman dan memiliki dampak terhadap ketahanan pangan.

Pencapaian ketahanan pangan merupakan cita-cita setiap periode pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu, paradigma pembangunan pertanian saat ini harus mengarah kepada pembangunan pertanian berkelanjutan

yang berorientasi terhadap ketahanan dan kemandirian pangan dengan cara memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Persepsi pembangunan pertanian yang sekarang harus merata dan berkeadilan. Pembangunan pertanian harus ditujukan untuk mempersiapkan tani berkemampuan dalam memantapkan proses perubahan struktur yang muncul dari kemampuan petani sendiri, sejalan dengan pembangunan pertanian yang meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama dari pembangunan.

KEBERAGAMAN KOMSUMSI DALAM KETAHANAN PANGAN NTB

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2013-2018 salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunankemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut salah satunya tergantung pada kondisi ketahanan pangan dan gizi wilayah yang tangguh. Untuk itu komitmen Pemprov NTB saat ini didalam upaya mewujudkan ketahanan pangan harus bertumpu pada kemandirian pangan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pertanian daerah.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di provinsi yang menjadi salah satu daerah penopang swasembada pangan nasional ini tidaklah gampang karena terdapat beberapa tantangan yang ada. Beberapa tantangan ketahanan di NTB antara lain adalah (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; (2) ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air; (3) status dan luas kepemilikan lahan; (4) lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; (5) keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya sukubunga usahatani; (6) lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; (7) belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; (8) rendahnya nilai tukar petani (NTP); (9) belum padunya antarsektor dalam menunjang pembangunan pertanian; dan (10) kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian (*Peta Ketahanan Pangan NTB 2015*).

Pengertian diversifikasi pangan mencakup konteks produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan (Suhardjo, 1998). Akan tetapi, dalam tulisan ini pembahasan hanya terfokus

padakonteks konsumsi panganmasyarakat di NTB.Ketahanan pangan yang akan dibangun haruslah berdasarkan kepada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal yangbertujuan untuk meningkatkan keanekaragamanproduksi dan konsumsi pangan lokal yang bergizidan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat NTB. Fakta selama ini, jenis pangan dominan di Indonesia termasuk juga NTB adalahberas. Oleh sebab itu, diversifikasi panganmenjadi salah satu strategi mencapai ketahananpangan (Setiawan, 2012).

Untuk mencapai sasaran keberagaman konsumsi pangan di NTB harus melalui terciptanya pola konsumsi yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang.Pada tingkat kabupaten, menurut klasifikasi WHO, 6 kabupaten di NTB memiliki prevalensi stuntingpada tingkat buruk (30-39 persen), dan 2 kabupaten lainnya memiliki prevalensi stunting padatingkat sangat buruk (>40 persen). Kabupaten yang memiliki angka stunting tertinggi adalahKabupaten Lombok Utara (43,43 persen) dan Bima (41,19 persen). Fakta ini menunjukkan bahwa malnutrisi kronis yang diukur dengan stunting (tinggi badan pendek menurut umur),merupakan permasalahan utama di Indonesia dan sangat tinggi angka stunting di NTB.Prevalensi stunting pada balita tingkat provinsi di tahun 2014 adalah sebesar 36,43 persen(PSG NTB, 2014).

Provinsi NTB memiliki keanekaragaman hayatidan potensi produksi pangan lokal. Namun, selama ini program diversifikasi pertanian yang dilakukan telah membuat masyarakat menjadi ketergantungan pada konsumsi pangan pokok saja yaitu beras. Ketergantungan pangan pokok ini dikhawatirkan suatu saat akan menimbulkan kerawanan pangan ditengah-tengah terdapatnya beberapa tantangan mewujudkan ketahanan pangan yang dihadapi oleh pemerintah NTB. Ketahanan pangan di NTB harus dibangun berdasarkan pada prinsip ketahanan pangan yang memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi, pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh masyarakat NTB untuk memenuhikebutuhan hidup yang sehat dan produktif, sertaupaya diversifikasi konsumsi pangan NTB dapat terjadi jikapendapatan masyarakat meningkat dan produkpangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya.

Kecenderungan konsumsi masyarakat NTB di luar konsumsi pangan utama masih sangat rendah. Konsumsi umbi-umbian baru mencapai 19,0 gram/kapita/hari, dimana kontribusi ubi kayu adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 13,3 gram/kapita/hari. Konsumsi kelompok pangan hewani (ikan, telur, daging unggas, daging ruminansia dan susu) sebesar 118 gram/kapita/hari, masih lebih rendah dari standar konsumsi ideal (150 gram/kapita/hari). Konsumsi kelompok sayur dan buah secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan, namun dari segi kualitas sayur yang banyak dikonsumsi mengandung energi, protein dan karbohidrat yang rendah (golongan A). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang dikonsumsi masyarakat masih berasal dari pangan nabati yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pangan hewani. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat (BKP NTB, 2015).

Penurunan konsumsi pangan lokal ini merupakan paradoks dari kebijakan pangan yang berdampak pada lambatnya capaian diversifikasi konsumsi pangan dan kecenderungan konsumsi pangan yang salah arah. Paradoks kebijakan pangan terlihat dari tumpang tindih dan tidak sinkronnya kebijakan pangan antara satu kebijakan pangan dengan yang lainnya. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang dilakukan di seluruh provinsi termasuk juga di dalamnya Provinsi NTB hanya berdampak pada peningkatan signifikan terhadap alokasi anggaran untuk beras. Sebaliknya, program peningkatan sumber pangan lokal hanya bersifat kegiatan stimulan dengan pengembangan model demonstrasi area.

Untuk mengupayakan keragaman konsumsi pangan masyarakat NTB, semua pihak baik itu pemerintah, swasta, masyarakat harus bekerjasama. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pangan lokal yang berbasis sebagai makanan pokok bukan seperti saat ini yang hanya sebagai makanan cemilan atau kudapan saja. Peluang pengembangan ini juga didukung salah satu oleh adanya UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan yang dalam tujuan utamanya adalah penekanan pada diversifikasi pangan. Selain itu pula Kementerian Pertanian Indonesia

juga melalui Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Kosumsi Pangan, yang salah satu implementasinya adalah berupa kegiatan **One Day No Rice**/ODNR (tidak mengonsumsi beras satu hari/minggu).

Keragaman konsumsi masyarakat NTB saat ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan konsumsi pangan masyarakat beralih ke pola makan instan. Kecenderungan pergeseran pola konsumsi



Sumber foto : <http://haipb.ipb.ac.id>

pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti merebaknya rumah makandengan aneka makanan modern dan cita rasa luarnegeri, yang menyajikan aneka makanan dan minuman dengan suasana nyaman dan bergengsi serta kapitalisasi ekonomi yang merambah sektor pertanian berupa adanya kebutuhan pangan dalam bentuk kemasan yang dipasarkan hingga ke tingkat desa-desa di wilayah NTB.

Akhirnya untuk pengembangan diversifikasi pangan lokal di NTB dapat dilakukan berbagai upaya seperti pemprov NTB dapat memanfaatkan potensi lahan dan kebiasaan konsumsi pangan lokal masyarakat NTB. Manfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal dalam rangkamengantisipasi merebaknya rumah makandengan pangan modern/ impor. Pemetaan produksi setiap pangan lokal di NTB dan pemetaan

jenis pangan lokal yang pernah diproduksi namun saat ini sudah tidak adalagi (musnah) di setiap kabupaten di NTB. Pengembangan diversifikasi pangan dilakukan dengan meningkatkankapasitas produksi setiap pangan lokal disetiap kabupaten melalui peningkatan luaspanen dan produktivitas. Kemudian pangan lokal harus dijadikan snack utama dalam beragam kegiatanbaik yang bersifat kedinasan maupun kegiatan swasta maupun aktivitas lainnya. Selain itu pangan lokal juga dapat dikembangkan melalui upaya berbagai upaya promosi di berbagai media serta mengembangkan outlet-outlet pangan lokal yang ada di setiap kabupaten di NTB termasuk juga di ruang publik seperti pasar-pasar modern, hotel, bandara, dan ruang publik lainnya.

KEDAULATAN PANGAN HARUS MENJADI SKALA PRIORITAS DI NTB

Isu perubahan iklim (*Climate Change*) dewasa ini telah mengalami transformasi dimensi isu dari yang bersifat global menjadi isu strategis nasional (Indonesia), karena perubahan iklim memiliki dampak terhadap ketahanan nasional sebuah negara. Salah satu kekhawatiran terbesar dari perubahan iklim adalah dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia adalah para petani kecil, masyarakat adat dan nelayan tradisional. Karena itu, diperlukan langkah nasional yang menyeluruh untuk mengurangi dampak kolosal perubahan iklim kepada kelompok masyarakat ini. Dalam perspektif kedaerahan, mewujudkan ketahanan pangan memiliki beragam tantangan dimana salah satunya adalah faktor kemiskinan dan kesehatan. Dalam konsep ketahanan pangan terdapat tiga aspek yang sangat penting yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Sebagai salah satu daerah yang telah ditetapkan menjadi daerah penopang swasembada pangan nasional, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara (NTB) memiliki berbagai tantangan guna mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan 4.896.162 jiwa penduduknya. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk NTB diprediksi bertambah 1.38 persen setiap tahun yang harus mendapat perhatian untuk dipenuhi kebutuhan pangannya. Selain pertumbuhan penduduk yang diprediksi akan terus bertambah, tantangan pemerintah provinsi NTB adalah semakin berkurangnya lahan pertanian atau kegiatan alih fungsi lahan akibat dari geliat pertumbuhan ekonomi NTB yang semakin meningkat. Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih dalam rilis (5/2/2018), menyatakan bahwa pada triwulan IV 2017 pertumbuhan ekonomi NTB yang terjadi adalah 7,10 persen tanpa sumbangan sektor pertambangan. Biasanya pertumbuhan ekonomi NTB tanpa tambang berkisar hanya tumbuh 5 persen setiap triwulan.

Pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup signifikan ini juga beresiko terhadap berbagai upaya mewujudkan ketahanan pangan di daerah ini. Proteksi lahan pertanian menjadi sangat lemah disebabkan tekanan yang disebabkan pertumbuhan ekonomi sehingga petani selalu dalam posisi terjepit dan menjadi korban. Dinas Pertanian NTB pada 2016 menyatakan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan seluas 2000 ha sejak tahun 2009-2016. Semakin menyusutnya luas areal pertanian tentunya akan berdampak terhadap penurunan kuantitas produksi pertanian. Hal ini ditandai dengan menurunnya produktivitas pada komoditi pangan yaitu padi pada tahun 2015 sebesar 3,51 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.193.698 ton (BPS NTB, 2017). Laju alih fungsi lahan sebagian besar terjadi pada daerah perkotaan yang berubah fungsi menjadi pertokoan, pusat perbelanjaan dan perumahan. Lemahnya proteksi terhadap lahan pertanian ini seharusnya tidak terjadi karena berdasarkan Perda NTB No. 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di NTB seluas 227.000 hektar.

Selain itu pula, selama ini berbicara tentang ketersediaan pangan, topik pembahasan hanya berkutat pada beberapa komoditi pangan utama saja seperti, beras, jagung, dan kedelai. Fakta di lapangan bahwa ketersediaan pangan di NTB cukup beragam namun, kebijakan provinsi/kabupaten dalam pembangunan pertanian selama ini hanya fokus kepada pengembangan komoditi pangan utama saja. Itulah yang menjadi permasalahannya saat ini ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara tidak langsung telah mempengaruhi pola makan/konsumsi masyarakat menjadi ke arah pola makan instan. Jika pangan sumber karbohidrat non beras, yaitu ubi kayu, ubi jalar, jagung; apalagi tumbuhan liar umbi-umbian, sereal, dan kacang-kacangan di pekarangan, bekas kebun, dan hutan ikut diperhitungkan, soal ketersediaan pangan seharusnya tidak terlampaui menjadi masalah. Masalah yang justru sering lolos dari pengamatan adalah soal keberagaman dalam produksi dan konsumsi pangan, terutama sumber gizi di luar karbohidrat.

Apabila pembangunan pertanian dalam hal ini tentang

ketahanan pangan tidak hanya fokus kepada beberapa jenis sumber pangan saja maka, akses pangan masyarakat akan semakin dekat. Selama ini yang terjadi adalah masyarakat berada dalam hegemoni diversifikasi pertanian berupa berbagai input kimia, benih modifikasi, dan kredit yang bertujuan untuk meningkatkan produksi saja. Namun, yang sering dilupakan adalah akses pangan yang berkualitas dari aspek kesehatan dan gizi. Di dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia, malnutrisi di wilayah ini tergolong tinggi yang diukur dengan Stunting dimana untuk NTB 36,34 persen (*Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Indonesia dan World Food Programme, 2015*). Meningkatkan pemantauan gizi di tingkat kecamatan dan intervensi yang efektif



dan sesuai sasaran dapat untuk mencegah meningkatnya gizi buruk akut.

Kita juga jangan lupa bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki kaitan yang erat yang juga berpengaruh terhadap pada aspek akses pangan masyarakat. Data BPS NTB pada 2017 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Provinsi ini yaitu sebanyak 16,5% yang mengalami penurunan dalam jangka 10 tahun terakhir sekitar 1,06 persen per tahun. Akan tetapi penurunan tingkat kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan tingkat kesenjangan

pendapatan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan. Pada september 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,44% untuk perkotaan dan 75,73 persen untuk pedesaan. Selain itu pula, masalah yang krusial pertanian di NTB adalah jalur distribusi sektor pertanian yang cukup rumit, petani kesulitan akses pasar sehingga mereka menjual melalui para pengepul dengan harga yang murah.

Pemerintah baik itu pada tingkat provinsi/kabupaten sudah harus merubah pola pembangunan pertanian agar upaya mewujudkan ketahanan pangan dapat direalisasikan. Program-program pembinaan terhadap pemanfaatan komoditi pangan lokal sudah harus lebih dikedepankan karena terkait dengan aspek pemanfaatan pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Seperti yang telah disebutkan dalam paragraf ke 4 bahwa banyak sumber-sumber pangan lokal yang dapat dilakukan pengolahan sebagai sumber pangan alternatif pengganti pangan utama saat ini. Pemanfaatan pangan lokal harusnya lebih dikedepankan karena keberadaan dan cara pengolahannya sebagian masyarakat NTB sudah memahaminya, perlu disempurnakan adalah pengolahan yang memiliki kaidah-kaidah kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan pada proses penambahan nilai dari produk pangan lokal tersebut. Adanya penambahan nilai akan memberikan dampak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat miskin. Selain itu pula adanya program pemanfaatan pangan lokal juga secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap akses pasar yang selama ini menjadi kendala pada produk penambahan nilai pangan lokal di daerah ini.

Kebijakan pertanian NTB tidak seharusnya fokus terhadap peningkatan produksi saja melainkan harus juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan ditengah-tengah globalisasi perekonomian dan perubahan iklim yang terjadi.

KESEMERAWUTAN DATA PADA SEKTOR PANGAN

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh setiap manusia. Untuk itu, menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam suatu negara untuk selalu dapat menjaga ketersediaannya, baik itu secara kualitas maupun kuantitas; selain tentunya juga terhadap aspek keterjangkauan akses dan harga. Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun yang terus meningkat tentunya menjadi salah satu faktor bagi pemerintah didalam mengambil kebijakan yang terkait dengan isu ketahanan pangan. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk dunia yang dikeluarkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), pada tahun ini (2018) diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 266,927,712 jiwa.

Lonjakan jumlah penduduk Indonesia ini tentunya juga merupakan tantangan untuk mewujudkan Visi Kedaulatan Pangan Nasional 2014-2024. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di dalam acara “Jakarta Food Security Summit” (8/3/2018) dimana tantangan pada sektor pangan salah satunya dipengaruhi oleh lonjakan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi kebutuhan pangan yang semakin bertambah seiring pertamabahan jumlah penduduk adalah melalui upaya meningkatkan produktivitas komoditas pangan serta merealisasikan swasembada pangan. Ikhtiar ini tentunya pula tidak segampang mengembalikan telapak tangan karena kondisi riil di lapangan yang selalu berubah seiring dengan adanya fenomena perubahan iklim serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah yang secara tidak langsung menyebabkan alih

fungsi lahan pertanian.

“Keterbatasan” upaya pada beberapa instrumen kebijakan yang terkait dengan produktivitas pangan tentunya menjadi perhatian pemerintah sehingga, impor pangan menjadi salah satu kebijakan yang tidak populer dilakukan oleh pemerintah kita. Sayangnya, kebijakan impor pada komoditas pangan ini juga tidak selamanya dilandaskan kebutuhan riil yang disebabkan oleh perbedaan data yang dimiliki oleh infrastruktur pemerintahan kita. Salah satu contohnya dan masih hangat adalah kebijakan pemerintah melalui Peraturan Kementerian Perdagangan No. 1 Tahun 2018 Tentang Impor Beras. Kebijakan Permendag ini memuat tentang pemberian izin impor beras kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Indonesia sejumlah 500.000 ton.



Kebijakan ini tentunya bertolak belakang dengan data jumlah stok beras yang tersedia. Kementerian Pertanian RI melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumadjo Gatot Irianto mengatakan saat ini stok beras per 18 Mei 2018 mencapai 1.295.333 ton. Angka tersebut dinilai masih mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat. Data ini juga diimbangi oleh penyerapan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog sebesar 15 ribu ton per hari. Penyerapan ini masuk dalam kategori tinggi apalagi ditambah lagi dengan panen yang akan terus berlangsung di beberapa daerah sepanjang tahun ini.

Pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa bisa terjadi perbedaan data pangan secara diametral antara dua kementerian

yang sama-sama bersinggungan dengan urusan pangan dalam negeri? Bukankah sebelum data dirilis secara resmi sudah dilakukan sinkronisasi data antar kementerian terkait kebijakan pangan?

Data adalah sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran penerima data tersebut. Oleh sebab itu, data perlu diolah

terlebih dahulu menjadi informasi agar dapat diterima oleh penerima. Oleh sebab itu, sejatinya informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah harus terlebih dahulu melalui proses pengolahan dan persamaan pemahaman antara instansi yang terkait, yang dalam hal ini adalah pada sektor pangan. Informasi yang diberikan oleh pemerintah haruslah berupa keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis atau kesimpulan. Tidak seperti saat ini yaitu mengenai ketidaksinkronan data antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian terkait dengan dasar kebijakan impor beras.



Berdasarkan UU Nomor 16

Tahun 1997 Tentang Statistik serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik maka, data yang menjadi acuan dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah adalah menjadi tugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Perbedaan data pangan yang dimiliki oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap kebijakan pada sektor pangan dan tentunya juga terhadap upaya peningkatan kesejahteraan kaum tani di negara ini. Kenaikan harga beras yang tinggi belakangan ini sedikit tidak dipengaruhi oleh tidak validnya data pendukung sebagai

acuan pemerintah mengambil keputusan/kebijakan. Persoalan data ini juga menjadi temuan Ombudsman RI yang menyatakan bahwa data mengenai perkiraan luas panen dan produksi beras oleh Kementan RI tidak menyertai jumlah dan sebaran beras secara riil di lapangan.

Data pertanian yang tidak sinkron antar lembaga pemerintah maupun data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan akan mengurangi kualitas kebijakan pertanian yang mengacu pada data tersebut. Ketidakakuratan data pertanian ini juga telah sering disuarakan, mengingat bahwa ketidakakuratan data pangan menjadi salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan di negeri ini. Kelemahan dari data pangan selama ini disebabkan antara lain adalah panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga pusat yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data. Selain itu pula, parameter pembangambilan sampling yang sudah ketinggalan zaman, ketidakcermatan enumerator (pengambil data), dan juga ketidakakuratan jawaban dari narasumber menjadi faktor ketidakakuratan data.

Sejatinya data merupakan pijakan awal bagi pemerintah didalam merumuskan kebijakan. Kalau datanya tidak sinkron antar lembaga pemerintah, kebijakan antar lembaga bisa jadi akan tumpang-tindih, bahkan kontradiktif. Sehingga, kelemahan data yang terjadi pada pemerintah seringkali dimanfaatkan oleh para pemburu rente, dimana mereka akan berupaya untuk mempengaruhi oknum-oknum aparatur pemerintahan yang berwenang agar dapat bermain di pasokan dan distribusi. Selain itu, peran Bulog yang belum optimal dalam menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras juga seringkali dimanfaatkan oleh para spekulan.

Kembali lagi terkait dengan kebijakan impor beras tahun ini dimana Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution juga membenarkan bahwa masih terdapat kendala pada keputusan impor beras tahun ini. Sebab, data beras antar instansi masih memiliki perbedaan angka meskipun sudah menggunakan peta digital. Persoalannya sebetulnya datanya sendiri itu masih ada perbedaan antara satu instansi dengan yang lain. Senada

dengan Darmin Nasution, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah mengantongi empat temuan dalam kebijakan impor yang bersumber dari persoalan akurasi data. Pada Kementerian Perdagangan terdapat temuan antara lain mencakup persoalan data konsumsi beras nasional yang dinilai tidak akurat, sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel, data luas lahan tidak akurat, serta belum ditetapkannya angka cadangan pangan ideal pemerintah. Sedangkan pada Kementerian Pertanian, BPK menyoroti terkait dengan kebijakan pertanian dan data hasil produksi.

Kebijakan impor yang merugikan memberi dampak pada penurunan kesejahteraan petani Indonesia. Salah satu permasalahan pelik mengakibatkan petani melakukan gali lubang dan tutup lubang dengan cara mengajukan pinjaman ke tengkulak disertai bunga tinggi dan sistem ijon atau pembayaran menggunakan hasil panen yang dihargai murah (Praditiya, 2013). Sistem pinjaman tengkulak atau ijon ini lah yang membuat petani sulit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Terlebih dengan merosotnya harga Gabah Kering Panen (GKP) kualitas premium selama Februari 2018 sebesar 3,7% menjadi Rp.5.305,-/ Kg dalam data BPS (Arieza, 2018). Hal tersebut berakibat pada terjadinya degenerasi petani atau keengganan anak-anak petani untuk menjadi petani hingga harapan petani agar anaknya tidak mengikuti jejak mereka. Dampaknya, jumlah petani pun lambat laun kian berkurang seiring dengan menurunnya hasil produksi padi dari masyarakat Indonesia.

Ketidakpastian dalam memperoleh kesejahteraan dari sektor pertanian telah menyebabkan regenerasi pada sektor ini menjadi terhambat ditambah lagi apabila kebijakan impor pangan masih sering dilakukan oleh pemerintah maka, tidak heran apabila angka urbanisasi terus meningkat. Menurut data BPS, 44% angkatan kerja di Indonesia adalah petani. Konversi lahan pertanian pun membayangi Indonesia untuk menjadi negara yang swasembada pangan. Kemungkinan semakin rendahnya produksi hasil pertanian pun semakin memperbesar diambilnya kebijakan impor apabila terjadi krisis padi kembali. Mereka yang memiliki

keterbatasan kemampuan dan tidak dapat beralih profesi hanya akan menjadi buruh tani di lahan yang dulu mereka pernah miliki atau menjadi buruh tani di lahan-lahan pertanian di sekitar tempat tinggal mereka. Apabila hal tersebut terjadi maka praktek petani membeli beras dari padi yang mereka tanam sendiri akan semakin menghiasi kehidupan petani di Indonesia.

Untuk itu pemerintah diharapkan dapat lebih jeli melihat dampak-dampak dari kebijakan yang diambil dalam sektor pertanian seperti kebijakan impor yang berpotensi memiliki dampak panjang dan berskala makro. Pentingnya sektor pertanian disebutkan oleh Presiden Soekarno bahwa pangan adalah perkara hidup matinya sebuah bangsa (Halim, 2017). Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan kalangan petani di Indonesia minimal untuk meningkatkan kesejahteraan para petani memenuhi kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan perut diri dan keluarganya.

Salah satu usaha pemerintah adalah bagaimana menciptakan dan menggunakan satu data yang bersumber dari data yang akurat sebagai bahan pijakan untuk merumuskan suatu kebijakan untuk mendukung kedaulatan pangan. Target untuk tidak impor beras pada tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi akhirnya meleset akibat dari kebijakan impor beras yang dilakukan walaupun itu dengan niat untuk menstabilkan harga beras di pasar namun, kebijakan yang dikeluarkan bertolak dengan momentum menjelang panen raya yang diakibatkan oleh ketidakakuratan data antar lembaga yang ada.

KETAHANAN PANGAN SEBAGAI KOMODITI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB (BPS NTB:2017) jumlah penduduk NTB pada tahun 2016 adalah 4.896.162 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini juga tentunya akan dibarengi dengan upaya pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup. Berbicara mengenai ketersediaan pangan sebenarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki beragam potensi ketersediaan pangan yang mampu menunjang terwujudnya ketahanan pangan masyarakat. Potensi pangan yang dimiliki juga banyak diminati pasar baik lokal, regional, maupun ekspor yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap kebutuhan pangan, sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk, per kapita dan nilai ekonomi di masyarakat yang meningkat.

Berbicara ketahanan pangan saat ini masih merupakan pokok bahasan yang strategis karena mencakup nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, diperlukan upaya penyelarasan yang seimbang dari ketiga dimensi nilai-nilai tersebut. Penyelarasan antara kepentingan peningkatan produksi terhadap tingkat kesejahteraan petani dengan prinsip pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat harus tetap dikedepankan guna mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan harus dilakukan dengan mengembangkan sumber-sumber pangan yang dimiliki, kelembagaan pangan, serta kekayaan budaya pangan yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tentunya akan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat lokalitu sendiri. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan adalah melakukan kolaborasi lintas sektoral seperti pengembangan wisata

agro yang sangat potensial dikembangkan di daerah ini.

Pengembangan sektor pertanian dengan pariwisata ini memiliki beberapa kelebihan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan. Wisata agro dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi berbagai pihak. Objek wisata agro merupakan objek wisata alternatif yang mendukung program green economy. Selain itu, objek wisata agro juga dapat menjadi objek pendidikan terutama anak-anak untuk lebih mengenal alam. Wisata agro juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi dari komoditi potensial yang memiliki keunggulan dan memiliki daya saing dimana, Pulau Lombok mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal produk pertanian unggulan.

Hasil survey yang dilakukan Lombok Research Center (LRC) permintaan satu hotel saja di Pulau Lombok untuk kebutuhan buah Semangka tanpa biji dan buah Melon madu dalam seminggu masing-masing itu minimal 100 kg. Itu baru satu hotel saja belum lagi ditambah dengan permintaan Rumah Makan serta Rumah Tangga. Tingginya angka permintaan terhadap komoditi ini belum dapat dipenuhi oleh petani kita karena ketiadaan informasi padahal Pulau Lombok terutama daerah bagian Selatan memiliki potensi yang menjanjikan untuk pengembangan komoditi tersebut. Tingginya permintaan komoditi hortikultura dari pelaku industri pariwisata adalah sebuah peluang yang menjanjikan untuk dilakukan pengembangan di daerah ini karena sebagian besar dari permintaan itu dapat dipenuhi dari daerah tanpa harus mendatangkan dari luar daerah.

Keterbatasan akses pasar maupun informasi menjadi hambatan bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan petani di daerah ini. Diperlukan sinergitas semua pihak terutama pemerintah daerah untuk lebih peka menangkap peluang yang terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Hasil survey LRC juga menemukan kenyataan bahwa selama ini produk-produk unggulan yang ada di Pulau Lombok keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja yaitu para pemodal yang

memiliki kuasa untuk mempermainkan harga di tingkatan petani. Tidak heran apabila kemiskinan masih didominasi oleh penduduk yang berada di pedesaan dan sebagian besarnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Apabila pengembangan komoditi unggulan yang ada pada masing-masing daerah di Pulau Lombok dengan memanfaatkan peluang yang ada dapat dilaksanakan maka, akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan penduduknya serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang selama ini cukup tinggi. Tingkat ketahanan pangan selama ini dipengaruhi salah satunya oleh faktor tingkat kesejahteraan masyarakat, Untuk itu, pengembangan komoditi potensial yang memiliki keunggulan harus mulai dikembangkan mengingat pasar untuk itu sudah tersedia.

Keberadaan BUMDes dan BUMD haru mampu menjadi solusi selain peran dari dinas terkait dan berbagai stakeholder lainnya. Memutus rantai harga yang terlalu panjang saat ini dapat dilakukan oleh BUMDes dan BUMD dengan cara menampung semua hasil produksi petani untuk kemudian menjualnya langsung ke konsumen ataupun korporasi lainnya sehingga, terwujud kepastian harga yang menguntungkan semua pihak. Selain itu pula, pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis yang ada sudah harus mulai melakukan pemberdayaan serta pengembangan komoditi unggulan dengan cara memberikan pelatihan kepada petani kita sebagai sarana penguatan kapasitas serta berbagi pengetahuan teknologi yang terbaru dan terbaru.

Sentralisasi pengembangan komoditi juga perlu dilaksanakan karena hal ini terkait dengan upaya keseimbangan harga yang diakibatkan oleh ketersediaan barang lebih banyak dibandingkan dengan permintaan. Upaya ini sangat penting karena kebiasaan petani di daerah ini adalah masih memiliki budaya follow the trading.

KAJIAN KOMPOSISI MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TEMBAKAU VIRGINIA LOMBOK

PENDAHULUAN

Tembakau rakyat (*Nicotiana tabacum* Linn.) merupakan salah satu tanaman semusim yang mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan industri rokok di Indonesia. Hasil produksi tembakau rakyat merupakan bahan baku industri rokok kretek dan rokok putih (sigaret). Dari industri rokok ini tembakau memberikan sumbangan yang sangat besar bagi devisa negara. Sumbangan untuk devisa Negara sebesar Rp 3 trilyun pada tahun 1995 berasal dari cukai rokok (Anonim, 1996).

Besarnya sumbangan devisa ini menjadikan tanaman tembakau sebagai tanaman budidaya yang relatif cukup penting. Namun dalam perkembangannya, kebutuhan bahan baku tembakau untuk industry rokok mengalami perkembangan yang tidak seimbang antara permintaan dan hasil produksi. Produksi tembakau yang dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan tembakau dalam negeri, sehingga untuk memenuhinya diimpor tembakau dari luar negeri.

Besarnya produksi nasional yang dicapai pada tahun 1995 sebesar 14.169 ton dengan luas areal 220.944 ha, kebutuhan tembakau dalam negeri pada tahun tersebut sebesar 188.086 ton. Kekurangan kebutuhan tembakau dipenuhi dengan impor tembakau dari Amerika, China dan Jerman. Besarnya impor tembakau berkisar 22.339 ton.

Data tersebut menunjukkan masih tingginya kebutuhan tembakau guna pemenuhan kebutuhan tembakau dalam negeri. Besarnya nilai impor tersebut menapai 22% dari produksi nasional.

Dengan demikian perlu adanya peningkatan produksi tembakau yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan tembakau dalam negeri yang masih tinggi (Anonim, 1996).

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah terbesar penghasil tembakau virginia yang sudah dibudi daya sejak lebih dari 40 tahun lalu dan sekarang tercatat sebanyak 12.714 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan mencapai 34 ribu hektare tersebar dominan di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.

Tembakau Virginia termasuk salah satu komoditi pertanian strategis untuk Pulau Lombok dan usaha tani tembakau merupakan usaha tani yang sangat intensif dengan masukan tinggi pada lahan sawah yang tersebar luas di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Sebagai gambaran pentingnya komoditi ini, Pulau Lombok merupakan penghasil tembakau Virginia berkualitas tinggi yang mempunyai peran penting dalam memasok kebutuhan tembakau Virginia Indonesia sejak tahun 1968. Data tahun (2002) menunjukkan bahwa 25.000 ton (59%) dari kebutuhan tembakau Virginia Indonesia dipasok dari Pulau Lombok (Disbun NTB, 2001)

Pada lima tahun terakhir perluasan areal dan intensifikasi usaha tani tembakau Virginia meningkat pesat dan tahun 2011 luas tanam meningkat hampir dua kali lipat (mencapai 14 000 ha) dari areal lahan potensial yang diperkirakan seluas 26.000 Ha di Pulau Lombok. Dari tahun 1990 sampai 2010 produktivitas meningkat tajam dari 1,54 ton/ha meningkat menjadi 2 ton/ha (Disbun NTB, 2001). Namun pada musim tanam tahun 2011 telah diamati terjadinya gejala penurunan produksi tembakau yang berarti. Selanjutnya hasil catatan petugas lapangan PT. Sadhana Arifnusa menunjukkan bahwa di beberapa tempat tampak adanya serangan jamur akar. Hasil diskusi dengan sebagian besar petugas lapangan karyawan PT. Sadhana Arifnusa dan petani mitranya menyimpulkan bahwa penyebab serangan jamur akar diduga kuat terkait dengan penurunan produktivitas tanah khususnya terjadinya penurunan pH tanah. Hasil pengukuran pH tanah dari 25 contoh tanah yang diambil dari lokasi-lokasi serangan jamur

akar tersebut menunjukkan adanya penurunan pH tanah yang cukup berarti dari pH tanah yang rata-rata sebelumnya sekitar 6-6,5 menjadi rata-rata 4,7-5,6 (Hendro dan Suwardji, 2002).

Untuk meningkatkan mutu tembakau berbagai cara telah dilakukan antara lain dengan pemanfaatan teknologi pertembakauan yang ada. Salah satu cara tersebut antara lain dilakukan dengan pengelolaan bibit tembakau sehingga diperoleh bibit yang bermutu. Menurut Jumin (1991) pada awal budidaya atau pembibitan perlu penambahan unsur hara mineral yang cukup agar bibit tumbuh lebih baik.

Usaha tersebut dilakukan dengan penambahan pupuk organik, karena pupuk organik banyak mengandung unsur-unsur mineral makro dan mikro yang banyak dibutuhkan tanaman waktu muda. Salah satu unsur makro tanah yang sangat menunjang perakaran bibit tanah adalah unsur makro P (phospor). Unsur ini sangat membantu dalam pembentukan daun lebih tebal, perakaran tumbuh lebih kuat dan mendorong tingkat pemasakan daun tembakau lebih cepat serta merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media tanam yang ideal bagi tanaman tembakau Virginia pulau Lombok, khususnya Kabupaten Lombok Tengah.

METODE

Pelaksanaan penelitian di Rumah Kaca dan Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Waktu penelitian mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2013.

Pelaksanaan Penelitian

1. Tahap awal penelitian ini akan melakukan analisis kandungan unsur hara pada media tanaman pembibitan. Selanjutnya baru dilakukan penanaman bibit.
2. Pemupukan
Pupuk NPK dan SP36 diberikan ke dalam polybag pada saat pencampuran media dan pada saat tanaman berumur 15 hari.
3. Pengamatan
Pengambilan sampel dari 25 tanaman sampel dalam polybag kemudian diamati pada saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam (HST).

Parameter pengukuran

Parameter Media

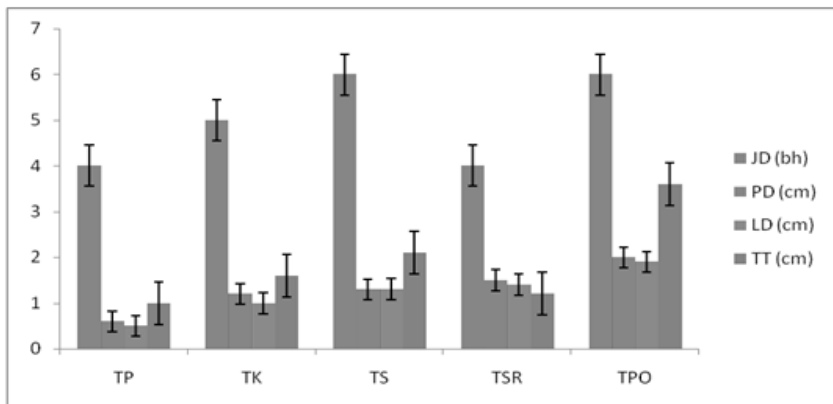
1. Kandungan Bahan Organik Media
2. Kandungan Nitrogen Media
3. Kandungan Phospor Media

Parameter Tanaman

1. Tinggi, diukur dari permukaan tanah sampai daun tertinggi (cm)
2. Lebar daun, diukur melintang dari tepi kedua tulang daun (cm)
3. Panjang daun, diukur dari ujung sampai pangkal daun (cm)
4. Jumlah daun, dihitung banyaknya daun per tanaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

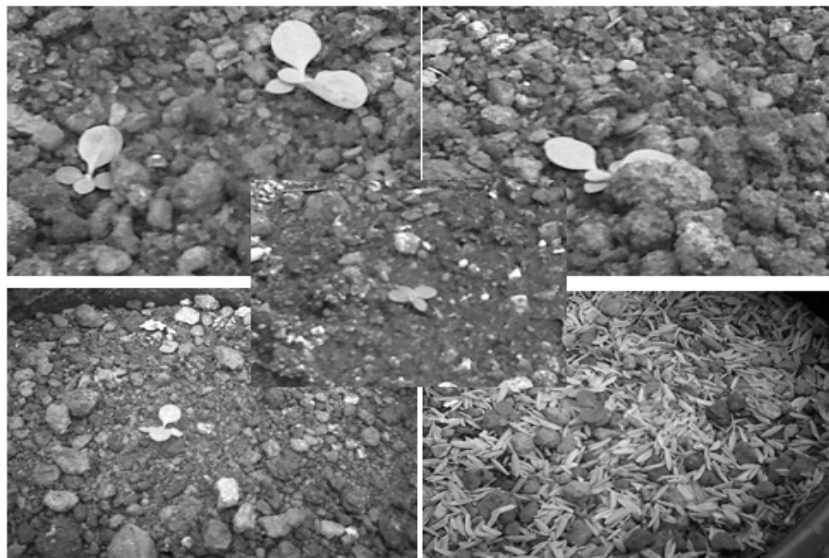
Pertumbuhan Vegetatif Benih Tembakau



Gambar 1. Jumlah daun (JD), Panjang Daun (PD), Lebar Daun (LD) dan Tinggi Tanaman (TT) pada 15 HST.

Pada gambar di atas dapat dilihat pertumbuhan bibit tanaman tembakau pada umur 15 hari setelah tanam (HST) mengalami perbedaan berdasarkan media tanamnya. Untuk jumlah daun yang terbanyak terdapat pada media tanam campuran pupuk kandang + tanah + pasir (TPO) dan sekam + tanah + pasir (TS) dengan jumlah 6 buah. Yang paling sedikit jumlahnya yaitu pada media tanam tanah + pasir (TP) dan tanah yang dicampur dengan serbuk gergaji (TSR) dengan jumlah daun 4 buah.

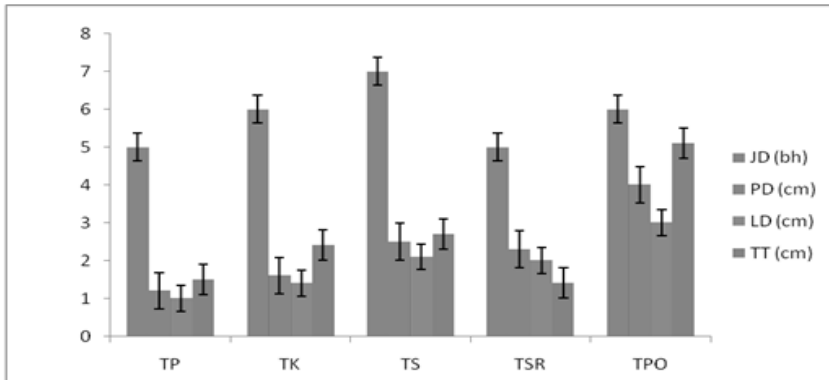
Jumlah daun yang banyak akan diikuti dengan panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman. Bibit tanaman tembakau yang tertinggi terdapat pada perlakuan TPO dengan tinggi 3,6 cm. Sedangkan yang terpendek pada perlakuan media tanam TP dengan tinggi tanaman 1 cm.



Gambar 2. Pertumbuhan Bibit Tanaman Tembakau pada 15 HST pada berbagai media tanam.

Panjang daun bibit tembakau juga berbeda dengan adanya perbedaan media tanam. Panjang daun pada media tanam tanah dicampur dengan pupuk organik (TPO) adalah yang terpanjang yaitu 2 cm, untuk yang terpendek yaitu pada media tanam tanah dicampur dengan pasir (TP) yaitu 0,6 cm. Panjang daun akan diikuti oleh lebar daun, jika daunnya panjang maka lebar daunnya juga akan semakin meningkat. Ini terlihat pada perlakuan TPO yang memiliki panjang daun yang terpanjang akan diikuti oleh lebar daun yang ter besar juga yaitu 1,9 cm. Begitu juga dengan lebar daun yang terpendek terdapat pada media tanah dicampur dengan pupuk (TP) yaitu 1 cm.

Untuk pertumbuhan bibit tembakau pada 20 hari setelah tanam (HST) disajikan pada gambar 3 dibawah ini.

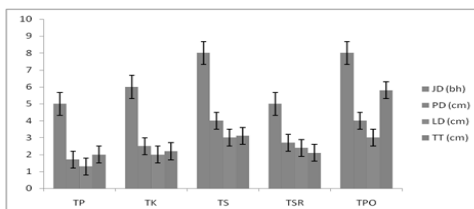


Gambar 3. Jumlah daun (JD), Panjang Daun (PD), Lebar Daun (LD) dan Tinggi Tanaman (TT) pada 20 HST.

Pada gambar 3. diatas terlihat perbedaan pertumbuhan bibit tembakau yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah daun, namun tidak diikuti dengan peningkatan panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman. Untuk bibit tembakau yang memiliki jumlah daun terbanyak terdapat pada media tanam TS yaitu 7 buah dan yang terkecil yaitu pada media tanam TP dan TSR yaitu 5 buah. Akan tetapi jumlah daun yang terbanyak tidak diikuti dengan adanya peningkatan panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman. Lebar daun, panjang daun dan tinggi bibit tanaman tembakau yang tertinggi terdapat pada perlakuan TPO yaitu dengan LD 3 cm, PD 4 cm dan TT 5,1 cm. Sedangkan untuk panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman yang kecil yaitu pada perlakuan tanah dicampur dengan pasir (TP) dengan PD 1,2 cm, LD 1 cm dan tinggi tanaman 1,5 cm.

Pertumbuhan vegetatif bibit tanaman tembakau pada 25 hari setelah tanam (HST) disajikan pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. menunjukkan adanya peningkatan jumlah daun akan mempengaruhi pertumbuhan panjang daun, lebar daun



Gambar 4. Jumlah daun (JD), Panjang Daun (PD), Lebar Daun (LD) dan Tinggi Tanaman (TT) pada 25 HST.

dan tinggi tanaman bibit tembakau. Pertumbuhan bibit tanaman tembakau menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada media tanam TPO. Pada media tanam TPO dan TS sama-sama memiliki jumlah daun 8 buah. Namun pada media tanam TS tidak diikuti dengan peningkatan panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman seperti pada media tanam TPO. Pada media tanam TPO memiliki panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman yang paling meningkat pesat dengan PD 4 cm, LD 3 cm dan TT 5,8 cm. Untuk panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman yang terendah masih terdapat pada media tanam TP yaitu dengan PD 1,7 cm, LD 1,3 cm dan TT 2 cm.

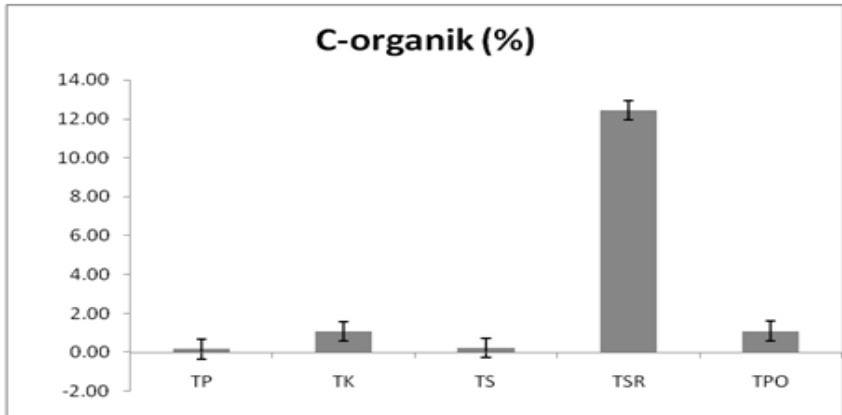


Gambar 5. Pertumbuhan Bibit Tanaman Tembakau pada 25 HST, pada berbagai media tanam.

Sifat Kimia Media Tanam

Kandungan Bahan Organik Media Tanam

Beberapa sifat kimia media tanam seperti C organik/bahan organik, N total dan P tersedia disajikan pada Gambar 6, gambar 7 dan gambar 8 dibawah ini.



Gambar 6. Kandungan C-organik (%) media tanam benih tembakau.

Pada gambar 4 terlihat bahwa, perbedaan media tanam pertumbuhan bibit tembakau akan berpengaruh terhadap perbedaan kandungan C-organik. Kandungan C-organik media tanam yang tertinggi terdapat pada perlakuan tanah dicampur dengan serbuk gergaji (TSR) yaitu 12,45 %. Untuk kandungan C-organik yang terendah terdapat pada perlakuan tanah yang dicampur pasir (TP) yaitu 0.18%. Kandungan C-organik di dalam tanah akan mempengaruhi tingkat kesuburan dari tanah.

Bahan organik merupakan perekat butiran lepas dan sumber utama nitrogen, fosfor dan belerang. Bahan organik cenderung mampu meningkatkan jumlah air yang dapat ditahan di dalam tanah dan jumlah air yang tersedia pada tanaman. Akhirnya bahan organik merupakan sumber energi bagi jasad mikro. Tanpa bahan organik semua kegiatan biokimia akan terhenti (Doeswono, 1983).

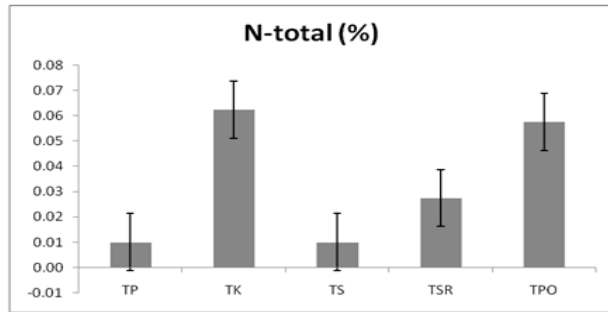
Bahan organik memainkan beberapa peranan penting di

tanah. Sebab bahan organik berasal dari tanaman yang tertinggal, berisi unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Bahan organik mempengaruhi struktur tanah dan cenderung untuk menjaga menaikkan kondisi fisik yang diinginkan. Hewan-hewan tanah tergantung pada bahan organik untuk makanan dan mendukung kondisi fisik yang diinginkan dengan mencampur tanah membentuk alur-alur. Sejak perang dunia ke dua, terdapat suatu peningkatan yang besar hasil tanaman pada beberapa negara. Hasil tanaman yang lebih besar terutama dimana hanya biji-bijian saja yang dipanen, sisa - sisa tanamna lebih banyak dikembalikan ke lahan dan disini lebih banyak penutupan oleh tanaman selama musim pertumbuhan.

Kandungan bahan organik sangat berperan dalam meningkatkan ketersediaan P. Peranan bahan organik terjadi melalui hasil dekomposisinya berupa asam-asam organik yang akan mengalami deprotonisasi sehingga akan terbentuk anion organik (gugus fungsional) seperti karboksil ($R-COOH$), hidroksi fenolik ($R-COH$), hidroksi alkoholik, dan keton ($C=O$). Melalui anion atau gugus fungsional tersebut, bahan organik dapat bereaksi dengan ion logam dan akan menggantikan kedudukan anion fosfat dengan cara bereaksi dengan kation logam seperti Al, Fe, Ca, dan Mg membentuk senyawa kelat, sehingga dapat mengurangi reaktivitas Al, Fe, Ca, dan Mg terhadap P. Selain itu, humus dapat membentuk ikatan dengan permukaan kalsium karbonat sehingga dapat mengurangi daya jerap $CaCO_3$ terhadap fosfor (Stevenson, 1982; Tisdale dkk., 1984). Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Hu, Li, dan He (2002) yang menyimpulkan bahwa asam organik dapat meningkatkan kelarutan P dalam tanah.

Kandungan Nitrogen Media Tanam

Kandungan nitrogen media tanaman pembibitan tembakau dengan berbagai macam media tanam disajikan pada gambar 7 dibawah ini.



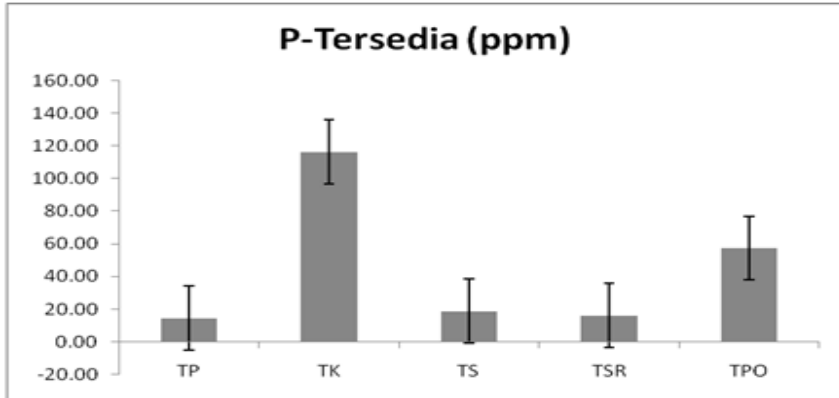
Gambar 7. Kandungan N-total (%) media tanam benih tembakau.

Gambar 7. Menunjukkan perbedaan media tanam akan menyebabkan kandungan N-total dalam media juga akan berbeda. Media tanam yang yang tertinggi kandungan Nitrogennya terdapat pada media tanah yang dicampur dengan kompos (TK) dan media tanah yang dicampur dengan pupuk kandang (TPO) yakni 0.06%. untuk media pembibitan yang yang kandungan nitrogennya terendah terdapat pada perlakuan tanah dicampur dengan pasir (TP) yakni 0.01%.

Nitrogen yang diserap oleh akar tanaman tersedia dalam dua bentuk yaitu ion nitrat (NO_3^-) dan ion ammonium (NH_4^+). Pada pertumbuhan vegetative tanaman, kecukupan suplai nitrogen akan memacu tanaman untuk membentuk daun yang memiliki helaian lebih luas dengan kandungan khlorofil yang lebih tinggi, sehingga tanaman mampu menghasilkan asimilat dalam jumlah yang cukup untuk menopang pertumbuhan vegetative. Sebaliknya tanaman yang mengalami defisiensi nitrogen membentuk daun-daun yang lebih kecil, gangguan produksi enzim, tubuh tanaman kerdil, daun muda berwarna hijau pucat, dan daun tua mengalami khlorosis yang diikuti dengan nekrosis dan gugur (John, 1998). Pada kondisi kelebihan nitrogen tanaman cenderung mensintesis senyawa-senyawa N organik seperti amida, amina, asam-asam amino yang membutuhkan banyak atom C (karbon) untuk membentuk rantai kerangka karbon. Akibatnya pembentukan jaringan penguat seperti selulosa dan lignin menjadi terganggu.

Kandungan Phospor Media Tanam

Kandungan fosfor media tanaman pembibitan tembakau dengan berbagai macam media tanam disajikan pada gambar 8 dibawah ini.



Gambar 8. Kandungan P-tersedia (ppm) media tanam benih tembakau.

Gambar 8. menunjukkan bahwa kandungan fosfor media tanam akan berbeda dengan perbedaan campuran media tanam. Media tanam yang tertinggi kandungan fosfornya terdapat pada media tanah yang dicampur dengan kompos (TK) yakni 116,34 ppm. untuk media tanam yang terendah kandungan fosfornya yakni media tanam tanah yang dicampur dengan pasir (TP) yakni 14.61 ppm.

Fosfor (P) merupakan salah satu unsur hara pokok (essensial) yang dibutuhkan oleh tanaman (Thompson dan Troeh 1982; Mengel dan Kirkby, 2001; Marschner, 2002). Untuk menunjang pertumbuhan tanaman yang optimal, P di dalam tanah harus terus dijaga ketersediaannya dan keseimbangannya baik dalam hal jenis maupun jumlahnya. Ketidakseimbangan P di dalam tanah, dapat menyebabkan terjadinya kekahatan. Tanaman yang mengalami kekahatan P akan terhambat pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga hasilnya rendah. Hal ini disebabkan oleh terganggunya pasokan P dari dalam tanah (Mengel dan Kirkby, 2001; Marschner, 2002). Berkaitan dengan hal tersebut, mengetahui status unsur hara P dalam tanah menjadi sangat penting untuk dapat menentukan

secara tepat jumlah P yang dibutuhkan oleh tanaman.

Di alam fosfor umumnya berbentuk fosfat. Di dalam tubuh tanaman fosfor berperan dalam hampir semua proses reaksi biokimia. Peran fosfor yang istimewa adalah pada proses penangkapan energy cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energy biokimia. Fosfor merupakan komponen penyusun membrane sel tanaman, penyusun enzim-enzim, penyusun koenzim, nukleotida, sintesis protein terutama yang terdapat pada jaringan hijau. Fosfor juga mempunyai peran dalam memperbaiki pertumbuhan akar tanaman. Densitas (kerapatan) akar dapat distimulasi oleh fosfor terutama memacu pertumbuhan memanjang akar lateral. Defisiensi fosfor mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil, pertumbuhan luas daun terhambat serta menghambat pembelahan dan pembesaran sel.

Tumbuhan membutuhkan fosfor pada semua tahap dalam perkembangannya. Kebutuhan fosfor paling besar adalah pada saat pembentukan biji dan perkembangan awal. Jika ketersediaan fosfor terbatas, fosfor akan ditranslokasikan dari jaringan tua ke jaringan muda pada tumbuhan, seperti daun, akar, dan titik-titik tumbuh lain. Tumbuhan yang kekurangan fosfor memiliki akar yang lemah dan memiliki daun yang berukuran kecil, gelap, dan berwarna abu-hijau. Daun tua yang berada di dasar tangkai berwarna kuning terang. Daun yang berada tepat diatas daun tua tersebut berwarna hijau tua. Urat daun berwarna cokelat pada daun dewasa.

PEMBAHASAN

Hasil analisis dari gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa pada umur 15 HST tanaman belum maksimal dalam menyerap unsur hara. Tetapi setelah tanaman berumur 20 HST sampai dengan 25 HST proses fotosintesis dan transpirasi berjalan secara maksimal dan dengan perakaran yang baik maka tanaman akan menyerap air dan unsur hara secara maksimal juga. Oleh karena ketersediaan unsur hara dari pupuk organik dan anorganik pada berbagai level dosis tersebut berbeda maka perbedaan pengaruh secara nyata baru terjadi setelah tanaman berumur 20 sampai

dengan 25 HST.

Pertumbuhan tanaman, merupakan proses peningkatan jumlah sel, ukuran sel dan deferensiasi sel (Gardner, et.al., 1985). Dikatakan pula bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh kegiatan meristen tanaman yaitu meristem ujung, meristem interkalan dan meristem lateral. Meristem ujung merupakan jaringan-jaringan sel tanaman yang menghasilkan sel-sel baru diujung akar dan bagian tunas, sehingga membentuk tanaman bertambah tinggi dan panjang. Meristem interkalar merupakan jaringan sel yang terkait dengan pemanjangan sel dan meristem lateral menghasilkan sel-sel baru yang meperluas organ tanaman terutama daun.

Menurut Gardner et.al., (1985) pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal (genetis) dan faktor eksternal (lingkungan). Faktor eksternal terdiri dari iklim, edafik dan biologis, sedangkan faktor internal terdiri dari ketahanan terhadap faktor eksternal, laju fotosintesis, respirasi, pembagian hasil asimilasi, aktifitas enzim, diferensiasi dan tipe meristem. Pertumbuhan dapat berlangsung bila disertai penyerapan air dan N, sedangkan deferensiasi sel dapat berlangsung apabila terpenuhinya ketersediaan hasil fotosintesis dan temperatur yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada gambar 3, diketahui bahwa pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun dan panjang daun pada media media tanah yang dicampur dengan pupuk organik (TPO) lebih baik dibanding media tanam yang lainnya yaitu TP, TS, TSR dan TK. Walaupun jumlah daun pada 25 HST pada kedua media tanam yaitu TS dan TPO akan tetapi pertumbuhan tanaman bibit tembakau mengalami perbedaan dan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat pada media tanam TPO.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendromono (1998). Pada penelitian tersebut bibit ditanam sampai umur 40 HST sejak penanaman benih pada media gergajian kayu kelapa, sabut kelapa dan campuran 50 % gambut dengan serbuk gergajian kelapa. Namun pada media gambut dan campurannya dengan sabut

kelapa, pertumbuhan tinggi dan bobot kering sesuai dengan indeks mutu yaitu dua kali lebih tinggi dibandingkan tanah mineral. Hal ini berarti media organik lebih baik sebagai media pertumbuhan bibit dibandingkan tanah mineral.

Sesuai mekanisme dan proses pertumbuhan secara fisiologis tumbuhnya benih memiliki keeratan hubungan dengan aspek tersedianya hara. Pada awal pertumbuhan tersedianya hara untuk tumbuhnya benih didukung oleh kandungan hara pada keping lembaga (cotyledone) yang sangat terbatas hingga benih menghasilkan organ tanaman dan anakan tingkat semai, pertumbuhan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh tersedianya energi hara dari lahan. Fitter dan Hay (1992) melaporkan bahwa mekanisme tumbuhnya benih didahului oleh induksi kadar air ke dalam badan embrio untuk merangsang kerja inti sel (nucleus) untuk melakukan pembelahan (mitosis). Dengan bertambahnya jumlah sel selanjutnya sel-sel hasil pembelahan akan terdiferensiasi untuk membentuk jaringan organ perakaran (radicula), tunas (plumula), dan keping lembaga sebagai hara cadangan sebelum akar berperan dalam menyerap hara dari lahan tumbuh.

Pertumbuhan berbagai jenis tanaman secara biologis dalam skala awal merupakan proses pembentukan organ dalam menghasilkan organ tubuh tanaman (akar, batang, dan daun) sedangkan produk pertumbuhan selanjutnya merupakan hasil pembelahan sel-sel meristematik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan tinggi pohon serta diameter batang (Loveless, 1991). Larcher (1975) melaporkan bahwa dalam mekanisme tumbuh dan berkembangnya tanaman secara biologis akan dipengaruhi oleh faktor intern sifat genetik jenis dan faktor ekstern akan ditentukan oleh peran hara lahan, tata air, dan intensitas cahaya serta parameter ekologis lingkungan tumbuh. Oleh karena itu optimasi pertumbuhan bibit tanaman karas (*A. malaccensis*) dengan perlakuan pemberian hara yang bersumber dari kompos organik serta pupuk NPK pada proses pemeliharaan semai menjadi bibit siap tanam secara fisiologis menjadi penunjang dalam menghasilkan bahan tanaman yang baik dan berkualitas.

Simamora dan Salundik (2006) melaporkan bahwa kompos

organik memiliki komposisi unsur hara yang lengkap serta dapat memberikan keuntungan ganda. Selain terhadap tersedianya hara makro dan mikro, juga secara fisik akan berperan terhadap perbaikan kondisi struktur tanah, daya simpan air, pertukaran udara (aerasi), dan kation hara serta meningkatkan peran mikroorganisme tanah.

Kramer dan Kozslowski (1979) melaporkan bahwa penyerapan hara akan dipengaruhi oleh faktor kemampuan akar serta kondisi homogenitas formulasi hara yang tersedia pada medium tempat tumbuh. Untuk itu dalam upaya membentuk homogenitas tersedianya hara pada medium pemeliharaan bibit tanaman, pemberian perlakuan kompos organik perlu tercampur secara merata agar sistem penyerapan hara oleh akar dapat menunjang laju pertumbuhan bibit. Tumbuhan penghasil gaharu yang tergolong semitoleran terhadap cahaya pada fase pertumbuhan awal (vegetatif), faktor kapasitas intensitas cahaya akan mempengaruhi perkembangan laju pertumbuhan tanaman (Parman dan Mulayaningsih, 1998). Pengaruh naungan paranet dengan intensitas cahaya masuk sekitar 60% cukup mendukung tersedianya energi fotosintesa, yang ditunjukkan oleh persen dan keberhasilan tumbuh dalam proses pemeliharaan bibit karas hingga mencapai kondisi siap tanam.

Pertumbuhan tinggi tanaman maupun luas daun dan panjang daun berbeda nyata antara media TPO dengan media yang lainnya.. Walaupun jumlah daun berbeda nyata, rongga udara pada jaringan tanaman dapat terisi komponen non-protoplasmik cair yang tidak sama (Dwidjoseputro, 1980), stimulasi humus dari bahan organik merupakan salah satu penyebab perbedaan komponen tersebut (Vaughan & Malcolm, 1984; Vaughan et al., 1984). Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan sifat kimia masing-masing media di gambar 4, 5 dan 6. Beberapa sifat kimia tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kandungan unsure hara nitrogen, phosphor dan bahan organik tanah. Bahan organik mempunyai kemampuan menyimpan air pada media organik lebih tinggi. Air bersama hara tanaman lebih mudah terlindi pada tanah atasan regosol dibandingkan media organik (Alexander, 1976),

sehingga ketersediaan hara dari media organik pada tanaman akan meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman, lebar daun dan panjang daun. Nitrogen merupakan unsure kunci pembentuk sel tanaman (a key building block) yang didapatkan tanaman hanya dari hasil fiksasi dari udara, berbeda dengan unsur P atau K yang dapat diimobilisasi dari mineral tanah. Tingginya bahan organik, nisbah C/N dan nitrogen total dalam media kompos gergajian menunjukkan bahwa jerapan N dalam media maupun dalam biomasa sel mikrobial lebih tinggi, sehingga lebih tersedia bagi tanaman (Anderson & Vaughan, 1985).

Tingginya bahan organik berpengaruh terhadap aktivitas mikrobial tanah terutama di daerah rhizosfer maupun rhizoplane yang sangat berperan terhadap pertumbuhan perakaran bibit tanaman. Asam-asam organik dan metabolit sekunder hasil dekomposisi bahan organik oleh mikrobial dapat menekan penyakit tanaman. Sifat fisik media organik lebih memperkuat pertumbuhan bibit tanaman, struktur maupun tekstur media organik juga lebih dapat menjaga keseimbangan aerasi (Alexander, 1976).

Bahan-bahan organik terutama yang bersifat limbah yang ketersediaannya melimpah dan murah dapat dimanfaatkan untuk alternatif media tanah atasan yang sulit/lambat tergantikan. Bobot persatuan bibit 3 hingga 4 kali lebih rendah dibandingkan media tanah, sehingga mempermudah pengangkutan dan menghemat biaya angkut bibit. Biaya penanaman bibit dengan media tanah atasan dilaporkan dua kali lebih tinggi dibandingkan bibit dengan media organik (Hendromono, 1998). Hasil penelitian di Banjarbaru (Valli, 1994) menunjukkan bahwa penggunaan bibit dengan media organik mengurangi biaya penyulaman dan mengurangi frekuensi penyiangan karena angka kematian lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan bibit di media tanah atasan.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan, analisa hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan vegetatif bibit tanaman tembakau menunjukkan bahwa media tanam tanah yang dicampur dengan pupuk

organik (TPO) yang memiliki pertumbuhan terbaik, diikuti dengan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam (TS) dan tanah yang dicampur dengan kompos (TK). Sedangkan media tanam tanah yang dicampur dengan pasir (TP) pertumbuhan vegetatif bibit tembakau sangat terhambat.

2. Unsur hara sangat menentukan dalam pertumbuhan awal bibit tanaman tembakau, akan tetapi jika jumlahnya kurang dikontrol akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman tembakau, ini terlihat pada media tanam tanah yang dicampur dengan serbuk gergaji (TSR) kandungan haranya sangat tinggi sehingga akan mengganggu pertumbuhan awal bibit tanaman.
3. Untuk ketersediaan nitrogen dan fosfor dalam media tanam bibit tanaman tembakau, media tanam tanah yang dicampur dengan pupuk organik (TPO) dan media tanah yang dicampur dengan kompos (TK) memiliki kandungan nitrogen dan fosfor yang ideal untuk pertumbuhan awal bibit tanaman tembakau yaitu N 0.06% dan P 57,36 ppm.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan maka, untuk meningkatkan kualitas hasil dan pertumbuhan tanaman tembakau petani di Kabupaten Lombok tengah maka disarankan pemerintah menganjurkan petani tembakau dalam melakukan kegiatan pembibitan tanaman untuk memberikan pupuk organik dalam melakukan proses pembibitan. Sebaiknya pemberian pupuk organik dilakukan pada saat pengolahan tanah dilakukan.

Dua bulan akhir-akhir ini, kita disuguhkan berita, baik media cetak maupun televisi mengenai harga Cabai yang melambung tinggi. Persis seperti rasanya yang pedas, harganya juga pedas ungkap beberapa ibu-ibu tetangga saya pagi itu.

Bahkan pada beberapa kesempatan pidato, beberapa petinggi di negeri ini selalu menyinggung akan kenaikan harga Cabai ini. Seperti pada lawatan Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia di Australia beberapa minggu yang lalu. Dan di hadapan sekitar 2500 masyarakat Indonesia yang hadir pada acara itu, bapak presiden mengatakan bahwa harga Cabai yang tinggi ini sudah biasa dan cenderung pluktuatif. Nanti jika panen sudah mulai pasti akan turun lagi.

Beberapa petani di Lombok Timur memiliki analisis berbeda mengenai kenaikan harga Cabai ini. Cabai di sekarang lagi mahal dikarenakan beberapa daerah sentra Cabai di Jawa sedang mengalami bencana alam seperti banjir. Begitu juga sentra Cabai yang di Sumatera sedang rusak dikarenakan ada musibah gunung sinabung yang meletus paparnya.

Dilihat dari beberapa analisis memang betul juga pendapat dari

POLITIK DAGANG CABAI

petani Cabai ini. Selain musim penghujan yang tahun ini curah hujannya cukup tinggi mengakibatkan beberapa sentra Cabai di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta mengalami bencana alam. Hal ini mengakibatkan tanaman Cabai petani yang seharusnya sudah panen mengalami kegagalan. Kerugian di tingkat petani akan adanya bencana alam ini cukup tinggi. Hal inilah yang berdampak kepada kenaikan harga Cabai yang mengakibatkan ibu-ibu rumah tangga harus memutar otak agar menghemat.

Yang menarik adalah pada pemberitaan CNN Indonesia, pada tanggal 3 maret 2017 yang lalu. Di CNN Indonesia diberitakan dua penimbun Cabai rawit di Jakarta di tangkap. Kedua penimbun Cabai ini ditangkap dikarenakan ulah mereka ini mengakibatkan pasokan Cabai di pasar tradisional langka. Selain menyimpan Cabai di gudangnya kedua pengepul ini menjual Cabai-Cabai mereka ke perusahaan. Yang lebih parah lagi yaitu para pengepul ini kongkalikong untuk menetapkan harga semau mereka, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Berbicara mengenai sistim ekonomi, sudah menjadi rumus baku bahwa ketika barang sedang banyak maka permintaan berkurang. Begitu sebaliknya ketika barang sedikit maka permintaan akan meningkat. Setiap tahun pola distribusi Cabai selalu dan cenderung sama, jika tidak dipengaruhi oleh Cabai impor. Pada bulan November sampai Maret stok Cabai di pasaran akan berkurang. Hal ini diakibatkan selain petani kurang menanam Cabai dikarenakan musim penghujan dan petani selbih senang menanam padi khususnya pada lahan-lahan basah. Hal inilah yang mengakibatkan stok pasti berkurang.

Jika bulan april sampai September, stok akan berlimpah dikarenakan petani sudah melakukan pergiliran tanaman yang awalnya padi diganti dengan tanaman hortikultura lainnya, terutama Cabai.

Sebagai sentra Cabai, Pulau Lombok sudah mendistribusikan hasil Cabainya ke beberapa provinsi dan kota besar di Indonesia. Menurut data yang di lansir oleh Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Cabai dari Lombok sudah menembus sekitar 16 propinsi.



Sentra Cabai di Pulau Lombok yaitu Kecamatan Masbagik,

Ilustrasi : Petani Cabai di Kabupaten Lombok Timur

Kecamatan Aikmel, Kecamatan Sembalun, sebagian Kecamatan Sikur. Namun, akibat semakin menjanjikannya bertanam Cabai, saat ini sentra Cabai malah sudah menyebar ke semua kecamatan, khususnya di kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Dahulunya, di bagian selatan Kabupaten Lombok Timur sangat kurang familiar jika menanam Cabai. Namun, akhir-akhir ini malah petani Cabai banyak dari daerah selatan. Ini menunjukkan bahwa komoditi Cabai ini sudah mulai dilirik dan sangat menjanjikan. Tidak hanya komoditi Tembakau saja yang menjanjikan. Mudah-mudahan semangat yang sudah ada dimiliki oleh petani ini disambut baik oleh Pemerintah Daerah terutama dinas Pertanian.

Promosi akan tanaman Cabai tidak hanya alamiah datang dari pasar dengan harga yang tinggi saja. Tanaman Cabai juga sangat dipameliarkan oleh perudahaan-perusahaan yang bergerak dibidang bibit dan obat-obatan, termasuk juga perudahaan pupuk. Dengan semakin menggairahnya petani melakukan penanaman

Cabai, ini dilihat sebagai peluang besar oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari data yang penulis dapatkan, perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan kimia termasuk benih dan pupuk ini sekitar 33 perusahaan. Bisa dibayangkan berapa besarnya uang yang berputar dalam bisnis pertanian ini terutama hortikultura. Pernah penulis berdiskusi dengan salah satu perusahaan obat-obatan, bahwa target penjualan yang harus mereka capai dalam satu tahun musim tanam yaitu sekitar 8 sampai 10 milyar. Coba dibayangkan jika perusahaan yang ada 33 perusahaan.

Ini baru kita berbicara in put pertanian, belum berbicara mengenai hasil produksinya. Bisa dibayangkan bahwa bisnis pertanian terutama hortikultura dan lebih dalam lagi Cabai sungguh sangat menjanjikan.

Akan banyak pembelajaran penting baik ilmu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dalam memaknai hubungan dengan alam terutama dalam hal bercocok tanam akan mengalami pergeseran yang cukup cepat. Misalnya saja dalam pola pembibitan. Kita sudah mulai meninggalkan bibit-bibit local kita dan sudah beralih kepada bibit-bibit baru yang sebagian besar merupakan bibit hibrida.

Belum lagi mengenai pola budidaya, seperti pembuatan bedengan, pola pemupukan, pengobatan dan lain sebagainya. Kita tanpa sadar sudah mulai dengan pola-pola sistim bertanam baru. Namun yang penting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan alam dan lingkungan kita ini supaya hari ini kita masih bergantung kepada alam ini, semoga anak cucu kita juga dapat menikmatinya. Semoga pedasnya Cabai juga bias dirasakan oleh anak cucu kita nantinya.

RANTAI PASAR BENCANA DI NTB

Diskusi sore itu di Hotel Grand Madani bersama temanku tidak fokus dan tidak konsentrasi. Saya terus saja memperhatikan temanku yang tanpa henti melihat Facebook di HPnya. Kayaknya mau Hujan lagi nih, untung saya sudah meminta keluarga saya untuk cepat ke rumah keluarga yang lebih atas” ungkapnyanya kepadaku. Memang, jika melihat hujan lebat yang agak lama, teman-teman yang dari Bima tidak akan bisa tenang. Begitu juga dengan teman di sebelahku ini. Tidak pernah berhenti memonitor cuaca dari akun facebooknya

Musim hujan tahun ini belum berakhir. Semua kabupaten kota yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat sudah terkena dampaknya. Tidak hanya bencana banjir, longsor maupun angin putting beliung.

Dari media masa yang ada, kita akan disuguhkan dengan berita terjadinya bencana di semua Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Dan jika di kalkulasikan sudah hampir mendekati Triliunan rupiah kerugian materi. Belum dihitung berapa kerugian psikologis yang diderita masyarakat.

Trauma masih terasa begitu mendalam bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana alam yang terjadi. “harap harap cemas” kalau langit mendung. Memang musih hujan tahun ini menyisakan cerita yang agak panjang. Dari sisi bencananya maupun dari yang lain.

Sebuah ironi pembangunan yang menyisakan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Nusa Tenggara barat, pemerintah daerah mengejar mimpi menjadi stok pangan nasional dan sebagai lumbung jagung. Ambisi pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan strategis yang dinamakan “PIJAR”. Swasembada sapi, jagung dan

rumput laut. Target pemerintah daerah sebagai pemasok daging nasional sangat sungguh tidak berlebihan, dikarenakan sejak jaman dahulu Pulau Lombok dan Sumbawa sebagai sentra peternakan sapi. Bahkan di suku sasak mengenal istilah 3 Ng (Ngaret, Ngaro dan Ngaji). Dan ada beberapa anekdot yang sangat dipercaya oleh masyarakat suku sasak yaitu “kalau ingin sampe, ya ngaret sapi” artinya jika cita-citanya ingi terpenuhi maka peliharalah sapi.

Yang menarik dari program strategis pemerintah lainnya yaitu mendorong Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai sentra jagung dan lumbung jagung nasional. Walaupun sebenarnya nusa tenggara barat sudah didahului oleh propinsi Gorontalo sebagai propinsi jagung.

Tidak ada kata terlambat, yang penting dijalankan dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak, maka apa yang dihajatkan isyaallah akan tercapai. Melihat akan kebutuhan jagung nasional yang masih jauh dari kata tercukupi. Ini dibuktikan dengan Indonesia impor Jagung setiap tahunnya lebih dari 10 juta ton.

Dilihat dari sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Nusa tenggara barat, yang sangat cocok dengan program maksimalisasi produksi jagung. Ini dilihat dari potensi sumberdaya lahan yang cukup banyak.

Sebagian besar lahan-lahan pertanian di NTB (80%) merupakan lahan kering. Berdasarkan hasil penelitian dari Suardji (2008) Komoditi pertanian lahan kering yang diarahkan untuk dikembangkan di NTB dapat dikelompokkan (1) Komoditi Tanaman Pangan Musiman, (2) Komoditi Tanaman Buah-Buahan, (3) Komoditi Tanaman perkebunan dan (4) Komoditi Peternakan.

Dengan melihat kondisi iklim yang dimiliki oleh NTB menyebabkan lahan pertanian akan kesulitan memperoleh air. Di daerah tropis, curah hujan merupakan satu-satunya sumber air yang dapat digunakan untuk irigasi. Namun dibagian selatan pulau Lombok memiliki budaya yang agak unik yaitu dengan sistim pertanian embung rakyat.

Embung (*telage*) air adalah waduk berukuran kecil di lahan pertanian (*small farm reservoir*) yang dibangun untuk menampung

kelebihan air hujan di musim hujan dan menggunakannya jika diperlukan tanaman pada musim kemarau. Teknik pemanen air (*water harvesting*) demikian cocok bagi ekosistem tadah hujan dengan intensitas dan distribusi curah hujan tidak pasti (*eratic*) (Syamsiah dan A. M. Fagi, 2004) dalam (Arif Surahman, I. M. Wisnu W dan Sasongko). Embung sudah melekat dengan kehidupan masyarakat tani di kabupaten Lombok terutama daerah selatan yang umumnya relatif kering. Pemanfaatan embung terutama sebagai usaha tani, namun pada musim hujan embung-embung tersebut dimanfaatkan oleh petani sebagai tempat memelihara ikan. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan petani. Keberhasilan usahatani di kabupaten ini khususnya untuk daerah-daerah yang terletak dibagian selatan dapat dikatakan sangat ditentukan oleh kepemilikan embung oleh petani.

Sejak mulainya program jagung, petani di NTB umumnya menanam padi, terutama pada musim basah, lahan kering yang ada hampir semua ditanami dengan jagung. Pada saat demikian tanaman bersifat monokultur. Namun jika tiba saat pergantian musim tanam biasanya petani akan mulai menanam berbagai jenis sayur pada lahan mereka. Lain halnya jika musim kering tiba, pada daerah-daerah tertentu lahan pertanian justru dikosongkan (*bero/bera*) karena mereka kesulitan untuk memperoleh air untuk tanaman mereka. Namun pada daerah yang masih bisa mengakses air meski dengan cara bergilir, lahan mereka ditanami berbagai tanaman sayur dan kacang-kacangan. Bahkan tak jarang juga petani di NTB menanam buah-buahan semusim seperti melon dan semangka.

Di NTB secara umum mengenal sistem sakap dalam pengelolaan lahan pertanian. Sistem sakap maksudnya buruh tani mengerjakan lahan orang lain (pemilik lahan). Mereka tidak menerima upah harian atau bulanan melainkan menerimanya setiap panen. Sistem yang dipergunakan adalah sesuai dengan musim panen. Musim panen tersebut terdiri dari tiga musim yaitu dua matak balit (panen balit) dan satu kali matak/panen taun. Pada saat matak balit hasil panen dan biaya produksi ditanggung bersama antara buruh dan pemilik lahan, namun pada matak taun

baik biaya maupun hasil untuk pemilik lahan.

Umumnya petani di NTB sangat tergantung pada lahan pertanian mereka, hampir semua waktu mereka dihabiskan di lahan pertanian, terutama pada bulan-bulan basah. Sehingga sumber pendapatan utama mereka masih mengandalkan hasil sawah. Kerja sampingan yang biasanya mereka tekuni sebagai peternak, jenis ternak yang diusahakan seperti ayam, bebek, kambing dan sapi. Organisasi atau kelembagaan petani belum tertata baik umumnya pembentukan kelompok tersebut ketika akan mendapatkan bantuan saja.

Anggaran yang dikeluarkan untuk program jagung ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat drastis. Anggaran baik dari APBN, APBD maupun dana dari pihak swasta. Potensi



luas lahan untuk pengembangan palawija di NTB mencapai 804 ribu hektar. Terdiri dari musim hujan di lahan kering mencapai 578 ribu hektar, musim kemarau I di lahan sawah 235.279 hektar dan musim kemarau II di lahan sawah seluas 90.786 hektar. Khusus untuk palawija jagung, potensi lahan untuk pengembangannya di NTB mencapai 269 ribu hektar dengan tingkat pemanfaatan baru berkisar 55,5 ribu hektar. Maka semestinya produksi jagung NTB dapat mencapai 1,3 juta ton lebih, sehingga dapat memberikan

kontribusi nyata terhadap pengurangan impor jagung nasional yang rata-rata 1,2 juta ton jagung per tahun.

Produksi jagung di NTB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 produksi jagung NTB mencapai 196.263 ton. Angka tersebut terus meningkat pada tahun berikutnya yaitu 308.863 ton pada tahun 2009, 371.826 ton pada tahun 2010 dan 456.915 ton pada tahun 2011.

Nilai strategis pengembangan jagung selain produksi yang mencapai 456.915 yang mencapai nilai Rp.1.347.899.250 ternyata juga mampu melibatkan petani sebanyak 415.506 orang dan pengentasan kemiskinan sebanyak 75.025 orang dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp.15.092.200. Selain itu juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan NTB dengan tingkat kebutuhan mencapai 14.851. pengembangan jagung ini juga mampu menciptakan wirausaha sebanyak 3200 unit usaha. Dari bahan jagung dapat dibuat bahan olahan seperti keripik, Jagung Brondong, Marning dan Emping.

Potensi pengembangan jagung untuk NTB cukup besar. Namun produktivitasnya masih sangat rendah 2,003 ton/ha dengan luas panen 31.459 ha (BPS, 2002). Produksi jagung masih di bawah produksi rata-rata nasional 2,81 ton/ha (Deptan, 2002). Hasil penelitian Balai Penelitian Serealia Maros menghasilkan beberapa varietas jagung bersari bebas ataupun hibrida yang mempunyai potensi produksi sangat tinggi 6-8 ton/ha.

Hasil pengkajian dan penelitian dengan petani kooperator untuk beberapa varietas unggul yang dikembangkan Balitsereal Maros mampu menghasilkan 7 ton/ha jagung kering giling di Sambelia Lombok Timur. Ditingkat petani dapat mencapai hasil 5-6 ton/ha. Hasil pengkajian dan penelitian jagung hibrida di Labangka, Kecamatan Labangka, Sumbawa dengan teknologi tanpa olah tanah dengan jagung hibrida C7 selama 2 tahun 2000/2001 dapat menghasilkan 6-7 ton/ha sedang ditingkat petani sekitar 5,5 ton/ha (Suwardji 2002).

Secara umum tanah-tanah di lahan kering NTB mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan jagung. Tanah-tanah alfisol, entisol, inceptisol dan vertisol merupakan tanah-tanah

yang berpotensi besar untuk pengembangan jagung. Namun demikian beberapa kendala seperti kondisi curah hujan yang tidak menentu, kekurangan beberapa unsur hara seperti N dan P serta beberapa unsur mikro perlu mendapat perhatian. Di samping itu permasalahan lain seperti hama dan penyakit, gulma dan tidak kalah pentingnya. Permasalahan pemasaran menjadi permasalahan yang sangat fundamental dalam pengembangan jagung di lahan kering.

Beberapa teknologi pengelolaan lahan kering berbasis jagung yang berkembang diantaranya: (1) penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan stabil, (2) benih berdaya tumbuh tinggi > 90 %, (3) teknologi tanpa olah tanah dengan herbisida ramah lingkungan, (4) populasi tanaman optimum, (5) rationalisasi penggunaan pupuk berdasarkan analisis tanah dan jaringan tanaman, (6) penggunaan pupuk organik saat tanam, (7) pengendalian gulma secara tepat, (8) pengendalian hama dan penyakit berdasarkan konsep PHT, (9) pengelolaan air yang tepat, (10) penanganan paska panen, (11) penanaman tumpang gilir dengan kacang hijau dan kacang tunggak (Mashur, 2004).

Dengan melihat hasil produksinya yang belum maksimal ini, pemerintah menggenjor peningkatan produksi dengan cara menambah arel tanam. Sehingga berdasarkan data yang dihimpun oleh harian Lombok pos, bahwa alih fungsi lahan hutan di NTB mencapai sekitar 300.000 hektar.



SEKTOR PERTANIAN DALAM PERGULATAN POLITIK DI GUMI SELAPARANG

Suhu politik di Kabupaten Lombok Timur saat ini terus meningkat seiring dengan akan segera berakhirnya periode masa kepemimpinan Bupati Ali Bin Dahlan di tahun 2018. Dalam setiap pergantian kepala daerah di Lombok timur satu hal yang menarik untuk dicermati yaitu pada sektor pertanian yang selalu menjadi isu utama “jualan dan pencitraan” para calon bupati yang ingin bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tidak ada yang salah apabila para kontestan Pilkada Lotim 2018 mengangkat sektor pertanian sebagai isu utama sebagai “jualan dan pencitraan” untuk meraih simpati dan dukungan mengingat hampir 50 persen penduduk Lombok Timur memiliki hidup dan kehidupan berasal dari sektor pertanian. Selain itu pula, pemanfaatan lahan di daerah ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian. Total lahan sawah pada tahun 2016 seluas 48.191 ha atau sekitar 30,02 persen dari luas wilayah kabupaten. Lahan sawah tersebut sebagian besar ditanami padi (93,64 %), baik itu sekali, dua kali, maupun tiga kali tanam dalam setahun (Lotim Dalam Angka, 2017).

Pembangunan pertanian di Lombok Timur secara umum masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal apabila kita melihat dari tingkat kesejahteraan petani di daerah ini. Pada 2014 data BPS Lotim mencatat jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 219,7 ribu jiwa. Proporsi penduduk miskin di Lombok Timur yang bekerja pada sektor pertanian 32,42 persen yang artinya tingkat kesejahteraan petani di daerah ini secara umumnya masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan. Bupati Lotim periode berikutnya harus mampu mengendalikan laju konversi lahan pertanian yang terjadi di Lombok Timur.

Konversi lahan pertanian sebisa mungkin ditujukan hanya untuk konversi dari lahan pertanian non organik ke pertanian organik. Pertanyaannya apakah Bupati Lotim periode berikutnya ini berani mengambil kebijakan politik dalam bentuk moratorium konversi lahan pertanian yang selama ini hanya dijadikan sebagai kawasan pemukiman baru dan industri?

Kondisi ini akan menjadi tantangan serius bagi para calon Bupati Lotim mendatang apabila terpilih sebagai bupati lotim periode 2018-2023 nantinya. Selain alih guna lahan dalam bentuk konversi lahan pertanian, ada empat hal besar dalam lima tahun ke depan yang akan menjadi tantangan bagi Bupati Lotim mendatang yang dalam hal ini terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Empat hal itu adalah terkait dengan kesejahteraan petani di Lombok Timur, data pertanian, harmonisasi kebijakan, dan keamanan pangan masyarakat. aspek keamanan pangan terkait dengan fakta penduduk miskin di Lombok Timur berada di pedesaan dan termasuk ke dalam masyarakat petani.

Saat ini sektor pertanian masih menjadi unggulan dalam hal kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2016, lebih dari seperempat PDB Lombok Timur berasal dari kategori pertanian (28,9 persen menurun dari 30,79 persen pada tahun 2011). Meskipun dari tahun ke tahun persentase ini semakin mengecil dengan pergerakan yang 'halus'. Secara umum menunjukkan secara perlahan kecenderungan usaha di sektor pertanian semakin berkurang (*Lotim Dalam Angka, 2017*).Kecendrungan transformasi struktural perekonomian yang tidak seimbang, terutama di sektor ketenagakerjaan. Sektor pertanian yang semakin kecil peranannya terhadap PDB, masih harus menyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2015 sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di serap oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja di sektor ini sekitar 45,65 persen (*Lotim Dalam Angka, 2016*). Akibatnya kesejahteraan masyarakat pertanian relatif kecil dari non pertanian. Inilah yang menjadi tantangan Bupati Lotim periode mendatang.

Untuk itu, terkait dengan tingkat kesejahteraan petani, Bupati Lotim mendatang melalui kebijakan pada sektor pertanian

harus mampu menjawab kondisi kesejahteraan secara umum petani dimana, pada struktur tata niaga pangan saat ini ternyata kenaikan harga di petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani secara langsung. Posisi tawar petani yang lemah sebagai price taker, sehingga walaupun ada kenaikan harga biasanya tidak sertamerta mereka nikmati, bisa juga kenaikan harga terjadi akibat kurang pasokan atau akibat struktur dan perilaku pasar tidak bersaing sempurna.

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan politik yang tegas dan tepat dari para kontestan Pilkada Lotim 2018 apabila ditakdirkan untuk menjalankan amanah memimpin masyarakat Lombok Timur. Kebijakan politik yang diambil harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani lagi, karena apabila petani tidak sejahtera dikhawatirkan regenerasi petani akan semakin menurun. Kebijakan Bupati Lotim mendatang harus mampu membuat sektor ini menjadi sektor yang seksi dan menjanjikan sehingga, menarik generasi muda untuk masuk dalam dunia pertanian.

Pembangunan pertanian yang akan menjadi kebijakan Bupati Lotim mendatang harus dapat mengakomodir kepentingan petani di daerah ini mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggalakkan pembangunan sektor pertanian dengan sistem agribisnis dimana pembangunan dengan sistem agribisnis ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas, produktivitas, kualitas, pemasaran, dan efisiensi usaha pertanian, baik yang dikelola secara mandiri maupun secara kemitraan. Untuk itu, sebagai komitmen politik antara seorang bupati kepada rakyatnya maka, Bupati Lotim mendatang dapat mengerahkan segala instrumen sumber daya yang terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Lombok Timur.

Namun, kebijakan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini seorang Bupati dalam mengambil kebijakan pembangunan juga harus ditopang oleh informasi berupa data pertanian yang baik dan akurat. Persoalan data pertanian ini akan sangat penting karena banyak data-data pertanian yang ada masih diragukan terkait dengan metodologi

perhitungan. Penyatuan data dan metodologi perhitungan akan menjadi tantangan politik bagi Bupati Lotim mendatang. Salah satu contoh adalah data tentang jumlah komoditi pertanian Lombok Timur yang dibawa ke luar daerah hingga saat ini belum ada data yang dapat diperoleh dengan baik. Data yang bersumber dari petani langsung tentunya akan berbeda dengan data yang bersumber dari pengusaha sehingga, data jumlah yang tepat tidak pernah dapat diperhitungkan.

Selain itu pula, persoalan pertanian ini dapat terlihat ketika musim tanam tiba. Persoalan kelangkaan pupuk dan kesulitan mendapatkan akses terhadap benih tanaman terjadi setiap tahunnya. Pada kasus kelangkaan pupuk seharusnya tidak terjadi apabila data jumlah petani dengan yang ada pada RDKK sudah benar. Begitu pula terhadap ketersediaan benih tanaman terutama pada benih komoditi pangan seperti padi dan jagung. Apabila memang pemerintah daerah memiliki data yang benar terkait dengan luas areal pertanian dengan tingkat kebutuhan petani maka, pemerintah daerah dapat mengetahui persediaan benih yang harus disediakan sebagai antisipasi dampak permainan para mafia pertanian.

Kebutuhan akan data yang akurat dan benar juga terkait dengan kebijakan politik Bupati Lotim mendatang dalam hal menjawab persoalan pertanian lima tahun ke depan yaitu persoalan keamanan pangan. Jika data pertanian bagus, akan diketahui kapan harus menambah stok. Ketika stok pangan rendah, pemerintah dapat menentukan kebijakan selanjutnya.

Terakhir, tantangan kebijakan politik Bupati Lotim mendatang adalah terkait dengan harmonisasi kebijakan. Harmonisasi kebijakan ini sangat penting karena akan berdampak terhadap langkah strategis antar SKPD terkait dengan sektor pertanian. Apabila semua lini yang ada ini dapat berjalan harmonis, didukung dengan data yang baik dan akurat maka akan berdampak terhadap tata kelola pangan yang lebih baik dan akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan petani di Lombok Timur.



Bunga Gemitir atau Marigold (*Tagetes erecta*) merupakan tanaman perdu yang digunakan sebagai tanaman hias karena keindahan bunganya yang cantik. Dalam tataran lokal tanaman ini identik dengan Bali karena banyak dipergunakan sebagai sarana keagamaan di sana. Budidaya tanaman ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena tingkat permintaannya sangat banyak serta dari sisi harga juga sangat tinggi. Untuk daerah Bali saja diperkirakan kebutuhan terhadap Gemitir mencapai 8 ton per hari dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah.

Penggunaan Gemitir di Bali yang sebagian besarnya sebagai sarana peribadatan juga terjadi di Pulau Lombok yang merupakan daerah dengan penduduk yang beragama Hindu cukup banyak di luar agama mayoritas Islam yang dianut oleh Suku Sasak yang merupakan penduduk asli Pulau Lombok. Hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya para penjual bunga di Kota Mataram yang khusus melayani kebutuhan umat Hindu untuk perayaan hari besar keagamaan. Ini juga membuktikan bahwa tingkat permintaan pasar akan kebutuhan bunga Gemitir di Pulau Lombok sangat tinggi, dimana selama ini terkadang masih mendatangkan dari Bali untuk memenuhi tingkat kebutuhan Gemitir sebagai sarana acara keagamaan.

Prospek budidaya Gomitir yang sangat menjanjikan terutama dari sisi perekonomian membuat Lombok Research Center (LRC) melakukan kajian mengenai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya Gomitir di Kabupaten Lombok Timur. Selama ini LRC melihat bahwa pengembangan budidaya Gomitir di daerah ini belum maksimal yang disebabkan oleh karena budidaya pengembangan Gomitir yang dilakukan petani hanya bersifat sampingan dan belum menjadi industri yang digarap serius. Peningkatan pendapatan para petani dengan memanfaatkan lahan secara efektif dan produktif juga menjadi salah satu hasil dari kajian yang dilakukan Lombok Research Center.

Tanaman Gomitir memiliki ciri-ciri berupa bentuk daun yang lancip dan bergerigi, kecil-kecil dan berwarna hijau. Secara morfologi tanaman Gomitir memiliki ketinggian 50-60 cm tergantung dari tingkat kesuburannya. Apabila sudah cukup umur ± 50 hst tanaman Gomitir akan berbunga yang berwarna kekuningan dengan mahkota bunga yang mengembang sehingga, sangat bagus dengan diameter ± 10 cm. Bagian bunga tanaman gomitir biasa digunakan sebagai sarana persembahyangan ataupun sebagai hiasan guna menambah nilai estetika. Tanaman gomitir dibudidayakan secara luas untuk mendapatkan ekstrak lutein yang merupakan suatu suplemen makanan, dan sebagai pewarna makanan (Qin *et al.*, 2014). Selain itu, tanaman gomitir juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan anti nyamuk (Patel *et al.*, 2012), anti nematoda (Wang *et al.*, 2007), insektisida (Parugrug dan Aurea, 2008), dan juga sebagai antioksidan (Gong *et al.*, 2012).

Penggunaan Gomitir dalam setiap acara keagamaan dan sebagai bunga hias dalam pesta dan acara lainnya di Bali juga terjadi di Pulau Lombok sehingga, peluang budidaya Gomitir ini perlu untuk dilakukan pengembangannya. Lombok Research Center masih dalam kajiannya menyatakan bahwa budidaya Gomitir ini tidak lebih susah dari budidaya tanaman Cabai. Tidak membutuhkan perlakuan khusus serta didukung oleh cuaca dan iklim sehingga, budidaya Gomitir di Lombok Timur sangat cocok untuk dilakukan pengembangan. Namun yang dapat menjadi kunci kesuksesan budidaya tanaman gomitir ini tentu saja terlihat dari

kesuksesan kita menanam dan saat panen kita memperoleh harga yang baik.

Selama ini memang sudah mulai bermunculan budidaya Gunitir yang dilakukan oleh para petani di Lombok Timur seperti di Kecamatan Sikur dan Kecamatan Masbagik namun, sekali lagi itu hanya bersifat budidaya sampingan karena sebatas menanam di pematang sawah yang itu juga luasannya tidak terlalu luas. Akibatnya terkadang harga di tingkat petani memiliki perbedaan yang tinggi dibandingkan dengan harga jualnya.

Perbedaan harga bunga gunitir di tingkat petani cenderung tinggi, karena bunga gunitir termasuk volumetrik. memerlukan tempat yang banyak dan hanya dapat membawa jumlah berat yang sedikit. jika harga bunga norma di kisaran 5 ribu di petani maka di pasaran bunga gunitir akan berharga 10 - 11 ribu. Hebohnya terjadi saat bunga gunitir langka, saat harga di petani mencapai 30 ribu maka harga di tingkat pedagang dan di pasar mencapai 40-50 ribu. Karena alasan hukum permintaan dan penawaran. Jika stok bunga gunitir langka maka kesempatan pedagang mengangkat harga.

Manfaat lain yang juga menjadi fokus dalam kajian Lombok Research Center adalah pemanfaatan limbah batang tanaman Gunitir sebagai biomassa yang bermanfaat bagi tingkat kesuburan tanah. Selama ini limbah tanaman Gunitir setelah selesai panen hanya dibakar dan menjadi pakan ternak saja. Pembakaran limbah tanaman gunitir ataupun limbah pertanian lainnya secara terus menerus akan menimbulkan pencemaran udara.

Limbah tanaman gunitir ini merupakan suatu biomassa yang dapat dirubah menjadi materi yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan lebih bermanfaat daripada dibakar begitu saja. Biomassa merupakan keseluruhan materi yang berasal dari makhluk hidup, termasuk bahan organik baik yang hidup maupun yang ada di bawah permukaan tanah. Contoh dari biomassa adalah pohon, hasil panen, rumput, hewan dan sisa/kotoran hewan (Sutaryo, 2009). Salah satu pemanfaatan biomassa adalah sebagai bahan dasar produksi arang aktif. Pemanfaatan biomassa seperti limbah tanaman gunitir untuk produksi arang aktif memiliki

dampak yang positif sebagai pengurangan limbah pertanian dalam hal ini limbah padat organik.

Pemanfaatan lahan secara efektif melalui budidaya Gunitir patut untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Lombok Timur karena selain sebagai salah satu sarana peningkatan kesejahteraan petani, budidaya Gunitir juga dapat memberikan manfaat untuk menjaga tingkat kesuburan tanah melalui pemanfaatan biomassa tanaman Gunitir.

MENSINKRONKAN PRODUKSI TOMAT DAN PASAR DI LOMBOK TIMUR

Tomat merupakan salah satu komoditi pertanian yang banyak dijumpai di Kabupaten Lombok Timur NTB. Kabupaten ini merupakan penghasil tomat terbesar di Provinsi NTB. Pada tahun 2015 produksi tomat di Kabupaten Lombok Timur mencapai 27.482 kg (BPS NTB, 2016). Perkembangan komoditi ini hampir sama nasibnya dengan komoditi pertanian lainnya seperti cabe yaitu mengalami pasang surut harga yang sangat signifikan. Harga

tomat di tingkat petani saat ini adalah Rp. 2.000/kg (Lombok Post, 29/03/2017) bahkan ada yang satu keranjang tomat dijual dengan harga 5000-15.000 per kilogramnya sehingga, banyak petani yang mengalami kerugian. Harga tomat yang rendah telah menyebabkan petani lebih memilih membuang atau membiarkan membusuk di lahannya karena harga yang ditawarkan lebih rendah daripada biaya produksi.

Persoalan harga tomat yang rendah ini memang telah menarik perhatian banyak pihak tak terkecuali dari pemerintah dan para wakil rakyat di Gumi Patuh Karya ini. Berbagai usulan dan ide bermunculan untuk mengatasi persoalan harga tomat yang sangat rendah ini.



Pendirian pabrik saus adalah salah satu usulan atau ide yang muncul. Namun, sebelum kita membahas mengenai pendirian pabrik saus alangkah bijaknya apabila kita melihat akar persoalan yang menjadi dasar sehingga harga Tomat cenderung sangat rendah.



Karakteristik petani di NTB pada umumnya atau Lombok Timur khususnya adalah mengikuti arus dimana apabila melihat ada seorang petani yang sukses meraih keuntungan dengan mengandalkan satu komoditi maka, petani yang lainnya akan mengikuti. Contohnya adalah dalam hal ini adalah komoditi tanaman Tomat. Apabila ada petani yang mengalami kesuksesan dengan satu komoditi saja (Tomat) maka, petani yang lainnya akan berlomba-lomba ikut menanam Tomat dan ketika musim panen serentak tiba maka persediaan Tomat pasti akan berlimpah di pasaran. Disinilah mekanisme pasar akan bermain yaitu penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dimana dua kekuatan inilah yang akan menentukan harga. Produksi Tomat petani yang berlimpah tidak sebanding dengan permintaan pasar.

Selain faktor *supply* dan *demand*, anjloknya harga Tomat juga disebabkan oleh musim tanam yang tidak tepat. Pada umumnya petani Tomat di Lombok Timur merupakan petani musiman sehingga, pola dan waktu tanamnya sudah memiliki patokan. Namun, persoalannya adalah hasil produksi para petani

ini terkadang tidak maksimal karena tergantung dari perubahan kondisi cuaca yang seringkali berubah-ubah diakibatkan oleh adanya perubahan iklim (climate change) yang terjadi. Untuk saat ini petani menanam ketika musim penghujan masih tidak menentu sehingga, banyak tanaman Tomat menjadi busuk. Selain daripada itu, harga yang anjlok ini juga disebabkan pasokan Tomat dari daerah lain yang juga berlimpah dan membanjiri pasar.

Melihat persoalan harga Tomat yang anjlok ini, Lombok Research Center (LRC) memandang bahwa persoalan diversifikasi pertanian dan pemberdayaan masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi. Butuh ide-ide kreativitas yang lebih untuk dapat menjawab persoalan anjloknya harga Tomat petani di Lombok Timur. Pemerintah harusnya dapat memanfaatkan produksi Tomat yang berlimpah ini disaat harga yang rendah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Salah satu contoh adalah yang telah dilakukan oleh Lombok Research Center yaitu membina BUMDes Lentera di Desa Lendang Nangka untuk mengolah Tomat menjadi bentuk lain yaitu kurma rasa Tomat (permen Tomat). Tomat produksi petani di Desa Lendang Nangka dapat diserap oleh BUMDes Lentera sehingga harga Tomat di tingkatan petani di Desa Lendang Nangka cenderung tidak mengalami penurunan yang sangat drastis. Selain memberikan pembinaan, lembaga ini juga membantu di dalam proses pemasarannya melalui media (website) yang dimiliki.

Pola pembinaan ini harusnya menjadi perhatian dari aparaturnya terkait sehingga, persoalan harga tidak menjadi pembahasan setiap tahunnya ketika harga Tomat anjlok. Pemerintah Lombok Timur dalam hal ini SKPD terkait harus memiliki kesamaan pemahaman didalam mengatasi permasalahan ini. Dinas pertanian melakukan pembinaan kepada para petani sehingga petani dapat menghasilkan produksi yang dari kualitas terus mengalami peningkatan terutama juga terkait dengan transfer pengetahuan (*transfer knowledge*) teknologi di bidang pertanian, begitu pula dengan Dinas Koperasi Dan UKM juga ikut mendorong untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi atau BUMDes yang ada di setiap desa agar setiap koperasi atau BUMDes mampu

memiliki ide-ide kreatif untuk mengolah hasil pertanian menjadi suatu komoditi yang memiliki nilai ekonomi lebih. Untuk pemasaran maka Dinas Perdagangan Dan Perindustrian juga memiliki peranan penting untuk membantu para petani dan koperasi dan UKM atau BUMDes membuka akses pasar dengan cara menghubungkan dengan pasar. Apabila semua stakeholder ini semua dapat memiliki kesamaan visi maka, berbagai persoalan yang terkait dengan harga akan dapat terpecahkan.

Jadi, ide untuk mendirikan pabrik saus di Lombok Timur saat ini belumlah tepat karena masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjawab keluhan petani terkait anjloknya harga Tomat. Pulau Lombok ini sangatlah kecil dan belum waktunya untuk menjadi daerah industri. Persoalan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas untuk lebih ditingkatkan ditambah lagi dengan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 2010. Pemeliharaan Tanaman dalam Budidaya Tembakau. <<http://binaukm.com/pemeliharaan/tanaman/dalam/budidaya/tembakau.htm>>. Diakses pada tanggal 16 juli 2013.
2. Anonim. 2011. <[http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/komoditi %20tan-aman%20tembakau.pdf](http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/komoditi%20tan-aman%20tembakau.pdf)>. Diakses tanggal 15 juli 2013.
3. Alexander, M. 1976. Introduction to Soil Microbiology. Second ed. John Wiley & Sons. New York, USA.
4. Anderson, H.A. dan D. Vaughan. 1985. Soil Nitrogen: Its Extraction, Distribution and Dynamics. In D. Vaughan and R.E. Malcolm (eds.). Soil Organic Matter and Biological Activity.
5. Dwidjoseputro, D. 1980. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. PT. Gramedia
6. Hanum, C. 2008. Teknik Budidaya Tanaman. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
7. Hendromono. 1998. Pengaruh Media Organik dan Tanah Mineral terhadap Mutu Bibit Pterygota alata Roxb.. Bul. Pen. Hutan (For. Res. Bull.) 617:55-64.
8. Hu, H., Li, X., dan He, J., 2001. Effect of Organic Acid on Desorption of Phosphate from surface of Aluminium and Agrochemistry. Huazhong Univevrsity. China.
9. Maulidiana, N. 2008. Identifikasi Sistem Budidaya Tembakau di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Helvetia. Sripsi, Universitas Sumatera Utara.
10. John, Benton, J, Jr. 1998. Plant Nutrition Manual. U.S.A. CRC Press LCC.
11. Kramer, P. J. and T. T. Kozlowski. 1979. Physisology of Woody Plants. Academic Press Inc. New York, USA
12. Puslitrkoka. 2006. Panduan Lengkap Budi daya kakao. Agromedia Pustaka. Jakarta.
13. Parman dan Mulyaningsih. 1998. Budidaya Tanaman Gaharu. Prosiding Lokakarya Pengembangan Gaharu. Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
Universitas Mataram. Mataram.

14. Suwanto dan Y. Octavianty. 2010. Budi Daya 12 Tanaman Perkebunan Unggulan. Penerbit Swadaya, Jakarta.
15. Warintek, 2007. Tembakau Bantul. Diakses pada tanggal 15 Desember 2012.
16. Warintek. 2011. Budidaya Tanaman Tembakau Virginia. <<http://warintek.bantulkab.go.id/web.php?mod=basisdata&kat=1&sub=2&file=32>>. Diakses tanggal 16 juli 2013.
17. Stevenson, F. S., 1982. Humus Chemistry Genesis, Composition, Reactions. A Wiley Interscience Publication. John Wiley and Sons. New York. 443 p.

**TERIMA KASIH
“ BANGGA MENJADI PETANI “**



Lombok Research Center (LRC) terbentuk sejak tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terbentuknya lembaga ini didasari kegelisahan para pendirinya melihat berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dimana dalam setiap program kebijakannya seringkali tidak menggunakan basis data dan informasi terkini bahkan cenderung hanya bersifat copy paste program pemerintah pusat.

Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) memiliki visi untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang handal baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional didalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun misinya adalah melakukan riset dasar dan terapan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, LRC juga melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai institusi, lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) maupun pihak swasta baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan LRC adalah seperti berbagi informasi dan pengetahuan serta teknologi, riset dan pengembangan, perencanaan, dan pendampingan teknis khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kerjasama yang LRC telah jalin antara lain dengan pemerintah daerah se-Provinsi NTB, PT. ASTRA International, TdH Nedherland, Universitas Mataram, Yayasan Nurani Dunia, Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup RI, Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI), Yayasan Sanggabuana Jakarta, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga donor baik tingkat nasional maupun internasional lainnya.

Selain itu, LRC juga memberikan jasa/pelayanan konsultasi dalam bidang penelitian, pelatihan, dan pendampingan dalam lingkup pengembangan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara komprehensif.

LOMBOK RESEARCH CENTER

Alamat :

Jalan Raya Paok Motong Desa Paok Motong
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat

Website

www.lrc.or.id

Email

info.lrc2014@gmail.com